



WALI KOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TUAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2013 Nomor 62 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 6072);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

dan

WALI KOTA TUAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Maluku.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tual.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tual Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Kondisi Daerah adalah keadaan atau karakteristik suatu wilayah administratif (provinsi/kabupaten/kota) yang meliputi Letak geografis dan topografi, Jumlah dan sebaran penduduk, Ekonomi dan tingkat kesejahteraan, Ketersediaan infrastruktur dan layanan publik, Sosial budaya dan kapasitas kelembagaan, Kerawanan bencana atau konflik.
11. Permasalahan Daerah adalah segala bentuk hambatan, tantangan, atau isu-isu strategis yang dihadapi oleh suatu wilayah administratif (provinsi, kabupaten, atau kota) dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Isu strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah.
18. Arah Kebijakan RPJPD yang selanjutnya disebut Arah Kebijakan adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD.
19. Sasaran Pokok RPJPD yang selanjutnya disebut Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan, pedoman dan arah bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Tual, dengan menetapkan visi dan misi pembangunan guna mewujudkan pembangunan jangka panjang daerah Kota Tual. Visi pembangunan adalah gambaran ideal tentang masa depan yang diinginkan, sementara misi adalah pernyataan tentang tujuan utama yang akan dicapai untuk mencapai visi tersebut.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah, panduan, dan kerangka kerja yang jelas dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing di tingkat lokal dalam jangka panjang.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

Program pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Maluku dan RTRW Kota Tual.

BAB III

RPJPD TAHUN 2025-2045

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Kepala Bappeda menyusun Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a) bab I Pendahuluan
 - b) bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c) bab III Permasalahan dan Isu Strategis
 - d) bab IV Visi Dan Misi Daerah
 - e) bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
 - f) bab VI Penutup
- (3) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Wali Kota melalui Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk melaksanakan visi dan mewujudkan misi jangka panjang Daerah.
 - b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
 - c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
 - d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
 - e. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
PERUBAHAN RPJPD TAHUN 2025-2045

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VI KETENTUAN LAINNYA

Pasal 10

Dalam hal adanya perubahan pada Peraturan Daerah Kota Tual tentang Rencana Tata Ruang Wilayah maka akan di sesuaikan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tual.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tual Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7078), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 22 Agustus 2025

WALI KOTA TUAL,

AKHMAD YANI RENUAT

Diundangkan di Tual
pada tanggal 22 Agustus 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,


RIDWAN HUSAID RENWARIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2025 NOMOR 7142

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TUAL,
PROVINSI MALUKU : 3/30/2025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 7142 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA TUAL TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dijelaskan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Atas dasar itu, RPJPD Kota Tual disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 tahun, yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan dan cita-cita pembangunan yang hendak dicapai oleh Kota Tual dan strategi untuk mencapainya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menentukan bahwa penetapan RPJPD dilakukan dengan Peraturan Daerah. Sebelumnya Kota Tual telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tual Tahun 2005-2025. Oleh karena masa berlakunya RPJPD tersebut akan segera berakhir, maka Pemerintah Kota Tual menyusun suatu RPJPD untuk tahun 2025-2045. RPJPD ini akan menjadi dasar bagi penyusunan RPJMD dan RKPD yang akan menentukan arah pembangunan Kota Tual sampai tahun 2045.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tual Tahun 2025-2045, dengan ruang lingkup materi muatan yang mencakup pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, visi dan misi daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 7142



PEMERINTAH KOTA TUAL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2025 - 2045

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KATA PENGANTAR

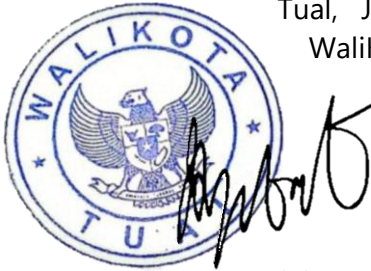
Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur terpanjat ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tual Tahun 2025-2045 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual.

Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Kota Tual tahun 2025-2045 ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Rancangan Akhir RPJPD Kota Tual Tahun 2025-2045 ini diharapkan dapat menjadi peta jalan pembangunan yang ada di Kota Tual dan sekaligus menjadi rujukan untuk menyusun dokumen perencanaan turunannya yakni seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan penyelarasan penyusunan dokumen perencanaan ini, diharapkan proses pembangunan yang ada di pusat sampai daerah mampu terintegrasi serta selaras sehingga pembangunan pada level nasional secara keseluruhan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Tual, Juni 2025
WaliKota Tual,



AKHMAD YANI RENUAT, S.Sos., M.Si., MH.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	5
1.4. Maksud dan Tujuan	6
1.4.1. Maksud	6
1.4.2. Tujuan	6
1.5. Sistematika	7
1.5.1 Bab I Pendahuluan	7
1.5.2 Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah	8
1.5.3 Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	8
1.5.4 Bab IV Visi dan Misi	8
1.5.5 Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok	9
1.5.6 Bab VI Penutup	9
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	11
2.1.1 Aspek Geografi	11
2.1.2 Demografi	37
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	41
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	42
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	48
2.3. Aspek Daya Saing	52
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	52
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia	56
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	60
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	62

2.4.	Aspek Pelayanan Umum	65
2.4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	65
2.4.2	Indeks Pelayanan Publik	66
2.4.3	Indeks Inovasi Daerah	67
2.4.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	67
2.5.	Evaluasi Hasil RPJPD 2005 - 2025	68
2.5.1	Capaian Indikator Makro Pembangunan	69
2.5.2	Evaluasi Misi RPJPD Kota Tual 2005 - 2025	71
2.6.	Tren Demografi dan Kebutuhan Prasarana Pelayanan Publik	73
2.6.1	Proyeksi Penduduk	73
2.6.2	Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana	80
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	88
2.7.1	Pengembangan Struktur Ruang Kota	88
2.7.2	Pengembangan Kawasan	90

PERMASLAHAN & ISU STRATEGIS

3

3.1.	Permasalahan Pembangunan	93
3.1.1	Aspek Geografi	93
3.1.2	Aspek Daya Saing	96
3.1.3	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	99
3.1.4	Aspek Pelayanan Umum	101
3.2.	Isu Strategis	103
3.2.1	Isu Strategis Internasional	103
3.2.2	Isu Strategis Nasional	105
3.2.3	Isu Strategis Maluku	106
3.2.4	Isu Regional Kota Tual	109

VISI & MISI

4

4.1.	Visi Kota Tual Tahun 2025-2045	115
4.1.1	Pengertian Visi	116
4.1.2	Sasaran Visi	118
4.2.	Misi	120
4.2.1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	121
4.2.2	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Adil dan Merata	122

4.2.3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum yang Cepat, Bersih, Efektif dan Adaptif	123
4.2.4	Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	124
4.2.5	Mewujudkan Infrastruktur Publik, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas	125

ARAH KEBIJAKAN & SASARAN POKOK

5	5.1	Arah Kebijakan Kota Tual	126
	5.1.1	Arah Kebijakan Kota Tual Tahap I (2025 - 2029)	128
	5.1.2	Arah Kebijakan Kota Tual Tahap II (2030 - 2034)	128
	5.1.3	Arah Kebijakan Kota Tual Tahap III (2035 - 2039)	129
	5.1.4	Arah Kebijakan Kota Tual Tahap IV (2040 - 2045)	120
	5.2	Sasaran Pokok RPJPD Kota Tual 2025 - 2045	134

PENUTUP

6	Penutup	160
---	---------	-----

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel	2.1	Wilayah Administrasi Kota Tual	12
Tabel	2.2	Data Klimatologi Kota Tual Tahun 2023	16
Tabel	2.3	Penggunaan Lahan Kota Tual 2023	19
Tabel	2.4	Indeks Resiko Bencana Kota Tual 2022	22
Tabel	2.5	Potensi Sumberdaya Perikanan	23
Tabel	2.6	Produksi Perikanan Tangkap di Kota Tual Tahun 2019 – 2023	23
Tabel	2.7	Produksi Tanaman Pangan di Kota Tual Tahun 2018 – 2023	25
Tabel	2.8	Produksi Holtikultura di Kota Tual Tahun 2018 – 2023	25
Tabel	2.9	Produksi Perkebunan di Kota Tual Tahun 2018 – 2023	26
Tabel	2.10	Produksi Pertanian Di Kota Tual Tahun 2019 – 2023	27
Tabel	2.11	Objek Wisata di Kecamatan Pulau Dullah Utara	28
Tabel	2.12	Objek Wisata di Kecamatan Pulau Dullah Selatan	28
Tabel	2.13	Objek Wisata di Kecamatan Tayando Tam	28
Tabel	2.14	Objek Wisata di Kecamatan Pulau-Pulau Kur	29
Tabel	2.15	Objek Wisata di Kecamatan Kur Selatan	29
Tabel	2.16	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Kota Tual	31
Tabel	2.17	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air Kota Tual	32
Tabel	2.18	Status Daya Dukung Daya Tampung Penyediaan Air Kota Tual	34
Tabel	2.19	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Maluku	35
Tabel	2.20	Jumlah Penduduk Kota Tual kurun waktu Tahun 2018-2023 (jiwa)	38
Tabel	2.21	Rasio Jenis Kelamin Kota Tual Tahun 2023	39
Tabel	2.22	Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2023	40
Tabel	2.23	Kepadatan Penduduk Kota Tual Tahun 2019-2023	41
Tabel	2.24	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tual, Maluku dan Nasional	43
Tabel	2.25	Gini Ratio Kota Tual, Maluku dan Nasional Tahun 2019-2023	45
Tabel	2.26	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tual, Maluku dan Nasional	47
Tabel	2.27	IPM Kota Tual, Maluku dan Nasional Tahun 2019 - 2023	47
Tabel	2.28	Indeks Perlindungan Anak	55
Tabel	2.29	Struktur Ekonomi Kota Tual Menurut Lapangan Tahun 2019-2023	54
Tabel	2.30	PDRB Per Kapita Kota Tual Tahun 2019-2023	55
Tabel	2.31	Indeks Pendidikan Kota Tual Tahun 2019-2023	57
Tabel	2.32	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023	58
Tabel	2.33	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tual	59
Tabel	2.34	Rasio Ketergantungan Kota Tual 2019-2023	60

Tabel	2.35	Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah	61
Tabel	2.36	Indeks Daya Saing Daerah Kota Tual 2022 - 2023	64
Tabel	2.37	Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2023	65
Tabel	2.38	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tual 2023	66
Tabel	2.39	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Tual 2023	66
Tabel	2.40	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	68
Tabel	2.41	Capaian Indikator Makro Pembangunan (2005 - 2023)	69
Tabel	2.42	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tual 2025-2045 (jiwa)	74
Tabel	2.43	Kepadatan Penduduk Kota Tual 2025-2045 (jiwa/km ²)	75
Tabel	2.44	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tual Menurut Jenis Kelamin	76
Tabel	2.45	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tual Berdasarkan Umur	77
Tabel	2.46	Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kota Tual	79
Tabel	2.47	Proyeksi Kebutuhan Tempat Tingal Kota Tual 2025-2045	81
Tabel	2.48	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih	82
Tabel	2.49	Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik	83
Tabel	2.50	Proyeksi Sampah Kota Tual 2025-2045	84
Tabel	2.51	Proyeksi Sarana Kesehatan Kota Tual 2025-2045	86
Tabel	2.52	Proyeksi Sarana Pendidikan Kota Tual 2025-2045	87
Tabel	3.1	Isu strategis Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025-2045	105
Tabel	3.2	Keselaran Isu Strategis RPJPD Kota Tual dengan KLHS RPJPD	110
Tabel	3.3	Isu Strategis Global, Nasional, Maluku dan Kota Tual	110
Tabel	4.1	Sasaran Visi Pendapatan Per Kapita	118
Tabel	4.2	Sasaran Visi Kemiskinan dan Ketimpangan	119
Tabel	4.3	Sasaran Visi Daya Saing Daerah	119
Tabel	4.4	Sasaran Visi Daya Saing Sumberdaya Manusia	120
Tabel	4.5	Sasaran Visi Intensitas Emisi GRK	120
Tabel	5.1	Arah Kebijakan RPJPD Kota Tual 2025 - 2045	131
Tabel	5.2	Sasaran Pokok RPJPD Kota Tual 2025 - 2045	134
Tabel	5.3	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan	136

DAFTAR GAMBAR

			Halaman
Gambar	1.1	Keterhubungan RPJPD Kabupaten/Kota dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	5
Gambar	2.1	Wilayah Administrasi Kota Tual	12
Gambar	2.2	Produksi Perikanan Kota Tual	24
Gambar	2.3	Sebaran Daya Tarik wisata Kota Tual	27
Gambar	2.4	Piramida Penduduk Kota Tual 2023	39
Gambar	2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tual, Maluku dan Nasional Tahun 2019 - 2023	43
Gambar	2.6	Tingkat Kemiskinan Kota Tual Tahun 2019 - 2023	44
Gambar	2.7	Tingkat Inflasi Kota Tual Tahun 2019 - 2023	45
Gambar	2.8	Gini Ratio Kota Tual, Maluku dan Nasional Tahun 2019 - 2023	46
Gambar	2.9	IPM Kota Tual, Maluku dan Nasional Tahun 2019 - 2023	48
Gambar	2.10	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tual Tahun 2019-2023	53
Gambar	2.11	Pencapaian Pembangunan Kota Tual Tahun 2005 - 2023	70
Gambar	2.12	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umum 15 - 64 Tahun Tahun 2025 - 2045	78
Gambar	3.1	Persentase Sumber Sampah di Kota Tual	95
Gambar	4.1	Misi Kota Tual 2025 - 2045	121
Gambar	5.1	Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Tual Tahun 2025 - 2045	127



1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa depan merupakan waktu yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan yang kompleks, seperti urbanisasi, pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan kemajuan teknologi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dapat menjadi instrumen strategis untuk mengantisipasi dan menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan merumuskan kebijakan dan langkah-langkah pembangunan yang tepat.

Sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki kepentingan yang sangat vital dalam konteks pembangunan suatu daerah, dan merupakan kewajiban bagi daerah untuk menyusunnya seperti yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJPD akan memberikan pandangan jangka panjang mengenai arah pembangunan suatu daerah. Dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang, RPJPD membantu pemerintah daerah untuk memiliki gambaran yang jelas tentang masa depan yang diinginkan.

Setiap kabupaten/kota memiliki potensi dan keunggulan yang berbeda-beda. RPJPD dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut, baik dalam sektor economic seperti pertanian, pairwise, industri, maupun sektor lainnya, untuk

meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pembangunan daerah. Namun RPJPD juga harus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini mencakup peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan sanitasi, serta menciptakan lapangan kerja yang layak dan kesempatan ekonomi yang merata.

Dalam periode tahun 2025-2045, keberlanjutan menjadi semakin penting dalam pembangunan. RPJPD dapat menjadi instrumen untuk mengarahkan pembangunan menuju arah yang berkelanjutan, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, pengembangan ekonomi yang inklusif, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Rencana pembangunan jangka panjang daerah akan memungkinkan untuk rencana pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu dan kohesif. Berbagai sektor pembangunan seperti ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, dan lain-lain dapat diintegrasikan secara holistik, sehingga tercipta sinergi antarkebijakan yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan. Pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas-prioritas pembangunan yang harus diutamakan dalam jangka panjang. Hal ini membantu dalam alokasi sumber daya dan anggaran secara efisien dan efektif untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan, RPJPD Kota Tual juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen RPJPD ini adalah produk bersama yang merupakan hasil integrasi dari berbagai rujukan. Adapun rujukan dasarnya adalah Visi dan Misi daerah untuk kurun waktu 20 tahun, yang selanjutnya diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPN, RPJPD Provinsi Maluku dan RTRW. Untuk itu, RPJPD Kota Tual 2025-2045 harus menjadi acuan utama bagi rencana pembangunan Kota Tual dalam 20 tahun ke depan, yang penyusunannya bersifat partisipatif dan demokratis dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan RPJPD merupakan proses yang interatif, yang berarti bahwa perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan dapat disesuaikan. Berdasarkan perkembangan dan kebutuhan yang muncul selama penyusunannya dan kondisi dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, RPJPD harus memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal yang terjadi di masa mendatang. Hal ini memungkinkan

pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terus berubah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Pelaksanaan penyusunan RPJPD Kota Tual ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meliputi;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2013 Nomor 62 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 6072);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045; dan
21. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 – 2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJPD Kota Tual 2025–2045 disusun dengan mengacu dan memperhatikan dokumen pembangunan lainnya. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045, hubungan dokumen RPJPD Kota Tual 2025–2045 adalah sebagai berikut:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045

Penyusunan RPJPD Kota Tual 2025–2045 selaras dan berpedoman kepada RPJPN 2025–2045, terutama terkait arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan indikator kinerja yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi dan pengembangan Kota Tual.

b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku 2025–2045

Penyusunan RPJPD Kota Tual 2025–2045 juga selaras dan berpedoman kepada RPJPD Provinsi Maluku 2025–2045, terutama terkait arah kebijakan kewilayahan dan arah pembangunan Provinsi Maluku.

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual 2013-2032

Penyusunan RPJPD Kota Tual 2025-2045 juga mengacu dan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual.

d. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Tual

Penyusunan RPJPD Kota Tual 2025-2045 juga mempertimbangkan substansi KLHS RPJPD Kota Tual 2025-2045 yang meliputi isu strategis dan arah kebijakan.

e. Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tual 2005-2025

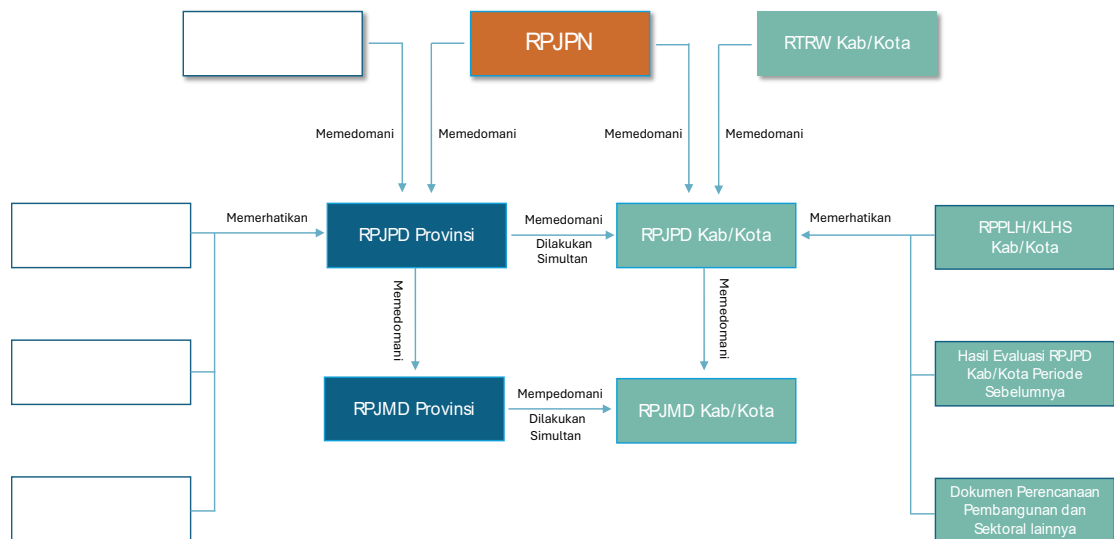
Dalam rangka kontinuitas dan konsistensi penyusunan, RPJPD Kota Tual 2025-2045 memperhatikan Hasil Evaluasi RPJPD Kota Tual 2005-2025. Substansi Hasil Evaluasi RPJPD periode sebelumnya yang perlu diperhatikan yaitu hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi.

f. Dokumen Rencana Pembangunan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJPD Kota Tual 2025-2045 memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang relevan dan dapat diadopsi ke dalam perencanaan pembangunan Pangka Panjang.

g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual

Dokumen RPJPD Kota Tual 2025-2045 akan berfungsi sebagai acuan utama dalam penyusunan dokumen RPJMD pada empat periode mendatang. Substansi yang menjadi rujukan mencakup tema pembangunan dan arah kebijakan setiap periode RPJPD 2025-2045, serta sasaran pokok beserta indikatornya. Selanjutnya, dokumen RPJMD akan menguraikan program-program pembangunan berdasarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok yang tercantum dalam RPJPD, untuk kemudian dijabarkan ke dalam dokumen turunan lainnya seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta dokumen-dokumen pembangunan tematik terkait lainnya.



Gambar 1.1.
Keterhubungan RPJPD Kabupaten/Kota dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sumber : Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, diolah, Bappeda, 2024.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud Penyusunan RPJPD Kota Tual adalah memberikan landasan, pedoman dan arah bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Tual, dengan menetapkan visi dan misi pembangunan guna mewujudkan pembangunan jangka panjang daerah Kota Tual. Visi pembangunan adalah gambaran ideal tentang masa depan yang diinginkan, sementara misi adalah pernyataan tentang tujuan utama yang akan dicapai untuk mencapai visi tersebut.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kota Tual adalah untuk memberikan arah, panduan, dan kerangka kerja yang jelas dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing di tingkat lokal dalam jangka panjang. Secara khusus tujuan penyusunan RPJPD Kota Tual adalah:

- menetapkan prioritas-prioritas pembangunan yang harus diformulasikan oleh pemerintah Kota Tual dalam jangka panjang, dengan mengidentifikasi masalah-masalah utama, potensi-potensi pembangunan, serta kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas.
- membantu dalam mengatur penggunaan sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran publik, tenaga kerja, dan infrastruktur, secara efisien dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

- mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tual. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam.
- memberikan pedoman dan kerangka kerja bagi pemerintah Kota Tual, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi program-program pembangunan jangka panjang. Ini mencakup kebijakan-kebijakan, program-program, dan proyek-proyek strategis yang akan dilaksanakan.
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, harmonisasi dan penyelarasan serta sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu dan antarfungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah

1.5. Sistematika

1.5.1 Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum kondisi yang melatarbelakangi penyusunan RPJPD Kota Tual Tahun 2025-2045, menginventarisasi dan mengidentifikasi produk-produk hukum yang relevan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan RPJPD ini, dan penjelasan tentang kedudukan RPJPD Kota Tual Tahun 2025-2045 dan keterkaitannya dengan RPJPN 2025, RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045, RTRW Provinsi Maluku maupun RTRW Kota Tual, serta maksud dan tujuan sebelum pemaparan sistematika penyusunan RPJPD ini. Adapun struktur bab ini adalah;

- Latar Belakang
- Dasar Hukum Penyusunan
- Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

1.5.2 Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

Bagian menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan kondisi saat ini perkembangan

kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, hasil evaluasi RPJPD Kota Tual 2005 – 2025, dan tren demografi dan kebutuhan prasarana pelayanan publik, yang secara rinci adalah:

- Aspek Geografi dan Demografi
- Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- Aspek Daya Saing Daerah
- Aspek Pelayanan Umum
- Hasil Evaluasi RPJPD 2005 – 2025
- Tren Demografi dan Kebutuhan Prasarana Pelayanan Publik

1.5.3 Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Isu-isu strategis disajikan meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis baik internasional, nasional maupun regional yang harus dihadapi dalam periode 20 tahun perencanaan. Adapun rincian pembahasan dalam bab ini adalah:

- Permasalahan
- Isu Strategis Daerah

1.5.4 Bab IV Visi dan Misi

Pada Bab ini dijelaskan visi dan misi RPJPD Kota Tual Tahun 2025 – 2045.

- Visi

Visi menyajikan uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

- Misi

Misi menjelaskan hubungan yang erat dengan visi untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok.

1.5.5 Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan

menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Pada bagian ini menjelaskan keterhubungan antara sasaran pokok dan visi/misi melalui indikator kinerja beserta target masing-masing.

- Arah Kebijakan
 - Arah Kebijakan Periode Tahun 2025 - 2029
 - Arah Kebijakan Periode Tahun 2030 – 2034
 - Arah Kebijakan Periode Tahun 2035 - 2039
 - Arah Kebijakan Periode Tahun 2040 – 2045
- Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Kota Tual Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

1.5.6 Bab VI Penutup

Memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen resiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembahasan Bab II dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tual 2025-2045 menyajikan Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang merupakan fondasi penting dalam merencanakan dan menentukan arah pembangunan Kota Tual untuk dua dekade ke depan. Bab ini secara komprehensif menguraikan aspek-aspek kunci yang membentuk kerangka kerja pembangunan daerah, termasuk aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan sosial budaya, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, hasil evaluasi RPJPD 2005-2025, Analisa Tren Demografi dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik serta Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah. Telaah terhadap hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan bab ini.

Secara umum pembahasan bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi Kota Tual saat ini, mencakup semua aspek vital yang mempengaruhi kualitas hidup dan pembangunan daerah. Kedua, meletakkan dasar bagi perencanaan strategis yang berwawasan ke depan, dengan merangkum data historis, tren saat ini, dan proyeksi masa depan, untuk mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur, dan juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Dalam konteks pengembangan Kota Tual yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 mendalami aspek geografi dan demografi yang merupakan batu pijakan dan pilar fundamental dalam merancang masa depan Kota Tual. Melalui penjabaran rinci yang mencakup kondisi geografis, topografi, hidrologi, oseanografi, klimatologi, digunakan untuk memetakan kerangka lingkungan alam yang menjadi dasar bagi semua inisiatif pembangunan. Gambaran aspek geografis ini dilengkapi pula dengan beberapa indikator yang terkait, termasuk didalamnya presentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW. Selanjutnya, dengan memperhatikan kondisi demografi dengan indikator-indikator terkait akan menyediakan platform kritis untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan. Ini bertujuan untuk memberikan arahan yang tepat dan informatif dalam merencanakan dan menerapkan strategi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan konteks kearifan lokal Kota Tual.

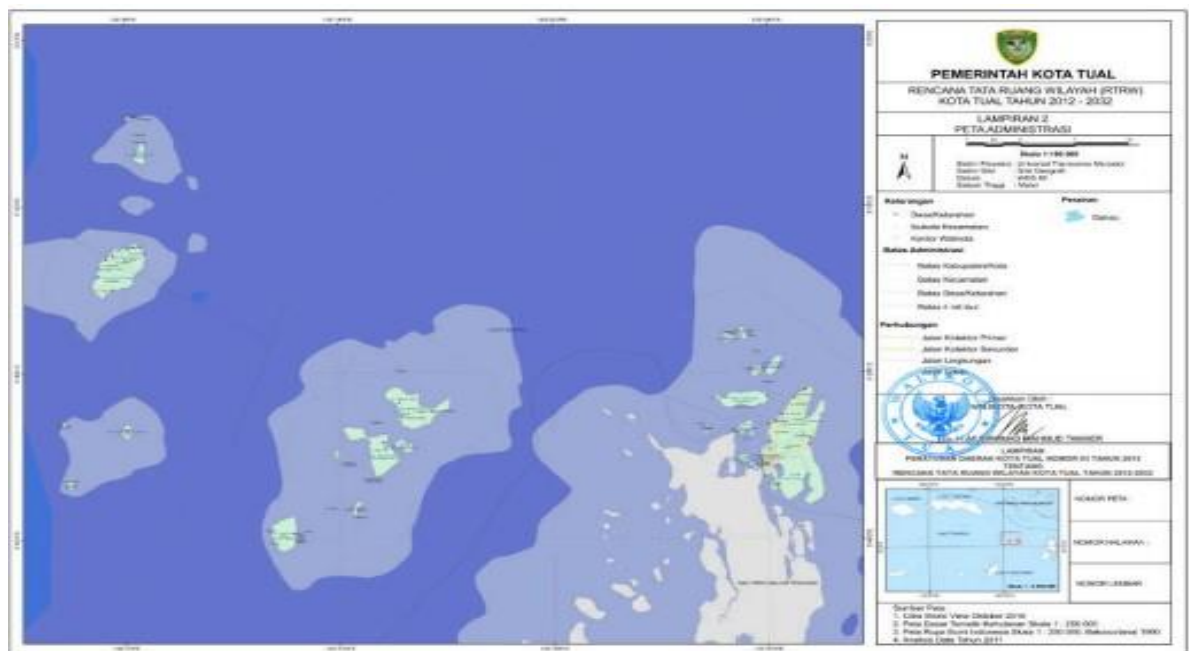
2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Karakteristik Wilayah

1. Letak Geografis dan Administrasi

Tual adalah sebuah kota yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kota-kota lainnya, karena memiliki karakteristik kota dengan sebagian wilayahnya berupa pulau-pulau. Jarak dari Tual ke Kota Ambon sebagai ibukota provinsi, adalah kurang lebih 552 kilometer. Secara astronomis Tual berada antara 5° dan 6,5° Lintang Selatan serta 131° dan 133,5° Bujur Timur. Wilayah Kota Tual membentang sekitar 19.342,39 kilometer persegi, di mana daratannya mencakup sekitar 254,39 km² (1,33%) dan wilayah perairannya sekitar 19.088 km² (98,67%). Secara administratif, Kota Tual memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Banda,
Sebelah Timur	: Kabupaten Maluku Tenggara yang berada di Selat Nerong,
Sebelah Selatan	: Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara serta Laut Arafura.
Sebelah Barat	: Laut Banda.



Gambar 2.1. Wilayah Administrasi Kota Tual

Secara administratif, Kota Tual dibagi menjadi lima kecamatan, mencakup 27 desa, 3 kelurahan, dan 11 dusun. Dikenal sebagai kota kepulauan yang terdiri dari 66 pulau, yang terbagi menjadi tiga kelompok pulau, yaitu kelompok Pulau-pulau Kur, Pulau Tayando Tam, dan Pulau Dullah, dimana Pulau Dullah sebagai pulau terbesar. Jarak dari ibukota Tual ke Tubyal, ibukota kecamatan yang paling jauh di Kecamatan Pulau-pulau Kur, adalah sekitar 103 kilometer atau 57 mil laut, dengan waktu tempuh yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca.

Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kota Tual

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Dusun	Kelurahan
1	Pulau Dullah Utara	Namser	1. Ohoitel	1. Watran 2. Laerkamor	
			2. Fiditan		
			3. Ngadi		
			4. Dullah		
			5. Dullah Laut	1. Duroa	
			6. Labetawi		--
			7. Tamedan		
			8. Ohoitahit		
2	Pulau Dullah Selatan	Wearhir	Tual	1. Fair 2. Mangon 3. Pulau Ut	1. Ketsoblak 2. Lodar El 3. Masrum

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Dusun	Kelurahan
3	Tayando Tam	Tayando Yamtel	Taar		
			Tayando Yamtel		
			Tayando Langgiar		
			Tayando Ohoiel		
			Tayando Yamru		
			Tam Ngurhir	Tam Ohoitom	
4	Pulau-Pulau Kur	Finualen	Finualen		
			Tubyal		
			Kaimear		
			Sermaf		
			Lokwirin		
5	Kur Selatan	Kanara	Kanara		
			Warkar		
			Yapas		
			Hirit		
			Mangur Tiflen		
			Rumoin	Fitarlor	
				Pasir Panjang	
			Mangur Niela	Fadol	

Sumber: RTRW Kota Tual 2012-2032, 2013.

2. Topografi

Topografi Kota Tual menunjukkan variasi yang signifikan di setiap pulau, berkisar dari wilayah datar hingga berbukit. Pulau Dullah, misalnya, menampilkan topografi yang umumnya landai, dengan ketinggian rata-rata sekitar 100 meter di atas permukaan laut, ditandai dengan keberadaan bukit-bukit rendah. Sebaliknya, Pulau Dullah Laut dan Pulau Ut menampilkan topografi yang sangat landai, sampai-sampai sering terjadi genangan air laut pada saat pasang. Kepulauan Tayando juga memiliki topografi yang cenderung datar dan dekat dengan permukaan air laut, sedangkan Pulau Kur memiliki campuran dataran rendah dan tinggi. Kemiringan lereng di seluruh Kota Tual umumnya berkisar antara 0-8 persen dan 8-15 persen, dengan sebagian besar desa-desa terletak pada ketinggian antara 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut.

3. Geologi

Dalam konteks geologi regional, Kota Tual terletak di bagian timur Indonesia, sebuah area dengan karakter kompleksitas geologis yang signifikan. Area ini menampilkan sebuah patahan skala besar yang berorientasi barat daya-timur laut, berfungsi sebagai

perpanjangan dari zona subduksi di selatan Indonesia, yang terbentuk akibat interaksi antara lempeng benua Asia dan Australia. Secara tektonik, Kota Tual terletak di atas prisma akresi Palung Aru. Secara geologis, Kota Tual umumnya didominasi oleh batuan berumur kuartar, di samping batuan tersier dan batuan lain yang diduga berumur pra-tercier. Secara stratigrafis, urutan batuan di wilayah ini meliputi Kompleks Batuan Malihan, Kompleks Tanjung Matot, Formasi Kei Kecil, dan Endapan Pantai. Kompleks Batuan Malihan, yang diperkirakan berumur pra-Tersier dan terletak di Pulau Kur serta sebagian kecil di Pulau Fadol, terdiri dari litologi gneiss feldspar-kuarsa-biotit-muscovit dengan karakter granitik, mengandung apatit dan oksida besi, serta sekis biotit-muskovit, gneiss hornblende-kuarsa-plagioklas dengan biotit.

Batuan yang lebih muda, diduga berumur Pliosen, tergabung dalam Kompleks Tanjung Matot, dengan litologi utama berupa kalkarenit, dolomit, greywacke, serpih berwarna hitam kecoklatan, dalam matriks berupa napal dan lempung. Kompleks ini terletak secara diskordan di bawah Formasi Kei Kecil dan ditemukan di beberapa lokasi seperti Tanjung Matot dan Pulau Tayando.

Formasi Kei Kecil, yang terutama terdiri dari batu gamping terumbu, mendominasi litologi di hampir semua pulau di Kota Tual, termasuk Kepulauan Kei dan Tayando. Di beberapa tempat juga ditemukan litologi endapan pantai yang terdiri dari pasir, kerikil, dan lumpur, seperti di Pulau Tayando, Pulau Walir, Pulau Nussren, dan Pulau Nunial. Secara umum, pulau-pulau di Kota Tual dikelilingi oleh terumbu karang, memungkinkan keberadaan endapan hancuran koral di sekitar pantai.

Dari sudut pandang struktur geologi, berdasarkan Peta Geologi Kepulauan Kai dan Tayando yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi pada tahun 1994, secara umum tidak teridentifikasi adanya struktur geologi yang signifikan di Wilayah Kota Tual. Akan tetapi, secara regional, daerah ini terletak di antara dua patahan besar dengan orientasi barat daya-timur laut. Kemungkinan ketiadaan singkapan struktur geologi di wilayah ini disebabkan oleh penutupan batuan berumur Kuartar. Batuan yang terlihat umumnya memiliki kemiringan lapisan kurang dari 30°, menunjukkan aktivitas deformasi batuan yang relatif rendah di wilayah ini. Secara regional, proses pengangkatan terakhir diketahui terjadi pada periode Plio-Plistosen.

Dalam konteks kondisi tanah, Kota Tual memiliki beberapa jenis tanah dengan karakteristik berbeda:

1. **Litosol:** Tanah ini memiliki tekstur sedang dan drainase yang baik, dengan ciri khas singkapan batuan yang terlihat di permukaan. Tanah Litosol seringkali berasosiasi dengan tanah rendsina, kambisol, brunizem, dan podsolik, mendukung vegetasi seperti hutan sekunder dan primer serta tanaman campuran tahunan.
2. **Rendsina:** Tanah jenis ini memiliki lapisan solum yang dangkal hingga sedang, tekstur dari sedang hingga halus, dan drainase yang baik. Tanah Rendsina sering terkait dengan litosol, kambisol, brunizem, dan podsolik, mendukung vegetasi hutan sekunder dan primer serta tanaman campuran.
3. **Podsolik:** Tanah ini memiliki lapisan solum yang dalam hingga sangat dalam, tekstur halus, dan drainase yang baik. Tanah Podsolik berasosiasi dengan kambisol, litosol, dan brunizem, mendukung pertumbuhan tanaman pertanian, tanaman campuran (tanaman tahunan, dan ladang), serta hutan sekunder dan primer.

Keberagaman topografi dan kondisi tanah di Kota Tual ini memainkan peran kunci dalam menentukan penggunaan lahan dan aktivitas pertanian di daerah ini, mempengaruhi biodiversitas serta strategi pengelolaan sumber daya alam.

4. Klimatologi

Iklim Kota Tual sangat terpengaruh oleh kondisi iklim di wilayah sekitarnya. Faktor-faktor seperti Laut Banda, Laut Arafura, Samudera Indonesia, Pulau Papua di timur, dan Benua Australia di selatan, berkontribusi pada fluktuasi iklim di wilayah ini. Berikut adalah ringkasan kondisi iklim di Kota Tual:

1. Kota Tual mengalami musim yang teratur. Musim Timur, dari April hingga Oktober, merupakan musim kemarau, sedangkan Musim Barat, dari Oktober hingga Februari, adalah musim hujan, dengan intensitas tertinggi pada bulan Desember dan Februari.
2. Musim Pancaroba terjadi pada Maret/April dan Oktober/November.
3. Angin Timur Tenggara berhembus dari April hingga Oktober. Angin kencang terjadi pada Januari dan Februari, disertai hujan deras dan laut yang bergelombang.
4. Angin Timur Tenggara dan Selatan, serta angin Tenggara mendominasi dari April hingga September.
5. Angin Barat Laut berhembus dari Oktober hingga Maret.

Berdasarkan peta Zone Agroklimat Provinsi Maluku (LTA 72, 1986) dan Klasifikasi Oldeman (1980), iklim Kota Tual terbagi menjadi dua zona agroklimat:

1. Zona II.5: Curah hujan tahunan antara 3.000 hingga 4.000 mm, termasuk dalam zona A2 ($> 9 \text{ BB}$, $< 2 \text{ BK}$) menurut Oldeman, yang meliputi wilayah Pulau Dullah dan sekitarnya.
2. Zona IV.1: Curah hujan tahunan antara 3.000 hingga 1.000 mm, juga termasuk dalam zona A2 ($> 9 \text{ BB}$, $< 2 \text{ BK}$) menurut Oldeman, yang mencakup wilayah Kecamatan Tayando Tam.

Tabel 2.2 Data Klimatologi Kota Tual Tahun 2023

Data Klimatologi		Rata-rata
Suhu (°C)	Minimal	20,00
	Maksimal	34,00
	Rata-Rata	28,52
Kelembaban (%)	Minimal	71,00
	Maksimal	99,00
	Rata-Rata	84,41
Tekanan Udara (mb)	Minimal	1.003,30
	Maksimal	1.010,70
	Rata-rata	1.013,80
Curah Hujan (mm/bulan)	Rata-rata	173,98
Penyinaran Matahari (%/bulan)	Rata-rata	1.023

Sumber: BPS - Kota Tual Dalam Angka Tahun, 2024.

Di Pulau Dullah dan sekitarnya, curah hujan berkisar antara 2.000 - 3.000 mm per tahun, dengan rata-rata 2.118,3 mm per tahun atau sekitar 176,5 mm per bulan. Terdapat rata-rata 180 hari hujan per tahun, atau sekitar 15 hari hujan per bulan. Suhu rata-rata pada tahun 2021 hingga 2023 adalah 28,52 °C, dengan suhu minimum 20,0 °C dan maksimum 34,0 °C. Kelembaban udara rata-rata adalah 84.41 %, dengan penyinaran matahari rata-rata 1.023 jam dan tekanan udara rata-rata 1.013,8 mbar. Data ini diperoleh dari Stasiun Meteorologi Klas III Dumatubun Tual, stasiun pengukuran cuaca terdekat dengan Kota Tual.

5. Hidrologi dan Oseanografi

Kondisi hidrologi Kota Tual secara umum ditandai oleh keberadaan dua danau air tawar utama, yaitu Danau Fanil dan Danau Ngadi. Kedua danau ini memegang peran vital dalam menyediakan sumber air bersih untuk penduduk setempat. Air dari danau-danau ini tidak hanya esensial untuk keperluan domestik masyarakat, tetapi juga mendukung kegiatan pertanian di wilayah tersebut, yang merupakan bagian penting dari ekonomi lokal.

Danau Fanil dan Danau Ngadi memiliki karakteristik hidrologi unik yang mempengaruhi ekosistem di sekitarnya. Misalnya, kualitas air, kedalaman, dan volume air dari danau-danau ini dapat berfluktuasi berdasarkan pola curah hujan musiman dan pengaruh aktivitas manusia. Keduanya memiliki biodiversitas yang kaya, termasuk berbagai spesies ikan air tawar yang tidak hanya mendukung kegiatan perikanan lokal tetapi juga menambah nilai ekologis dan estetika bagi danau. Selain sebagai sumber air dan kegiatan pertanian, kedua danau ini juga telah dikembangkan menjadi tujuan wisata. Pengembangan pariwisata di sekitar danau-danau ini melibatkan pembangunan fasilitas rekreasi yang memanfaatkan pemandangan alam yang indah dan suasana tenang di sekitar danau. Pengembangan ini juga memberikan peluang ekonomi tambahan bagi masyarakat setempat melalui peningkatan pariwisata.

Pengelolaan berkelanjutan dari sumber daya hidrologi ini penting untuk memastikan bahwa danau-danau tersebut dapat terus menyediakan air bersih bagi masyarakat dan mendukung kegiatan pertanian serta pariwisata. Hal ini mencakup inisiatif seperti pemantauan kualitas air, reboisasi daerah aliran sungai, dan program konservasi yang dirancang untuk melindungi danau dari polusi dan degradasi. Dengan demikian, Danau Fanil dan Danau Ngadi tidak hanya memainkan peran dalam memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan pembangunan ekonomi di Kota Tual.

Secara oseanografis, wilayah Kota Tual, yang mencakup Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Pulau Dullah Utara, Tayando Tam, dan Pulau-pulau Kur dan Kur Selatan, terletak di Gugus Kepulauan Kei Kecil, yang merupakan bagian dari Gugusan Kepulauan Kei (termasuk Pulau Kei Besar dan Kei Kecil). Wilayah ini dipengaruhi oleh kondisi perairan Laut Banda dan Laut Arafura. Fenomena gelombang di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi kecepatan angin yang bervariasi sesuai musim. Dominasi arah angin dari Selatan dan Tenggara

khususnya selama Mei hingga November (Musim Timur) mempengaruhi arah penyebaran gelombang. Gelombang biasanya bergerak sejajar dengan arah angin, kecuali pada kondisi pasang surut atau di daerah dangkalan di Kepulauan Kei Kecil, dimana dasar gelombang yang menyentuh dasar laut mengubah arah penjalarannya sesuai kontur dasar laut. Pada periode angin Tenggara dengan kecepatan antara 4 hingga 17 knot, gelombang di wilayah ini dapat mencapai ketinggian antara 1,2 hingga 2,4 meter, meski besarnya dimodifikasi oleh kedalaman perairan, terutama di daerah pasang surut atau dangkalan.

Arus di wilayah Kota Tual juga dipengaruhi oleh dua musim utama: musim timur (April hingga Oktober), yang dikenal sebagai musim kemarau dengan angin bertiup dari tenggara, dan musim barat (Oktober hingga April) yang merupakan musim penghujan. Arus mengalir ke timur selama musim barat dan ke barat selama musim timur. Pola arus regional menunjukkan bahwa selama musim barat, arus bergerak dari Barat Indonesia melalui celah antara Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Sulawesi menuju Timur ke Wilayah Kota Tual. Vektor arus yang dianalisis secara regional menunjukkan bahwa arus permukaan ke wilayah perairan Kota Tual berasal dari Timur dan Timur Laut selama enam bulan, dan dominan menuju Barat Daya selama tujuh bulan, dengan kecepatan yang menurun saat mencapai kepulauan ini. Pada bulan Februari, arus datang dari Barat Laut dengan kecepatan lebih tinggi. Penurunan suhu permukaan laut di wilayah perairan ini, terutama antara Juni hingga Oktober, berkorelasi dengan arus dari Timur dan Timur Laut, diduga akibat fenomena upwelling yang membawa unsur hara dari Laut Banda ke Perairan Kota Tual.

Pasang surut di perairan Kota Tual umumnya tergolong sebagai pasang campuran mirip harian ganda, tipikal untuk perairan di Maluku. Ciri khasnya adalah dua kali pasang dan dua kali surut setiap hari, dengan pasang pertama lebih besar dan terjadi di pagi hari. Tunggang air maksimum di wilayah ini umumnya lebih dari 2,5 meter. Dengan kondisi topografi yang landai di Kepulauan Kei Kecil, saat surut terendah, sebagian besar dataran pasang surut muncul di permukaan air. Pasang tertinggi terjadi pada bulan April dan Desember, sedangkan surut terendah terjadi pada bulan Oktober, mempengaruhi berbagai aktivitas seperti pemijahan cacing laor.

Batimetri wilayah Kota Tual di Kepulauan Kei terletak antara Laut Banda dan Laut Arafura. Wilayah ini berada di dataran dengan busur banda dalam di sebelah Barat dan Barat Laut serta Utara, dengan kedalaman rata-rata 3.000 meter dan Palung Banda yang mencapai kedalaman maksimum sekitar 7.400 meter (Weber Deep). Di Timur Laut hingga Tenggara, wilayah ini berbatasan dengan palung di antara Kepulauan Aru dan Kei dengan kedalaman maksimum 3.650 meter. Perairan sekitar Kepulauan Kei Kecil dan Kota Tual relatif lebih dangkal dibandingkan dengan perairan Kei Besar. Perairan di sekitar pulau-pulau ini memiliki variasi kedalaman yang signifikan, mempengaruhi dinamika perairan, kehidupan biota laut, keamanan pelayaran, geomorfologi pantai, serta penempatan infrastruktur pesisir seperti jetty atau sarana budidaya laut.

6. Penggunaan Lahan

Kawasan Kota Tual mencakup wilayah daratan dan perairan. Dalam wilayah daratan, terdapat kawasan terbangun yang mencakup pemukiman dan fasilitas umum. Di sisi lain, kawasan belum terbangun terdiri dari hutan, mangrove, semak belukar, dan rawa. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tual 2012-2032, penggunaan lahan didominasi oleh hutan dan terumbu karang, sementara penggunaan lahan untuk pemukiman dan fasilitas umum masih relatif terbatas.

Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Kota Tual 2023

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Belukar	6.779,729	28,97
2.	Danau	47,471	0,20
3.	Hutan Lahan Kering Sekunder	6.296,445	26,91
4.	Hutan Mangrove Primer	80,605	0,34
5.	Hutan Mangrove Sekunder	81,655	0,35
6.	Hutan Rawa Primer	75,882	0,32
7.	Pemukiman	709,605	3,03
8.	Pertanian L K Semak	1.933,685	8,26
9.	Pertanian Lahan Kering	3.677,107	15,71
10.	Savana / Padang Rumput	2.105,185	9,00
11.	Semak Belukar Rawa	72,848	0,31
12.	Tanah Terbuka	1.540,429	6,58
Luas Total		23.400,646	100,00

Sumber : RTRW Kota Tual 2012-2032, 2013.

Luasnya hutan di wilayah Kota Tual merupakan aspek penting dalam ekologi dan tata kelola lingkungan. Sebagian besar hutan di wilayah Kota Tual adalah hutan lindung yang berperan krusial dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan, regulasi tata air, pencegahan banjir, kontrol erosi, pencegahan intrusi air laut, serta pemeliharaan kelestarian dan kesuburan tanah, tidak hanya di dalam kawasan hutan itu sendiri tetapi juga area sekitarnya. Hutan lindung ini terutama terletak di Pulau Duroa dan sekitarnya di Kecamatan Dullah Utara, serta Kepulauan Tayando Tam. Mengingat potensi hutan yang signifikan, pengelolaan hutan lindung di Kota Tual harus berhati-hati terhadap eksploitasi hasil hutan dan pembukaan lahan oleh individu atau perusahaan. Konservasi hutan lindung menjadi penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah degradasi lingkungan.

Selain hutan lindung, Kota Tual juga memiliki hutan produksi yang berfungsi sebagai sumber produksi hasil hutan, termasuk hutan produksi biasa, terbatas, dan yang dapat dikonversi. Di sepanjang garis pantai, hutan mangrove tersebar secara sporadis, memainkan peran vital dalam perlindungan pantai, penyediaan habitat bagi kehidupan laut, dan sebagai penyerap karbon.

Pengelolaan hutan mangrove dan hutan produksi ini penting untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam dan kehidupan masyarakat setempat. Strategi pengelolaan hutan harus menggabungkan prinsip konservasi dengan pemanfaatan berkelanjutan untuk memastikan bahwa hutan dan sumber daya alam lainnya tetap lestari untuk generasi mendatang.

2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Kota Tual merupakan wilayah rawan bencana terutama bencana gempa bumi (tektonik), tsunami serta gelombang pasang dan angin topan akibat perubahan iklim. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022 yang diterbitkan BNPB, Kota Tual memiliki skor 168,00 yang masuk dalam kategori tinggi.

Berikut deskripsi bencana yang berpotensi terjadi di Kota Tual:

1. **Banjir rob** : Bencana banjir di Kota Tual memiliki skor 22.4, menunjukkan risiko tinggi. Letak Kota Tual di wilayah pesisir pantai, dapat menyebabkan terjadinya banjir rob. Banjir rob bisa saja terjadi akibat dari kombinasi beberapa faktor, yakni terjadinya

pasang maksimum air laut, gelombang tinggi, penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, jika terjadinya penambangan air tanah berlebihan, reklamasi pantai, dan terjadinya pembuangan sampah yang berlebihan.

2. **Gempa bumi (gempa tektonik):** Wilayah Kota Tual merupakan daerah dengan resiko gempa bumi. Bencana ini berpotensi menimbulkan kerusakan sarana & prasarana umum, bangunan penduduk maupun korban jiwa. Gempa bumi yang terjadi di Kota Tual umumnya merupakan gempa bumi dengan episentrum dangkal yang menunjukkan kemungkinan resiko kerusakan di permukaan.
3. **Tsunami :** Wilayah Kota Tual merupakan wilayah dengan resiko kejadian tsunami yang tinggi terutama Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam yang berada di sebelah barat Kota Tual. Beberapa wilayah yang memiliki resiko terhadap bencana tsunami antara lain adalah:
 - a. Daerah-daerah pesisir , terutama pesisir barat wilayah kecamatan Pulau-pulau Kur;
 - b. Wilayah pulau dengan morfologi landai dan ketinggian maksimum kurang dari 50 meter;
 - c. Wilayah pulau-pulau kecil seperti Pulau Bui, Tengah, Kaimear, Woning, Manggi, Fadol, dan pulau-pulau lain sekitarnya;
 - d. Wilayah pesisir pulau yang tidak memiliki karang penghalang (*coral reef*).
4. **Kekabaran Hutan :** Kebakaran hutan dapat terjadi akibat berbagai faktor utama, yaitu: kekeringan pada musim kemarau panjang, pembakaran lahan, kecerobohan seperti membuang puntung rokok sembarangan, konflik lahan atau perebutan wilayah antara masyarakat atau dengan perusahaan seringkali diwarnai dengan pembakaran hutan sebagai bentuk protes atau intimidasi, dan penebangan liar.
5. **Gelombang Ekstrim dan Abrasi :** Perubahan iklim membawa dampak yang besar bagi keadaan bumi dan mendatangkan bencana. Salah satu bencana alam akibat perubahan iklim adalah bencana gelombang pasang yang mengancam kawasan pesisir pantai & mengganggu transportasi antar pulau. Beberapa wilayah dengan resiko tinggi terhadap bencana gelombang pasang antara lain sebagai berikut:
 - a. Pesisir dengan hunian penduduk berjarak kurang dari 50 meter dari garis pasang laut rata-rata;
 - b. Pesisir dengan kemiringan pantai curam dan tidak memiliki karang penghalang;

- c. Wilayah-wilayah dengan akses komunikasi rendah seperti di Pulau Kur dan sekitarnya.
6. **Kekeringan** : terjadinya perubahan cuaca seperti pola cuaca global, *El Niño*, atau *La Niña*, membawa dampak yang besar bagi keadaan bumi dan mendatangkan bencana. Salah satu bencana alam akibat perubahan cuaca adalah Kekeringan. Bencana kekeringan diakibatkan dari berbagai faktor, seperti curah hujan rendah: variabilitas iklim, penggunaan air berlebihan, kerusakan daerah sumber air, pengelolaan air yang buruk dan sebagainya.

Tabel 2.4 Indeks Resiko Bencana Kota Tual 2022

Jenis Bencana	Skor	Kelas Resiko
Banjir Rob	22.40	Tinggi
Gempa Bumi	21.60	Tinggi
Tsunami	24,00	Tinggi
Kebakaran Hutan	24,00	Tinggi
Tanah Longsor	12,00	Sedang
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	36,00	Tinggi
Kekeringan	14.40	Tinggi
Cuaca Ekstrim	13.60	Tinggi
All Bencana	249,60	Tinggi

Sumber: Buku IRBI BNPB 2023

2.1.1.3. Potensi Sumbledaya Alam

Potensi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, dan perkebunan merupakan pilar utama dalam pembangunan daerah karena menyediakan sumber daya alam, lapangan kerja, serta pendapatan yang vital bagi perekonomian lokal. Sebagai contoh, sektor kelautan dan perikanan tidak hanya memberikan pasokan pangan yang penting, tetapi juga menciptakan mata pencaharian bagi komunitas pesisir. Sementara itu, sektor pariwisata mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan wisata, yang dapat digunakan untuk infrastruktur dan pelestarian lingkungan. Di sisi lain, pertanian dan perkebunan memberikan sumber bahan pangan dan komoditas ekspor yang mendukung kemandirian pangan dan perekonomian daerah. Dengan memanfaatkan potensi-potensi ini secara efisien, pembangunan daerah dapat diarahkan menuju keberlanjutan yang lebih baik.

1. Kelautan dan Perikanan

Kota Tual merupakan daerah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut yaitu sebesar kurang lebih 19.088 km² dari total luas wilayah sebesar kurang lebih 19.342,39 km². Kota Tual, sebagai kota yang terletak di kepulauan Maluku, memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan. Sebagai salah satu kota pesisir, sektor ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial kota.

Tabel 2.5. Potensi Sumberdaya Perikanan

Kecamatan	Biomassa Jenis Ikan (ton/tahun)		
	Pelagis	Demersal	Jumlah
PP. Kur	2.901,21	1.931,31	4.832,52
Kur Selatan	6.954,51	155,27	7.109,78
Tayando Tam	16.101,39	1.615,37	17.716,76
P. Dullah Utara	5.436,71	660,28	6.096,99
P. Dullah Seltan	421,78	94,97	516,75
TOTAL	31.815,60	4.457,20	36.272,80

Sumber: Dinas Perikanan, 2024.

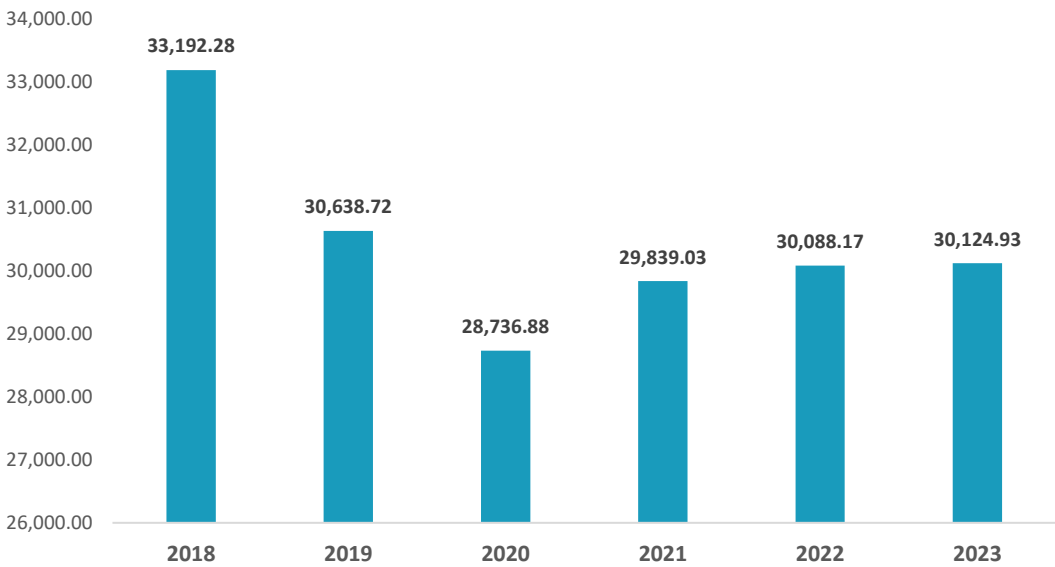
Pertama, sektor kelautan dan perikanan memberikan sumber daya pangan yang vital bagi penduduk lokal, baik dalam bentuk ikan maupun hasil laut lainnya. Kedua, industri perikanan seperti pengolahan ikan dan pembuatan produk turunannya dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Selain itu, sektor ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah melalui ekspor hasil perikanan.

Tabel 2.6 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kota Tual Tahun 2019 – 2023

Kecamatan	T a h u n				
	2019	2020	2021	2022	2023
PP. Kur	2.470,30	1.950,50	2.065,10	2.083,20	2.083,43
Kur Selatan	2.160,19	1.893,15	1.9670,70	1.975,47	1.978,89
Tayando Tam	3.141,89	2.939,40	3.017,77	3.093,27	3.102,48
P. Dullah Utara	10.376,40	9.964,29	10.262,95	10.325,13	10.333,60
P. Dullah Selatan	12.489,94	11.989,54	12.522,51	12.813,11	12.626,54
Total	30.638,72	28.739,88	29.8139,03	30.088,17	30.124,93

Sumber: Dinas Perikanan, 2024.

Produksi perikanan Kota Tual selama kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung agak menurun dan masih dibawah dari target produksi yang ditetapkan. Kecamatan P. Dullah Utara dan Pulau Dullah Selatan merupakan kecamatan-kecamatan yang memiliki produksi perikanan terbesar di Kota Tual.



Gambar 2.2.
Produksi Perikanan Kota Tual
Sumber: Dinas Perikanan Kota Tual, 2024.

Sebagai Kota Kepulauan, sesuai kondisi geografis dan karakteristik wilayahnya sangat cocok dikembangkan semua jenis usaha budidaya laut seperti budidaya ikan, rumput laut, mutiara, teripang, lola, lobster dan anadara, karena didukung dengan kondisi dasar perairan yang sesuai untuk dikembangkan semua jenis usaha budidaya. Luas lahan budidaya laut saat ini mencapai 5,548 Ha dimana potensi lahan tersebut terbagi untuk semua jenis kegiatan budidaya laut. Produksi budidaya perikanan Kota Tual untuk tahun 2024 sebesar 126.216 Ton Basah/Tahun. Sementara jumlah Rumah Tangga Pembudidaya aktif untuk tahun 2024 sebanyak 511 pembudidaya, yang mana tersebar pada 3 Kecamatan yaitu, Pulau Dullah Selatan sebanyak 41 pembudidaya, Pulau Dullah Utara sebanyak 111 pembudidaya, dan yang tertinggi di Kecamatan Tayando Tam sebanyak 359 pembudidaya.

Tabel 2.7. Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Komoditi Kota Tual Tahun 2023

Kecamatan	Komoditi	Produksi (Ton Basah)
PP. Kur	-	-
Kur Selatan	-	-

Tayando Tam	Rumput Laut	99.311,42
	Teripang	0,883
	Kerapu	0,742
	Mutiara	0,01
Pulau Dullah Utara	Rumput Laut	26.714,76
	Teripang	-
	Kerapu	26,49
	Mutiara	34,33
Pulau Dullah Selatan	Rumput Laut	119,04
	Teripang	7,94
	Kerapu	0,52
	Mutiara	-

Sumber: Dinas Perikanan, 2024.

Produksi perikanan budidaya di Kota Tual tahun 2024 didominasi oleh komoditas Rumput Laut dengan persentase produksi sebesar 98,7% atau sebesar 126.145,22 Ton Basah pada tiga kecamatan penghasil yaitu Tayando Tam, Dullah Utara dan Dullah Selatan, dengan estimasi nilai produksi perikanan budidaya Rumput Laut adalah sebesar 201,8 Milyar Rupiah.

2. Pertanian

Kota Tual memiliki karakteristik yang unik, karena wilayahnya bukan merupakan satu daratan namun beberapa wilayah administrasinya terdiri dari gugusan pulau. Oleh karena itu, sumberdaya alam baik laut dan darat masih menjadi tumpuan perekonomian masyarakat, dan sektor pertanian menjadi salah satunya. Sektor pertanian sendiri dapat memegang peran krusial dalam pembangunan daerah dengan mendukung aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi, pertanian menjadi tulang punggung perekonomian di banyak daerah, memberikan sumber penghidupan bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Selain itu, pertanian juga menyediakan pangan bagi penduduk lokal, meningkatkan ketahanan pangan, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dalam konteks sosial, sektor pertanian mendukung pembangunan infrastruktur, memberikan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat komunitas pedesaan. Di sisi lingkungan, praktik pertanian yang berkelanjutan dapat memelihara sumber daya alam, mencegah degradasi lingkungan, dan mendukung keberlanjutan ekologis di daerah tersebut. Dengan demikian, sektor pertanian memainkan peran yang integral dalam

mempromosikan pembangunan holistik dan berkelanjutan di tingkat lokal maupun regional.

Tabel 2.8 Produksi Tanaman Pangan di Kota Tual Tahun 2018 – 2023

KOMODITI	Produksi Per Tahun (ton)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Padi Ladang	1,13	1,7	2,15	9,2	4,76	2,27
Jagung	21,1	218,9	83,9	104,2	115,28	108,9
Ketela Pohon	107,6	76,6	33,9	1.780,1	1.425,26	1.070,3
Ketela Rambat	26,3	50,5	158,2	92,3	117,8	86,5
Kacang Tanah	0	1,3	3,7	3,5	6	1,6
Kacang Hijau	0,25	0	0	0,5	0	1,3
Talas	23,2	0	40,1	13	0	23,8
Umbi-Umbian	21,5	14,6	36,8	19,5	0	13,3
Lainnya						
TOTAL	201,08	363,6	358,75	2.022,3	1.669,1	1.307,97

Sumber: Dinas Pertanian Kota Tual, 2024.

Sub sektor tanaman pangan mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2018 total produksi hortikultura sebesar 201,08 ton meningkat menjadi 1.307,97 ton di tahun 2023.

Tabel 2.9 Produksi Hortikultura di Kota Tual Tahun 2018 – 2023

KOMODITI	Produksi per Tahun (ton)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bawang Merah	18,2	271	53,5	78,4	46,8	77,3
Daun Bawang	5,1	52	16,8	7,9	7,9	5,8
Kubis	24	222	16,7	13,0	0	0
Bunga Kol	0	0	12,9	6,9	0	0
Cabai Rawit	36,3	699	113	166	167,2	158,5
Cabai Besar	0	566	58,8	18,7	0	0
Cabai Keriting	0	0	0	64,5	17,8	16,9
Ketimun	67,9	1.072	84,4	141,6	166,2	131,4
Terong	91,8	1.017	160,8	13,6	142,8	92,2
Kacang-Kacangan	114,1	606	72,7	89,2	112,6	60,2
Sawi Petsai	33,3	677	74,5	141,4	166,4	139,5

KOMODITI	Produksi per Tahun (ton)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tomat	46,6	505	81	98,9	78,2	71,7
Buncis	60,2	749	59,6	44,8	35,9	34,1
Kangkung	71,6	826	86	111,2	147,9	143,6
Bayam	71,5	546	67	79,3	100,2	68,4
Total	640,6	7.808	957,7	1.075,4	1.189,9	999,6

Sumber: Dinas Pertanian Kota Tual, 2024.

Sementara produksi hortikultura dalam 6 tahun terakhir walaupun terjadi peningkatan namun mengalami fluktuasi. Jika di tahun 2018 produksi hortikultura sebesar 640,6 ton meningkat menjadi 999,6 ton di tahun 2023. Namun produksi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 7.808 ton.

Tabel 2.10 Produksi Perkebunan di Kota Tual Tahun 2018 – 2023

KOMODITI	Produksi Per Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kelapa	94,01	129,71	222,92	238,05	214,33	222,14
Kelapa Hibrida	0	9,3	56,00	58,91	57,10	50,7
Kopi	30,02	34,11	61,04	61,04	64,79	37,42
Cengkeh	15,55	16,66	30,07	21,52	31,36	16,76
Pala	50,93	55,95	57,27	58,73	59,41	21,07
Kenari	6,61	11,72	15,11	18,66	15,84	12,62
Pinang	0,45	0,59	1,01	1,01	1,51	1,36
TOTAL	197,57	258,04	443,42	457,92	444,34	362,07

Sumber Data: Dinas Pertanian Kota Tual, 2024.

Kelapa merupakan komoditas yang cukup dominan dilihat dari aspek produksi sub sektor perkebunan. Selama kurun waktu 6 tahun, rata-rata 51,62 ton produksi hasil perkebunan didominasi oleh komoditi kelapa. Produksi peternakan di Kota Tual mengalami fluktuasi produksi yang dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2019, produksi ternak di Kota Tual mencapai 364.357,88 ton dan mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2021 yakni sebesar 822.087,61 ton dan mengalami penurunan produksi pada 2023 sebesar 13.235, 152 ton.

Tabel 2. Produksi Ternak di Kota Tual Tahun 2019 - 2023

Komoditi	Produksi Per Tahun (ton)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sapi	32	31	19	13,04	12,04
Kambing	16	16	12,5	10,07	9,2
Babi	9	11	6,5	3,4	3,7
Ayam Buras - Telur	158.957	173.328	238.876	5.332	1791,9
Ayam Buras - Daging	0,83	1,03	1,33	1,14	1,49
Ayam Petelur	205.333	828	583.157	766.2	11410,832
Ayam Pedaging	9,6	18	15	5	5,4
Itik	0,45	0,53	0,28	0,38	0,59
Total	364357,88	174233,56	822087,61	5365,03	13235,152

Sumber: Dinas Pertanian, 2024.

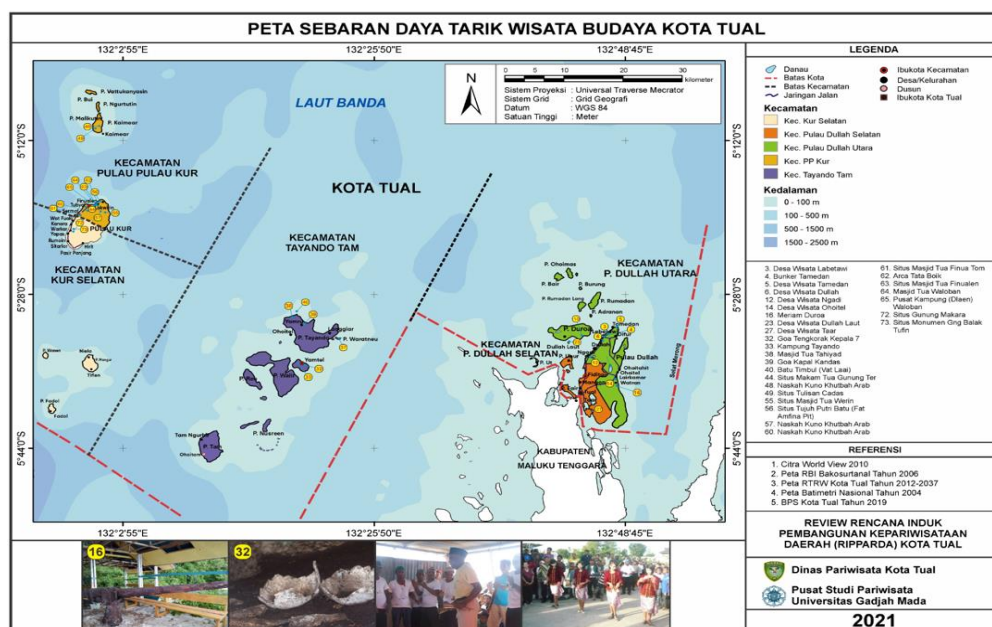
Tabel 2.10. Produksi Pertanian di Kota Tual Tahun 2019 – 2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi tanaman hortikultura (ton)	802,9	957,7	1.133,90	1.189,90	999,6
Produksi bahan pangan lokal (ton)	365	558,75	2.022,30	1.669,10	1.307,97
Produksi tanaman perkebunan (ton)	258,04	443,42	458,62	444,34	362,07
Produksi Ternak (ton)	-	1.179,80	960,5	889,36	12.680,73

Sumber: Dinas Pertanian Kota Tual, 2024.

3. Pariwisata

Sebagai daerah kepulauan, pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Tual khususnya wisata bahari dan ekosistem pulau-pulau kecil. Kota Tual mempunyai pantai pasir dan hamparan terumbu karang unik yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya, serta beberapa titik selam menarik yang terdapat di sekitar kepulauan Dullah. Potensi pariwisata dengan berbagai objek wisata tersebar yang terdapat di Kota Tual tersebar di 5 kecamatan. Pesona dan bentang alam Kota Tual yang belum terlalu terekspos menyediakan potensi pengembangan yang cukup besar bagi sektor pariwisata untuk berkontribusi secara positif untuk perekonomian daerah dan masyarakat.



Gambar 2.3.
Sebaran Daya Tarik wisata Kota Tual

Selain itu terdapat beberapa obyek wisata budaya seperti tradisi tarian Debus, Masjid Tua Tayando dan sebagainya. Obyek-obyek wisata ini perlu diperhatikan dan dikembangkan lagi sehingga dapat memberi nilai tambah pada sektor pariwisata di Kota Tual.

Tabel 2.11 Obyek Wisata di Kecamatan Pulau Dullah Utara

Wisata	Objek	Desa
Wisata Alam (Ekowisata)	Bunker Pantai Tamedan	Desa Tamedan
	Pantai Difur	Desa Labetawi
	Pantai Dullah	Desa Dullah
	Pantai Nam Indah	Desa Ohoitahit
	Danau Waren	Desa Ngadi
	Danau Fanil	Desa Ohoitel
	Pantai Duroa	Desa Dullah Laut
	Danau Tahit Ko	Desa Dullah Laut
	Pulau Adranan	Desa Dullah Laut
	Pulau Rumadan	Desa Dullah Laut
	Pulau Bair	Desa Dullah Laut
	Pulau Ohoimas	Desa Dullah Laut
Wisata Sejarah	Pulau Burung	
	Museum Belan	
	Meriam dan Benteng Pertahanan Duroa	

Wisata	Objek	Desa
Wisata Buatan	Kuliner Lupus/ Rahan Tahit	Desa Labetawi
	Kolam Renang Hito Hills	Desa Ngadi
Wisata Bahari	Wakat Park	Desa Ohoitahit

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Tual, 2024.

Tabel 2.12 Objek Wisata di Kecamatan Pulau Dullah Selatan

Wisata	Objek	Desa
Wisata Alam (Ekowisata)	Teluk Un	Desa Taar
	Fid Bangir	Desa Taar
	Pantai Tavidu	Desa Taar
	Pulau Ut	Desa Tual
	Pulau Kus	Desa Tual
Wisata Buatan	Taman Kota (alun-alun)	Kelurahan Lodar El
	Jembatan Gantung Fair	Desa Tual
	Taman Pantai Kiom	Desa Taar
	Tugu Spiritual Maren	Kelurahan Lodar El
Wisata Religi	Tugu Injil	Desa Taar
Wisata Budaya	Permainan Musik Tradisional Ekal	Desa Tual
	Tradisi Lomba Belan	Desa Tual
Wisata Sejarah	Ziarah Makam dan Rumah Tokoh Sentral Pemekaran Kota Tual	Desa Tual

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Tual, 2024.

Tabel 2.13 Objek Wisata di Kecamatan Tayando Tam

Wisata	Objek	Desa
Wisata Alam	Pulau Varat Neu	Tayando Yamtel
	Pulau Nusreen	Tayando Yamtel
	Pulau Ree	Tayando Yamtel
	Goa Tengkorak Kepala Tujuh	Tayando Yamtel
	Goa Batu Kapal	Tayando Yamtel
	Vat Laai (Batu Timbul)	Tayando Yamru
	Pulau Nunya	Tayando Yamtel
	Pulau Reyanat	Tayando Yamtel
	Pantai Heniar	Tayando Yamtel
	Pantai Kuber	Tayando Yamru

Wisata	Objek	Desa
Wisata Budaya	Tarian Tradisional Debus	Tayando Yamru
Wisata Religi	Masjid Tua dan Kuburan Tua	Tayando Yamru
Wisata Bahari	Met Vait (Meti Panjang)	Tayando Yamtel

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Tual, 2024.

Tabel 2.14 Objek Wisata di Kecamatan Pulau-Pulau Kur

Wisata	Objek	Desa
Wisata Alam	Pulau Kaimear	Pulau Kaimear
	Pantai Namaselap	Desa Tubyal
	Pulau Bui	Pulau Bui
	Pulau Tubur	Desa Lokwirin
	Pantai Werajo	Desa Lokwirin
	Pulau Tengah Ngurtutin	
	Vat Ampina Pit (Batu Perempuan Tujuh)	Desa Lokwirin
Wisata Sejarah	Meriam dan Benteng Pertahanan Kaimear	Pulau Kaimear
	Naskah Kuno (Manuskrip Arab Latin)	P.P. Kur
Wisata Budaya	Tradisi Butar (Mahkota)	P.P. Kur
	Tradisi Tarik Ikan Tradisional	Desa Kaimear dan Desa Lokwirin
Wisata Religi	Makam Tua Tanjung Keramat	Desa Finualen
	Hoer Findamar (Perahu Mini Malam Lailatul Qodar)	P.P. Kur

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Tual, 2024.

Tabel 2.15 Objek Wisata di Kecamatan Kur Selatan

Wisata	Objek	Desa
Wisata Alam	Pulau Mangur	Pulau Mangur
	Pulau Woning	Pulau Woning
	Danau Kewal Matin	Pulau Fadol
	Tebing Batu Hirit	Desa Pasir Panjang

	Telaga Werwari	Desa Hirit
	Pulau Mangur	Desa Tiflen/Niela

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Tual, 2024.

2.1.1.4. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dalam era yang menuntut keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup, Kota Tual memiliki tanggung jawab besar dalam merencanakan masa depan yang seimbang antara perkembangan ekonomi dan pelestarian alam. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan, salah satu instrumen utama yang menjadi pedoman adalah konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Daya Dukung Lingkungan Hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia, keanekaragaman hayati, dan ekosistem alami. Dalam konteks Kota Tual, hal ini mencakup pemahaman tentang ketersediaan sumber daya alam, kualitas air dan udara, serta berbagai faktor lingkungan lainnya yang memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan wilayah ini.

Di sisi lain, Daya Tampung Lingkungan Hidup menyoroti kemampuan lingkungan untuk menyerap dampak dari aktivitas manusia dan pertumbuhan wilayah tanpa mengalami kerusakan ekstensif. Konsep ini menempatkan fokus pada pemahaman tentang kapasitas lingkungan dalam mengatasi polusi, pembebasan limbah, dan menjaga kualitas ekosistem alaminya.

1. Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Jasa lingkungan penyediaan pangan menggambarkan tingkat kondisi ekosistem dalam memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya.

Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Jasa lingkungan penyediaan pangan di Kota Tual tentunya menggambarkan kondisi wilayah dalam mendukung layanan penyediaan pangan yang akan dipengaruhi oleh kondisi bentang lahan dan kondisi aktifitas pemanfaatan lahan.

Tabel 2.16 Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Kota Tual

Kecamatan	Distribusi Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan (Ha)					Grand Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Kur Selatan	-	-	2.813,06	-	-	2.813,06
Pulau Dullah Selatan	-	660,68	2.483,08	119,86	15,20	3.278,82
Pulau Dullah Utara	-	1.749,66	6.079,13	146,66	57,25	8.032,71
Pulau-Pulau Kur	-	15,49	1.669,05	-	-	1.684,54
Tayando Tam	1,91	294,36	6.072,55	316,59	-	6.685,42
Total	1,91	2.720,20	19.116,88	583,11	72,45	22.494,55

Sumber: KLHS RPJPD Kota Tual 2025-2045, hal. III-75.

Berdasarkan hasil olah data, jasa lingkungan penyediaan pangan di Kota Tual untuk wilayah dengan luas sangat besar dan berperan dominan dalam penyediaan pangan serta kawasan luas dengan kontribusi signifikan terhadap produksi pangan merupakan kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 655,56 Ha atau 2,71%. sementara kawasan dengan luasan menengah dan masih mendukung ketahanan pangan daerah merupakan kategori sedang sebesar 19.116,88 Ha atau 84,98% dan untuk kawasan dengan luas terbatas, namun tetap berfungsi menyediakan pangan serta luas sangat kecil dan dampaknya terhadap penyediaan pangan minimal termasuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 2.721,111 Ha atau 12,10% dari total luas wilayah Kota Tual.

2. Jasa Lingkungan Penyediaan Air

Air bersih merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga ketersediaannya menjadi penting. Ketersediaan recharge area di suatu daerah akan menjaga stabilitas pasokan air. Peran

ekosistem dalam penyediaan air bermakna manfaat yang diberikan untuk penyediaan air baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti bentang lahan.

Berdasarkan hasil olah data, jasa lingkungan penyediaan air di Kota Tual untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 56,32 Ha atau 0,24%. Kategori sedang sebesar 7.915,50 Ha atau 33,60% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 15.588,61 Ha atau 66,16% dari total luas wilayah Kota Tual.

Tabel 2.17 Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air Kota Tual

No	Kecamatan	Distribusi Jasa Lingkungan Penyediaan Air (Ha)					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kur Selatan	-	2.035,73	777,33	-	-	2.813,06
2	Pulau Dullah Selatan	-	1.959,42	1.319,41	-	-	3.278,82
3	Pulau Dullah Utara	182,22	4.155,23	3.648,17	-	47,08	8.032,71
4	Pulau-Pulau Kur	-	813,34	871,20	-	-	1.684,54
5	Tayando Tam	129,12	5.510,74	1.045,56	-	-	6.685,42
Grand Total		311,34	14.474,46	7.661,67	-	47,08	22.494,55

Sumber: KLHS RPJPD Kota Tual 2025-2045, Hal. III-76.

3. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Esensi dasar dari identifikasi daya dukung dan daya tampung adalah bahwa kemampuan ekosistem menyediakan jasa lingkungan hidup (*supply side*) adalah terbatas, sementara kebutuhan jasa lingkungan hidup (*demand side*) bisa tidak terbatas. Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Agar tidak mengganggu struktur, proses maupun fungsi ekosistem, maka pemanfaatan lingkungan hidup seharusnya tidak melebihi kemampuan tersebut. Jika aspek ketersediaan (*supply*) diperbandingkan dengan aspek kebutuhan (*demand*) akan dihasilkan apa yang disebut status daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Status daya dukung daya tampung dikatakan terlampaui apabila *supply* lebih kecil dari *demand*, demikian pula sebaliknya. Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, pangan dan udara dalam menyerap karbondioksida dan lain sebagainya.

Dalam kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Tual, terdapat beberapa penilaian yang diuraikan diantaranya kondisi status daya dukung penyediaan pangan dan air, daya dukung lahan yang dapat digambarkan dari kemampuan lahan serta kondisi daya tampung persampahan. Adapun kajiannya diuraikan sebagai berikut. Status daya dukung hanya dapat diketahui jika *supply side* dan *demand side* dari jasa lingkungan dapat dihitung, maka tidak semua jasa lingkungan sejauh ini dapat ditentukan statusnya. Saat ini metode penghitungan masih dalam pengembangan dan belum diperoleh suatu kesepakatan. Di Indonesia, penentuan status daya dukung baru dilakukan untuk status daya dukung daya tampung penyedia air dan penyedia pangan. Sementara untuk jasa lingkungan yang lainnya baru dapat dihitung kinerja (*supply side*) jasanya.

Status daya dukung lingkungan hidup di Kota Tual menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Informasi status daya dukung lingkungan dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan suatu wilayah agar tidak berdampak lingkungan. Hasil kajian terhadap status daya dukung lingkungan hidup di Kota Tual menggunakan pendekatan sistem grid melalui teknik pengolahan data spasial, sehingga untuk membandingkan data ketersediaan dan kebutuhan dilakukan dengan mengumpulkan data potensi berbasis spasial. Standar yang digunakan untuk menghitung kebutuhan pangan masyarakat adalah standar Angka Kecukupan Energi (AKE) yaitu 2.150/hari/kapita sedangkan untuk kebutuhan air menggunakan standar 800 m³/tahun/kapita dikalikan dengan faktor koreksi (2). Pada analisis status daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup Kota Tual yang dapat dihitung dan menjadi isu penting di Kota Tual adalah status daya dukung penyediaan air.

Perhitungan status daya dukung daya tampung penyediaan air dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan ketersediaan air dan kebutuhan air di Kota Tual. Perhitungan ketersediaan air dilakukan dengan mengidentifikasi potensi air permukaan di Kota Tual yang didasarkan kondisi penutupan lahan yang dapat digambarkan melalui koefisien limpasan yang dikalkulasi dengan curah hujan tahunan di Kota Tual.

Berdasarkan informasi diatas, terdapat beberapa wilayah yang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampuan alam menyediakan pelayanan dalam hal penyediaan air terhadap kebutuhan yang digambarkan dari besarnya konsumsi air yang dibutuhkan masyarakat dan lahan untuk pertanian, sawah dan perikanan di wilayah tersebut. Dimana secara keseluruhan wilayah yang terlampaui di Kota Tual sebesar 46% dari total wilayah Kota Tual. Meskipun masih ada setengah wilayah yang belum terlampaui akan tetapi nilai perbandingan ketersediaan air dan kebutuhan air di Kota Tual bahkan secara rinci diuraikan pada setiap pulau perlu diperhatikan. Karena jika dibandingkan antara ketersediaan yang hanya sebesar 156.437.780,12 m³/tahun dibandingkan kebutuhan yang sebesar 210.707.579,74 m³/tahun, memberikan gambaran bahwa daya dukung air di Kota Tual telah melampaui ambang batasnya.

Tabel 2.18 Status Daya Dukung Daya Tampung Penyediaan Air Kota Tual

No	Pulau	Luas (Ha)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Status D3TLH per Wilayah (Ha)	
					Belum Terlampaui	Terlampaui
1	Pulau Adranan	1.327,14	7.799.555,04	7.295.740,21	663,96	658,05
2	Pulau Bair	160,07	661.552,92	0	159,48	0
3	Pulau Bui	51,46	239.426,27	253.106,88	12,75	38,60
4	Pulau Dullah	10.063,37	68.039.167,96	138.333.301,73	2.726,77	6.671,11
5	Pulau Dullah Utara	2,53	20.345,58	0	2,52	0
6	Pulau Fadol	103,52	756.866,00	669.852,35	29,51	73,72
7	Pulau Fair	209,82	1.696.254,59	4.506.443,04	108,50	100,47
8	Pulau Heniar	322,78	2.568.978,48	3.197.258,85	81,94	239,75
9	Pulau Kaimear	332,39	2.375.506,48	2.516.475,68	51,09	280,58
10	Pulau Kalvik	139,70	1.045.990,36	14.400,00	136,52	0
11	Pulau Kanos	22,72	183.233,33	0	22,68	0
12	Pulau Kran	4,57	36.817,49	0	4,56	0

No	Pulau	Luas (Ha)	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Status D3TLH per Wilayah (Ha)	
					Belum Terlampaui	Terlampaui
13	Pulau Kur	4.240,09	23.351.452,85	18.229.959,52	1.820,97	1.860,33
14	Pulau Kus	5,90	47.479,79	0	5,88	0
15	Pulau Mangur	266,94	1.683.882,69	2.007.811,77	18,09	248,10
16	Pulau Mardoksanwa	4,57	36.785,82	0	4,55	0
17	Pulau Moanuhuyanat	9,31	74.940,92	0	9,27	0
18	Pulau Nuhu Akran	0,69	5.524,37	0	0,68	0
19	Pulau Nuhu Sau	0,22	503,19	0	0	0
20	Pulau Nunnya	27,81	223.999,67	0	27,72	0
21	Pulau Nusren	126,37	1.017.647,37	0	125,93	0
22	Pulau Ohoimas	134,75	571.121,74	20.800,00	134,25	0
23	Pulau Ree Laai	95,52	395.184,85	0	95,21	0
24	Pulau Reyanan	7,67	61.765,51	0	7,64	0
25	Pulau Ruen	1,18	2.710,30	0	1,17	0
26	Pulau Rumadan	339,35	1.953.956,07	0	338,05	0
27	Pulau Rumadan Laer	161,71	784.611,94	0	161,09	0
28	Pulau Sua	4,59	19.018,57	0	4,58	0
29	Pulau Tam	1.341,20	7.980.074,10	3.289.260,68	1.214,80	121,85
30	Pulau Tayando	2.800,54	17.474.963,37	13.138.733,63	1.347,71	1.335,57
31	Pulau Ubur	311,31	1.885.037,94	8.958.046,36	16,71	292,38
32	Pulau Ut	41,40	307.955,60	1.716.399,65	17,86	23,38
33	Pulau Vatleu Badmar	0,29	580,40	0	0	0
34	Pulau Vatleu Taranan	0,25	94,25	0	0	0
35	Pulau Walir	2.226,77	12.799.863,84	5.784.693,94	1.549,10	670,22
36	Pulau Waratner	0,56	4.516,25	0	0,56	0
37	Pulau Woning	47,83	330.414,21	775.295,46	0	47,70
Grand Total		24.936,88	156.437.780,12	210.707.579,74	10.902,62	12.655,81

Sumber: KLHS RPJPD Kota Tual Tahun 2025-2045, Hal. III-72-III-74.

2.1.1.5 Ketahanan Daerah

Sejak tahun 2016, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerapkan Indeks Penilaian Ketangguhan Daerah (IKD) sebagai metodologi untuk mengevaluasi kapasitas penanggulangan bencana di berbagai daerah. IKD ini terstruktur atas tujuh area prioritas dan enam belas tujuan aksi, yang dibagi menjadi 71 indikator pencapaian. Analisis fokus prioritas dalam IKD mengkaji kapasitas penanggulangan bencana daerah, meliputi (1) Penguatan kebijakan dan kelembagaan, (2) Analisis risiko dan perencanaan terintegrasi, (3) Pengembangan sistem informasi, pendidikan dan pelatihan, (4) Penanganan khusus untuk daerah rawan bencana, (5) Meningkatkan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, (6) Penguatan kesiapsiagaan dan respons darurat bencana, serta (7) Pengembangan sistem

pemulihan pasca bencana. Setiap indikator dikaji melalui empat pertanyaan kunci dengan tingkatan yang berbeda-beda, total menjadi 284 pertanyaan.

Tabel 2.19 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021

Kab/Kota	Nilai IKD Kab/Kota	Skor Kab/Kota	Nilai IKD Provinsi	Skor Provinsi	Indeks Kapasitas	Kelas
Maluku Tengah	0,28	0,23	0,21	0,18	0,210	Rendah
Maluku Tenggara	0,24	0,20	0,21	0,18	0,190	Rendah
Kepulauan Tanimbar	0,49	0,41	0,21	0,18	0,315	Rendah
Buru	0,20	0,17	0,21	0,18	0,170	Rendah
Seram Bagian Timur	0,21	0,18	0,21	0,18	0,175	Rendah
Seram Bagian Barat	0,22	0,18	0,21	0,18	0,180	Rendah
Kepulauan Aru	0,20	0,17	0,21	0,18	0,170	Rendah
Maluku Barat Daya	0,20	0,17	0,21	0,18	0,170	Rendah
Buru Selatan	0,32	0,27	0,21	0,18	0,230	Rendah
Kota Ambon	0,61	0,51	0,21	0,18	0,375	Rendah
Kota Tual	0,20	0,17	0,21	0,18	0,170	Rendah

Sumber: Penilaian IKD BNPB, 2021.

Berdasarkan evaluasi dari 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat analisis yang tersedia, akan diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan suatu daerah. Berdasar hasil penilaian dan pemetaan indeks ketahanan daerah Provinsi Maluku, Kota Tual memperoleh skor IKD sebesar 0,2 yang masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya, IKD Tahun 2022 dan 2023 belum dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional.

2.1.1.6. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan pendekatan holistik yang mengevaluasi dan menyajikan gambaran komprehensif tentang kondisi lingkungan hidup dalam ruang lingkup dan periode waktu tertentu. Alat ukur ini secara efektif menyediakan indikasi awal dan kesimpulan yang cepat mengenai status lingkungan, memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan informasi berbasis data. IKLH merupakan agregasi dari beberapa indeks khusus, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang masing-masing memberikan evaluasi terperinci terhadap aspek tertentu dari lingkungan.

Sesuai dengan data yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tual untuk periode 2023-2026, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Tual mencapai skor 42. Skor ini mencerminkan evaluasi kuantitatif atas kondisi lingkungan saat ini di Kota Tual, dan berfungsi sebagai barometer penting dalam pengambilan keputusan serta penentuan arah kebijakan lingkungan kedepannya. Skor ini juga dapat menjadi dasar untuk analisis tren lingkungan, serta menjadi fondasi dalam perencanaan strategi dan intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Tual.

2.1.1.7. Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan komponen integral dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*), yang berperan signifikan dalam analisis dan evaluasi ketahanan pangan dan nutrisi di berbagai wilayah. IKP tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan serta program pangan dan gizi yang dilaksanakan, tetapi juga berkontribusi dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus dan intervensi yang lebih terarah.

Melalui penerapan IKP, dapat dilakukan evaluasi komprehensif terhadap capaian ketahanan pangan di wilayah tertentu, yang mencakup aspek ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Indeks ini memungkinkan pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pangan lokal, serta menetapkan prioritas dalam alokasi sumber daya dan pengembangan strategi. IKP memberikan gambaran peringkat atau ranking pencapaian ketahanan pangan di berbagai wilayah, yang berfungsi sebagai indikator penting dalam pengukuran kemajuan dan perbandingan kinerja antar wilayah. Hal ini mendorong penciptaan lingkungan kompetitif yang sehat di antara wilayah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas intervensi ketahanan pangan. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Nasional 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional, skor Indeks Ketahanan Pangan Kota Tual sebesar 54,91 dan masuk kedalam 4 kota yang memiliki skor IKP rendah.

2.1.2. Demografi

Dalam konteks perencanaan dan pengembangan Kota Tual, pemahaman mendalam tentang karakteristik demografis penduduk menjadi sangat penting. Analisis demografi menyelidiki berbagai dimensi penting dari populasi, termasuk distribusi penduduk dan dinamika pertumbuhannya. Kondisi demografi ini sangat relevan untuk memahami bagaimana komposisi penduduk berdampak pada kebutuhan dan kebijakan kota di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga layanan sosial. Pengetahuan ini penting untuk memastikan bahwa strategi pembangunan yang diadopsi oleh Kota Tual selaras dengan kebutuhan dan karakteristik unik penduduknya, membantu merencanakan masa depan yang berkelanjutan.

2.1.2.1. Distribusi Penduduk

Total populasi Kota Tual pada tahun 2023 sebanyak 90.007 jiwa. Analisis distribusi demografis berbasis kecamatan mengungkapkan bahwa Kecamatan Pulau Dullah Selatan menduduki posisi tertinggi dalam hal jumlah penduduk dengan total 50.842 orang, diikuti oleh Kecamatan Pulau Dullah Utara yang berpenduduk sejumlah 24.371 orang. Kecamatan Tayando Tam memiliki populasi sebanyak 7.987 orang, sementara Kecamatan Kur Selatan dan Kecamatan Kur memiliki populasi masing-masing sebanyak 3.942 orang dan 2.869 orang. Distribusi penduduk ini akan dielaborasi lebih rinci dalam tabel berikut.

Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Kota Tual kurun waktu Tahun 2018-2023 (jiwa)

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
Pulau Dullah Utara	23.281	23.433	23.869	24.178	24.371
Pulau Dullah Selatan	51.071	51.421	50.918	50.987	50.842
Tayando Tam	7.745	7.486	7.875	7.829	7.987
Pulau-pulau Kur	2.861	2.615	2.819	2.849	2.865
Kur Selatan	3.677	3.325	3.663	3.889	3.942
Kota Tual	88.655	88.999	89.144	89.732	90.007

Sumber: Kota Tual Dalam Angka, 2024.

2.1.2.2. Komposisi Penduduk

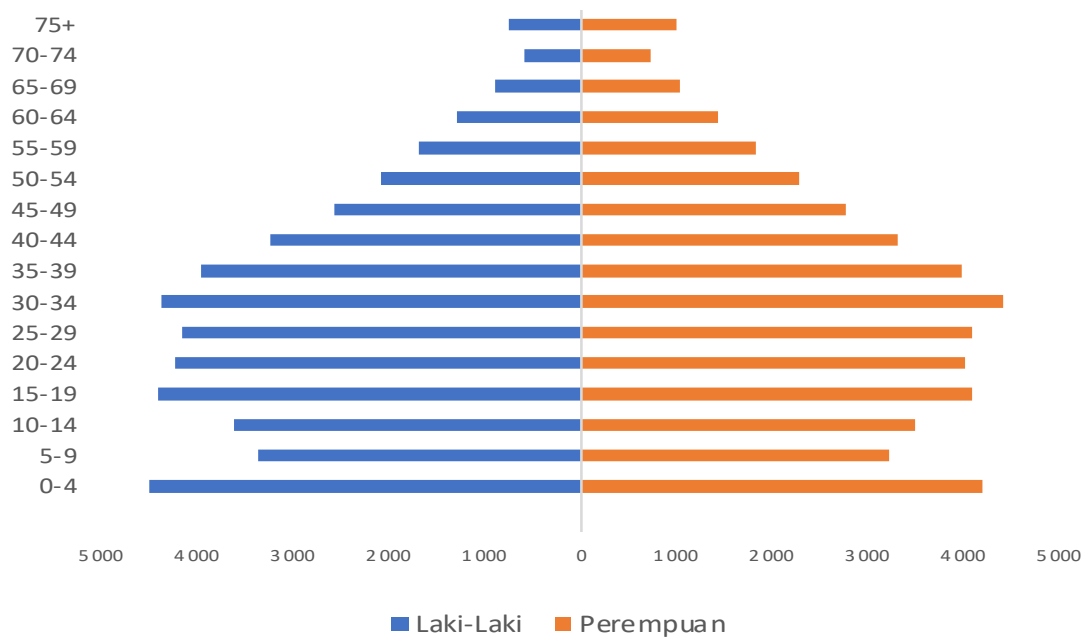
Rasio jenis kelamin, sebagai parameter demografis, merefleksikan proporsi numerik antara individu laki-laki dan perempuan dalam populasi suatu wilayah pada interval waktu tertentu, dinyatakan sebagai jumlah individu laki-laki per seratus individu perempuan. Sebuah nilai rasio di atas 100 menandakan predominansi jumlah laki-laki atas perempuan, sedangkan nilai di bawah 100 menunjukkan kebalikannya, yaitu dominasi jumlah perempuan. Rasio yang tepat 100 mengindikasikan paritas gender dalam hal jumlah. Indikator ini krusial dalam konteks perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan gender, memfasilitasi alokasi dan akses sumber daya yang adil antara kedua jenis kelamin.

Tabel 2.21 Rasio Jenis Kelamin Kota Tual Tahun 2023

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
Pulau Dullah Utara	12.113	12.258	98,82
Pulau Dullah Selatan	25.321	25.521	99,22
Tayando Tam	3.945	4.042	97,60
Pulau-Pulau Kur	1.405	1.460	96,23
Kur Selatan	1.998	1.944	102,78
Kota Tual	44.782	45.225	99.43

Sumber: Kota Tual Dalam Angka, 2024.

Pada tahun 2023, rasio jenis kelamin di Kota Tual tercatat sebesar 99.43, yang secara demografis menunjukkan bahwa populasi perempuan sedikit lebih besar daripada populasi laki-laki. Terdapat 44.782 individu perempuan dan 45.225 individu laki-laki dalam populasi tersebut. Dalam konteks rasio jenis kelamin berdasarkan kecamatan, Kecamatan Kur Selatan mencatat rasio tertinggi sebesar 102.78, mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki (1.998 jiwa) melebihi jumlah penduduk perempuan (1.944 jiwa). Sebaliknya, rasio jenis kelamin terendah tercatat di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, dengan nilai 96,23, di mana populasi laki-laki berjumlah 1.405 jiwa dan populasi perempuan 1.460 jiwa. Data ini memberikan gambaran berharga untuk analisis dan perencanaan yang berbasis pada kesetaraan gender di berbagai kecamatan di Kota Tual.



Gambar 2.4
Piramida Penduduk
Kota Tual 2023

2.1.2.3. Pertumbuhan Penduduk

Variasi dalam jumlah penduduk umumnya dikondisikan oleh faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan populasi, yang didefinisikan sebagai perubahan relatif jumlah penduduk selama periode tertentu, merupakan indikator penting dalam analisis demografis. Dalam konteks Kota Tual, pertumbuhan penduduk diukur dengan membandingkan data populasi dari periode lima tahun antara 2019 dan 2023. Selama periode ini, Kota Tual secara konsisten mengalami peningkatan populasi, yang menunjukkan dinamika pertumbuhan penduduk yang terus menerus dalam rentang waktu tersebut. Analisis ini penting untuk memahami tren demografis dalam rangka perencanaan sumber daya, infrastruktur, dan layanan publik yang efisien dan efektif.

Tabel 2.22 Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun Tahun 2019-2023

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	Laju Pertumbuhan (%)
Pulau Dullah Utara	22.281	23.433	23.869	24.178	24.371	1,15
Pulau Dullah Selatan	51.091	51.421	50.918	50.983	50.842	-0,12
Tayando Tam	7.745	7.486	7.875	7.829	7.987	0,82

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	Laju Pertumbuhan (%)
Pulau-Pulau Kur	2.861	2.615	2.819	2.849	2.865	0,21
Kur Selatan	3.677	3.325	3.663	3.889	3.942	2,03
Kota Tual	88.655	88.280	89.144	89.732	90.007	0,82

Sumber: Kota Tual Dalam Angka 2020,2021,2022, 2023, 2024.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pertumbuhan penduduk didefinisikan sebagai indikator yang merepresentasikan rasio kenaikan jumlah penduduk setiap tahun terhadap jumlah penduduk pada awal periode, yang diekspresikan dalam persentase. Analisis data yang diambil dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk di seluruh kecamatan di Kota Tual selama periode 2019-2023 adalah positif, menandakan adanya peningkatan populasi. Secara spesifik, Kecamatan Kur Selatan mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi sebesar 2,03 persen dalam lima tahun terakhir, dengan populasi meningkat dari 3.677 orang pada tahun 2019 menjadi 3.942 orang pada tahun 2023. Sementara itu, Kecamatan Dullah Selatan mengalami tingkat pertumbuhan terendah yakni -0,12 persen, dengan jumlah penduduk bertambah dari 51.091 orang pada tahun 2019 menjadi 50.842 orang pada tahun 2023.

2.1.2.4. Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2023, Kota Tual mencatat peningkatan kepadatan penduduk menjadi 354 individu per kilometer persegi, naik dari 348 individu per kilometer persegi pada tahun 2019. Kepadatan populasi tertinggi teridentifikasi di Kecamatan Pulau Dullah Selatan dengan angka sebesar 1.248 individu per kilometer persegi. Sementara itu, Kecamatan Tayando Tam memiliki kepadatan penduduk terendah di kota tersebut, yaitu 137 individu per kilometer persegi.

Tabel 2.23 Kepadatan Penduduk Kota Tual Tahun 2019-2023

Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pulau Dullah Utara	91.57	254	259	263	263	288
Pulau Dullah Selatan	40.75	1,253	1,254	1,249	1,251	1.248
Tayando Tam	73.74	105	106	106	106	108

Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pulau-Pulau Kur	19.61	146	142	142	143	146
Kur Selatan	28.72	128	126	127	131	137
Kota Tual	254.39	348	350	351	352	354

Sumber: BPS-Kota Tual Dalam Angka 2020,2021, 2022, 2023, 2024.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tual, aspek kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah komponen integral yang mendapat perhatian utama. Pembangunan kota yang berkesinambungan dan inklusif tidak dapat dilepaskan dari upaya peningkatan kualitas hidup warganya, yang terdiri dari penjaminan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, penyediaan pendidikan berkualitas, ketersediaan perumahan yang layak, kesempatan pekerjaan yang merata, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Penyusunan RPJPD Kota Tual mengedepankan aspek kesejahteraan ini sebagai fondasi dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Dokumen ini menyediakan analisis menyeluruh mengenai kondisi kesejahteraan warga Kota Tual saat ini, yang diharapkan menjadi pijakan yang kuat dalam perencanaan strategis untuk masa depan. Dengan menganalisa informasi ini, pemerintah daerah mampu mengidentifikasi gap dan kebutuhan yang ada, serta merumuskan strategi yang tepat guna mengatasi tantangan yang dihadapi.

Selain itu, pemetaan komprehensif terhadap aspek kesejahteraan memungkinkan pemerintah Kota Tual untuk menggali potensi dan peluang yang ada. Ini termasuk mengakui dan mengintegrasikan keberagaman sosial dan budaya sebagai kekuatan dalam merancang kebijakan yang inklusif. Dengan demikian, RPJPD Kota Tual bukan hanya menjadi sebuah dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen yang memandu transformasi sosial-ekonomi secara holistik, dengan tujuan akhir menciptakan Tual yang lebih sejahtera bagi seluruh warganya.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tual untuk periode 2025-2045, karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi ditinjau

melalui berbagai indikator, yang mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi secara komprehensif. Indikator-indikator utama yang digunakan adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Gini Rasio, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

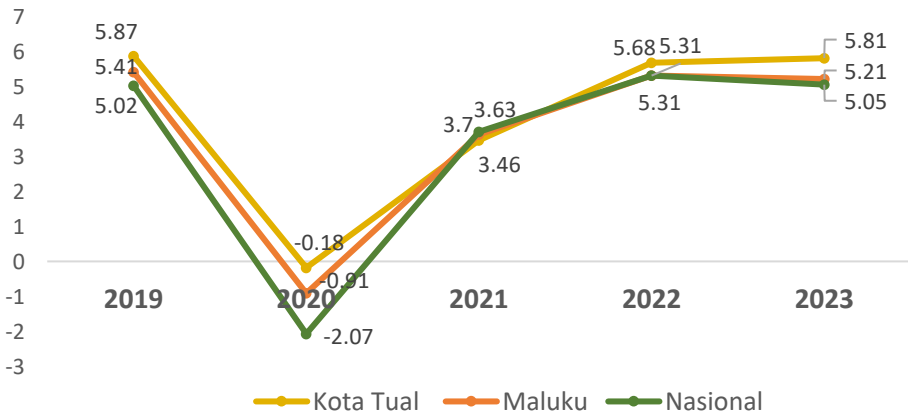
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator penting yang mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Tual. LPE yang tinggi menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa, yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. LPE dijadikan sebagai tolak ukur efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi lokal dan menjadi indikator kunci untuk menilai kemajuan ekonomi daerah tersebut.

Tabel 2.24 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tual, Maluku dan Nasional

	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Tual	5,87	-0,18	3,46	5,65	5,85
Maluku	5,41	-0,91	3,63	5,31	5,21
Nasional	5,02	-2,07	3,7	5,31	5,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024, 2025.

Grafik pertumbuhan ekonomi Kota Tual menggambarkan sebuah lintasan fluktuatif dengan tendensi umum pertumbuhan positif dari tahun 2019 hingga 2023, diikuti oleh penurunan signifikan pada tahun 2020. Dinamika ekonomi terlihat mengalami pertumbuhan yang positif sejak berakhirnya *pandemic Covid-19* tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sampai dengan 2023 yang mencapai 5,85%.

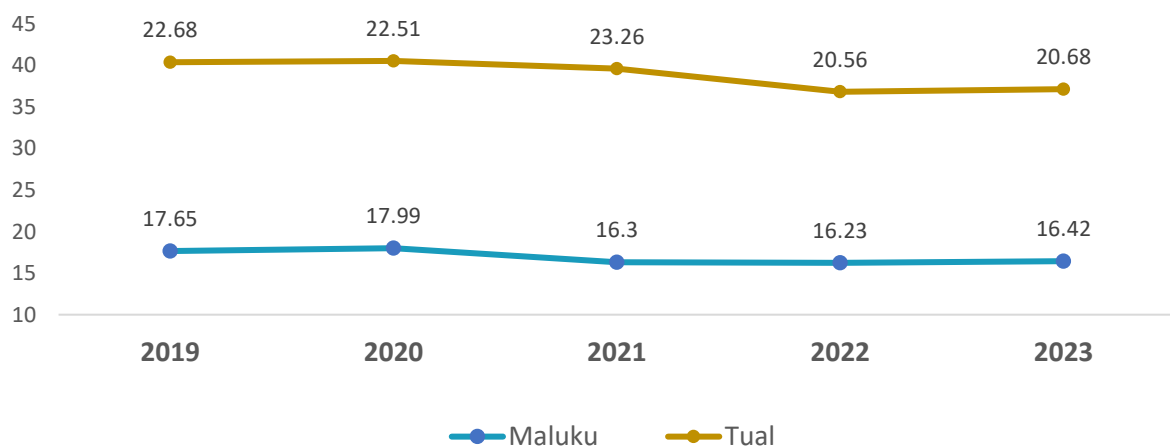


Gambar 2.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tual, Maluku dan Nasional Tahun 2019 - 2023

2.2.1.2 Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kota Tual mengukur persentase penduduk yang penghasilannya di bawah garis kemiskinan. Penurunan angka ini merupakan indikator penting dalam RPJPD, menggambarkan peningkatan akses penduduk terhadap kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup. Upaya mengurangi angka kemiskinan meliputi program-program yang menargetkan peningkatan pendapatan dan penurunan ketimpangan.

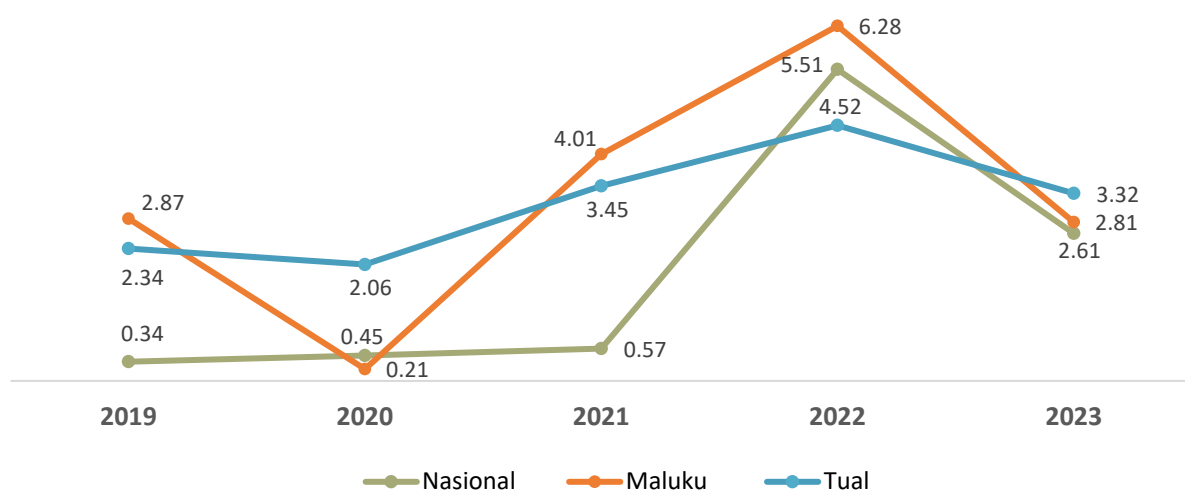
Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Tual selama periode 2019 hingga 2023 walaupun mengalami penurunan namun terjadi fluktuasi. Jika tahun 2019 tingkat kemiskinan Kota Tual sebesar 22,68% mengalami penurunan di Tahun 2023 menjadi 20,68%. Penurunan ini mencerminkan potensi efektivitas strategi penanggulangan kemiskinan yang telah diimplementasikan. Namun, fluktuasi yang terjadi antara tahun-tahun tertentu menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan, yang memerlukan analisis mendalam terhadap variabel-variabel ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berinteraksi.



Gambar 2.6
Tingkat Kemiskinan Kota Tual Tahun 2019 - 2023

2.2.1.3 Inflasi

Tingkat inflasi memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan daerah karena mempengaruhi daya beli masyarakat, harga-harga barang dan jasa, serta stabilitas ekonomi lokal. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, memperumit perencanaan pembangunan jangka panjang, serta mengurangi investasi. Sebaliknya, inflasi yang rendah dapat menciptakan stabilitas harga, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemantauan dan pengelolaan



Gambar 2.7

Tingkat Inflasi Kota Tual Tahun 2019 - 2023

inflasi yang efektif penting untuk memastikan pembangunan daerah yang stabil dan berkelanjutan.

Kota Tual mengalami kenaikan tingkat inflasi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, walaupun menurun di tahun 2023 yakni sebesar 3,32%, namun angka ini masih lebih tinggi dari tingkat inflasi Kota Tual di tahun 2019.

2.2.1.4 Indeks Gini

Mengetahui Gini Ratio atau Indeks Gini sangatlah penting dalam konteks pembangunan daerah karena menggambarkan tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu wilayah. Gini Ratio yang tinggi menandakan adanya kesenjangan ekonomi yang besar di antara penduduk, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial, ketidakadilan, dan kesulitan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

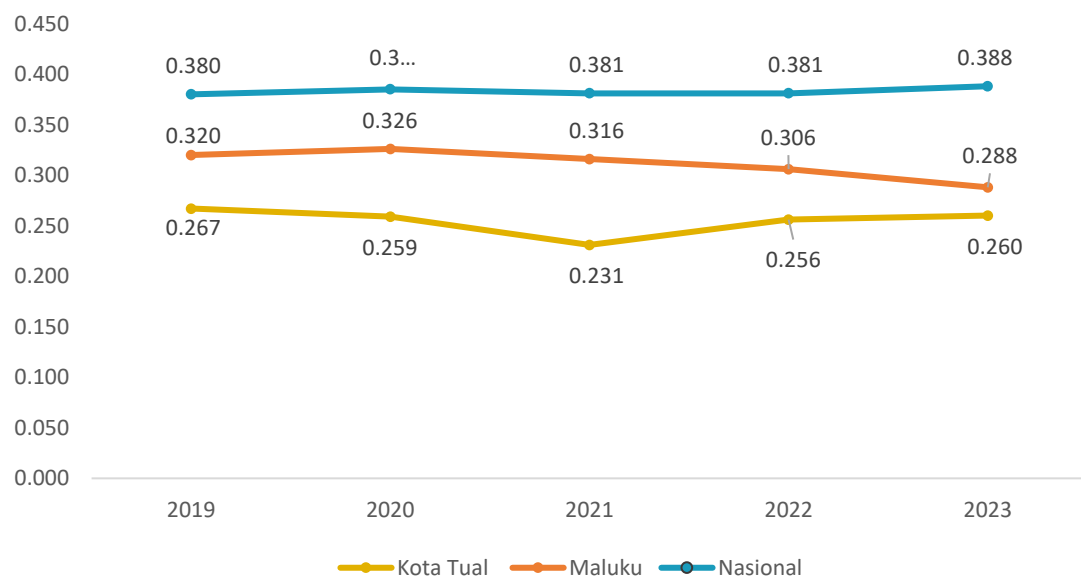
Tabel 2.25 Gini Ratio Kota Tual, Maluku dan Nasional Tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Tual	0,267	0,259	0,231	0,256	0,260
Maluku	0,320	0,326	0,316	0,306	0,288
Nasional	0,380	0,385	0,381	0,381	0,388

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Dengan memantau Indeks Gini, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat merancang program-program redistribusi pendapatan yang tepat sasaran, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi kelompok rentan, serta memperkuat inklusi sosial dan ekonomi untuk mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Dibandingkan dengan Provinsi Maluku dan Nasional, Indeks Gini Kota Tual jauh lebih kecil. Hal ini berarti tingkat kesenjangan antar wilayah yang ada di Kota Tual kecil dibandingkan dengan kondisi untuk Provinsi Maluku dan Nasional.



Gambar 2.8
Gini Ratio Kota Tual, Maluku dan Nasional Tahun 2019 - 2023

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Mengetahui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pentingnya sendiri dalam konteks pembangunan daerah karena TPT tidak hanya mencerminkan kesehatan ekonomi suatu wilayah, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan kemampuan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Tingginya TPT dapat mengindikasikan rendahnya kesempatan kerja dan keterbatasan ekonomi masyarakat, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal serta

meningkatkan risiko ketidakstabilan sosial. Dengan memantau TPT, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mengarahkan sumber daya dan program-program kebijakan yang tepat untuk mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan peluang kerja, dan memperkuat fondasi ekonomi daerah secara keseluruhan.

Tabel 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tual, Maluku dan Nasional

	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Tual	10,91	9,29	8,70	9,07	8,98
Maluku	6,69	7,57	6,93	6,88	6,31
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2020–2025.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Dalam kerangka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tual, aspek Kesejahteraan Sosial Budaya merupakan salah satu pilar fundamental dalam mewujudkan visi pembangunan. Kesejahteraan sosial budaya tidak hanya merefleksikan kondisi ekonomi, namun juga meliputi kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Penilaian atas aspek ini dilakukan dengan mengadopsi sejumlah indikator yang memadukan elemen pembangunan manusia, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan gender, dan pemajuan kebudayaan.

Indikator-indikator tersebut mencakup Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda, dan Indeks Pembangunan Kebudayaan, yang seluruhnya berperan sebagai instrumen pengukuran yang mendetail dan spesifik sesuai dengan konteks regional Kota Tual. Kesejahteraan sosial budaya di Kota Tual diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik, kesetaraan gender yang lebih berkeadilan, serta pelestarian budaya yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah alat pengukuran yang penting bagi pembangunan daerah karena memberikan gambaran komprehensif tentang kesejahteraan

manusia di suatu wilayah, tidak hanya berdasarkan pendapatan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang memadai. Dengan menggabungkan indikator-indikator tersebut, IPM memungkinkan pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah serta mengidentifikasi area-area di mana upaya perbaikan lebih diperlukan, sehingga memungkinkan adanya intervensi yang tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.27 IPM Kota Tual, Maluku dan Nasional Tahun 2019 – 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Tual	67,74	67,96	68,16	70,85	71,67
Maluku	69,45	71,34	71,55	72,04	72,75
Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024.

Selain itu, dengan pengukuran IPM ini, setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah :

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk);
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan
3. IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kota Tual mengalami kenaikan yang konstan yaitu pada tahun 2019 sebesar 67,74 dan pada tahun 2023 menjadi 71,67. Secara umum nilai IPM Kota Tual masih dibawah Maluku dan Nasional.

2.2.2.2 Indeks Perlindungan Anak

Menginjakkan kaki menuju era Indonesia Emas 2045, bangsa ini dihadapkan pada fenomena demografi yang menjanjikan, di mana puncak populasi usia produktif diperkirakan akan tercapai. Fenomena ini, yang dikenal sebagai bonus demografi, menjanjikan potensi peningkatan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang signifikan. Dengan kualitas SDM yang unggul, Indonesia berkesempatan meraih status sebagai

kekuatan ekonomi yang dominan di kancah global. Namun, bonus demografi dapat menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan bijak, berisiko menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang buruk, pengangguran, dan peningkatan kriminalitas.

Mengingat pentingnya perlindungan hak anak dalam mencapai tujuan nasional tersebut, maka pengukuran kinerja perlindungan anak menjadi esensial. Sub bab ini akan mengulas tentang Indeks Perlindungan Anak (IPA), sebuah instrumen yang dirancang untuk mengevaluasi dan memonitor sejauh mana anak-anak di Indonesia terlindungi dan berhak atas kesempatan tumbuh kembang yang layak. Indeks ini tidak hanya mengukur intervensi yang dilakukan tetapi juga mengidentifikasi ruang-ruang yang membutuhkan peningkatan dalam rangka menjamin setiap anak di Indonesia dapat berkembang sesuai potensi mereka, aman dari ancaman dan tantangan yang dapat menghambat perkembangan mereka. Narasi ini akan menjabarkan lebih jauh tentang parameter-parameter IPA dan implikasinya terhadap pembangunan SDM di Indonesia.

Tabel 2.28 Indeks Perlindungan Anak

Kabupaten/Kota	Indeks D1	Indeks D2	Indeks D3	Indeks D4	Indeks D5
	Hak Sipil dan Kebebasan	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Perlindungan Khusus
Kota Tual	49,19	46,78	62,71	29,15	63,84
Provinsi Maluku	44,34	67,24	64,72	34,50	72,38

Sumber: Publikasi Indeks Perlindungan Anak 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024.

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu metrik yang dirancang untuk mengukur kemampuan dasar dalam pembangunan manusia dengan memfokuskan pada aspek ketimpangan gender, mirip dalam konsep dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun menggunakan indikator yang sama dengan IPM, yang mencakup harapan hidup, harapan pendidikan, dan distribusi pendapatan, IPG secara spesifik bertujuan untuk

menyoroti perbedaan antara laki-laki dan perempuan. IPG menjadi alat penting untuk mengidentifikasi dan memahami kesenjangan dalam pembangunan manusia berdasarkan gender.

Pencapaian kesetaraan gender diindikasikan ketika nilai IPM dan IPG berada pada level yang sama. Variabel yang digunakan dalam menghitung IPG berasal dari sumber data seperti Sakernas, SUPAS, dan Sensus Penduduk. Skala nilai IPG berada dalam rentang 0 hingga 100 persen, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku, IPG Kota Tual mengalami kenaikan dari 88,46 pada tahun 2022, meningkat menjadi 88,56 pada tahun 2023.

2.2.2.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebuah indikator ilmiah yang dirancang untuk memberikan penilaian komprehensif terhadap tingkat keadilan dan kesetaraan gender, khususnya dalam konteks partisipasi politik dan ekonomi. IDG memungkinkan para peneliti dan pembuat kebijakan untuk mengukur dan menganalisis sejauh mana laki-laki dan perempuan memiliki akses yang setara dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan politik.

Dalam penggunaannya, IDG mengintegrasikan berbagai variabel yang dapat mencerminkan partisipasi dan pengaruh perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, tingkat kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi, kesetaraan dalam peluang kerja, serta representasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Pengukuran IDG dilakukan dengan menggali data empiris dan statistik yang relevan, termasuk analisis terhadap struktur pekerjaan, pendapatan, serta tingkat partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan proses legislatif. Indikator ini menekankan pada pentingnya kesetaraan gender sebagai elemen kunci dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks Kota Tual, berdasar data BPS Provinsi Maluku, nilai IDG berada pada skor 58,83 pada tahun 2022, mengalami penurunan menjadi 58,53 pada tahun 2023. Penurunan

ini menunjukkan adanya sedikit perubahan dalam aspek kesetaraan gender, yang dapat mencakup partisipasi perempuan dalam tenaga kerja, representasi politik, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta tingkat diskriminasi gender dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

2.2.2.5 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen komprehensif yang dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Alat ukur ini mencakup lima domain dasar: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Setiap domain ini memberikan perspektif penting dalam menilai sejauh mana kebijakan dan program pembangunan pemuda telah berhasil diimplementasikan dan mencapai tujuannya.

Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan target Nilai IPP Indonesia sebesar 57,67 pada tahun 2024. Berdasarkan data Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Tual menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022, IPP Kota Tual berada pada angka 54,34 dan meningkat menjadi 56,01 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan pemuda, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi serta kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi. Perubahan nilai IPP ini merupakan indikator positif atas efektivitas kebijakan dan inisiatif pemberdayaan pemuda di Kota Tual.

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dirancang sebagai alat pengukuran yang esensial untuk mengilustrasikan kemajuan dalam sektor kebudayaan. Alat ukur ini berperan sebagai dasar penting dalam pembentukan kebijakan kebudayaan dan menjadi titik acuan strategis dalam koordinasi antar-sektor terkait pemajuan kebudayaan. Dalam pengembangannya, IPK disusun melalui kolaborasi antara berbagai stakeholder kebijakan dan analisis data yang mendalam mengenai aspek-aspek pembangunan kebudayaan nasional.

Dalam konteks Kota Tual, berdasarkan data yang diambil dari dokumen RPD Kota Tual 2023-2026, skor Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2022 sebesar 55,3 dan mengalami kenaikan kecil menjadi sebesar 55,5 pada tahun 2023.

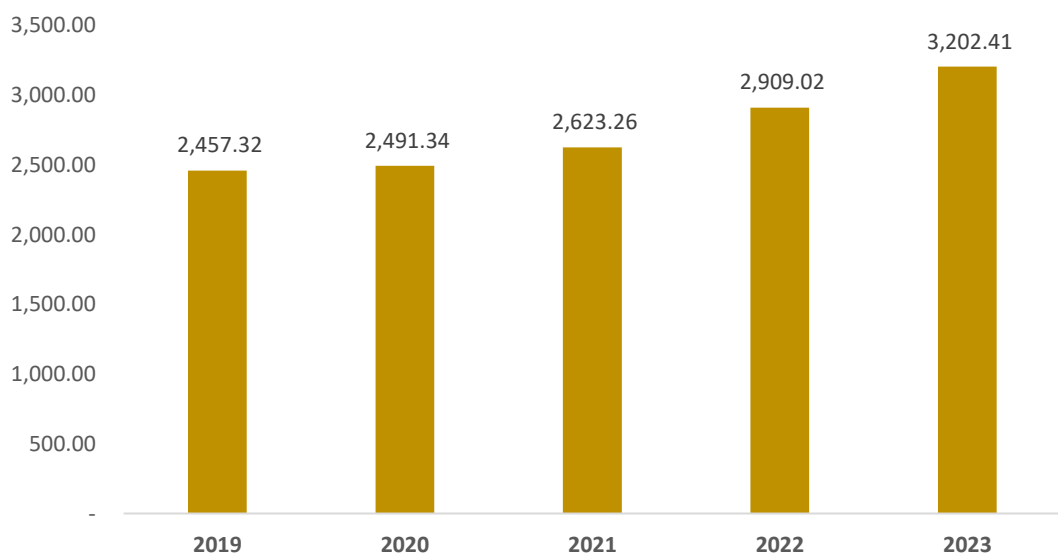
2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pentingnya dalam pembangunan daerah karena menjadi indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah. PDRB tidak hanya mencerminkan besarnya output ekonomi, tetapi juga memberikan gambaran tentang kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan dan perkembangan daerah tersebut. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku sebagai contoh menjadi sangat penting untuk dihitung karena mencerminkan nilai riil dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah tersebut, tanpa memperhitungkan perubahan harga dari waktu ke waktu.

Selama periode 2019 – 2023, perkembangan PDRB Kota Tual mengalami peningkatan yang konstan. Jika di tahun 2019 PDRB Kota Tual sebesar 2.457,32 milyar mengalami peningkatan sebesar 30,32% pada tahun 2023 yakni sebesar 3.202,41 milyar.



Gambar 2.9

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tual Tahun 2019–2023 (milyar Rp)

Sumber: Kota Tual Dalam Angka 2024

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan motor penggerak ekonomi Kota Tual, dimana merupakan sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar sejak tahun 2019 (37,13%) sampai dengan tahun 2023 (39,57%). Sementara Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib diurutan kedua dengan kontribusi sebesar 18,24% pada tahun 2019 dan 16,70% di tahun 2023.

Dengan menggunakan PDRB harga berlaku, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mengukur pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya dan mengidentifikasi sektor-sektor yang berkontribusi paling besar terhadap output ekonomi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam alokasi sumber daya, perencanaan pembangunan, dan implementasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat daerah.

Tabel 2.29 Struktur Ekonomi Kota Tual Menurut Lapangan Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37,13	37,81	37,58	38,59	39,59
B	Pertambangan dan Penggalian	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40
C	Industri Pengolahan	1,57	1,54	1,49	1,53	1,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35
F	Konstruksi	8,88	8,84	8,92	8,60	8,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,29	12,91	13,11	13,24	13,36
H	Transportasi dan Pergudangan	3,11	2,82	2,87	3,00	3,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,99	0,93	0,91	0,87	0,86
J	Informasi dan Komunikasi	1,70	1,72	1,73	1,69	1,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,08	2,04	2,06	1,99	1,91
L	Real Estate	0,39	0,39	0,39	0,36	0,35
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,28	0,28	0,28	0,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18,24	18,29	18,20	17,77	16,82
P	Jasa Pendidikan	6,77	6,76	6,75	6,50	6,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,51	3,65	3,71	3,62	3,68
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,20	1,17	1,15	1,13	1,12
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS-Kota Tual Dalam Angka 2024.

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita Kota Tual merupakan indikator ekonomi yang mengukur total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh Kota Tual dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduknya. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata output ekonomi yang dihasilkan per orang di Kota Tual. PDRB Per Kapita digunakan sebagai salah satu tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah.

Dengan mengetahui PDRB Per Kapita, dapat diukur seberapa besar kontribusi ekonomi rata-rata yang dihasilkan setiap individu, yang membantu dalam analisis kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. Indikator ini juga penting untuk memahami distribusi kekayaan dan tingkat kehidupan masyarakat di Kota Tual, serta sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.30 PDRB Per Kapita Kota Tual Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB Atas Harga Konstan (juta rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)
2019	20.338,42	33.296,08
2020	17.114,62	28.458,16
2021	17.162,92	29.047,23
2022	17.588,68	31.101,62
2023	18.944,28	34.971,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tual, 2024.

Pada tahun 2019, PDRB Per Kapita di Kota Tual Atas Harga Konstan tercatat sebesar Rp 20.338,42 juta dan mengalami penurunan menjadi Rp 17.114,62 juta di tahun 2020, dan kemudian mengalami peningkatan di tahun 2021, 2022 dan 2023. Fluktuasi ini, terutama penurunan pada tahun 2020, sebagian besar dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi di hampir semua sektor usaha kecuali di sektor Jasa Kesehatan, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Keuangan. Pemulihan ekonomi yang berlangsung pada tahun 2020 membawa peningkatan pada PDRB Per Kapita Kota Tual hingga tahun 2023.

2.3.1.3 Rasio Kewiraswastaan

Di tengah upaya nasional Indonesia untuk meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 12 persen guna mencapai status negara maju pada 2045, Kota Tual memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sebagai sebuah wilayah yang strategis, Kota Tual berpotensi besar untuk mengembangkan kewirausahaan yang bersandar pada pemanfaatan jasa secara berkelanjutan dan inovatif. Saat ini, secara nasional rasio kewirausahaan masih berada pada angka 3,47%, masih sangat jauh dari target nasional.

2.3.1.4 Indeks Ekonomi Inklusif

Ekonomi inklusif memainkan peran penting dalam pembangunan jangka panjang karena mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi, ekonomi inklusif mengurangi ketimpangan, meningkatkan stabilitas sosial, dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam ekonomi. Ini membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan investasi berkelanjutan, yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi jangka panjang yang sehat dan stabil. Ekonomi inklusif juga menekankan pada pembangunan kapasitas dan pemberdayaan komunitas lokal, yang merupakan kunci untuk pembangunan berkelanjutan.

Indeks yang bersumber dari www.inklusif.bappenas.go.id ini merupakan metrik yang dirancang untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah telah memberikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, sampai saat ini belum tersedia data Indeks Ekonomi Inklusif Kota Tual.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) diakui sebagai salah satu faktor penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Indeks-indikator yang dijadikan acuan meliputi Indeks Pendidikan, Indeks Literasi/Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Literasi Digital, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Angka Ketergantungan. Kondisi SDM di Kota Tual, yang tercermin dari indikator-indikator tersebut, menunjukkan tingkat pendidikan, kemampuan literasi dan numerasi, serta kemampuan literasi digital yang terus meningkat.

Partisipasi angkatan kerja yang aktif dan angka ketergantungan yang terkendali menjadi indikasi potensi SDM dalam mendukung perekonomian daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan keterampilan digital menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi Kota Tual.

2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan di Kota Tual menunjukkan tren positif selama periode 2020-2022, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tual. Indeks ini merupakan ukuran penting yang menggambarkan kualitas dan akses pendidikan di suatu wilayah. Menggunakan dua komponen utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indeks ini menawarkan gambaran menyeluruh tentang status pendidikan di Kota Tual.

Cara menghitung indeks ini dimulai dengan menilai IHLS, yang merupakan perbandingan antara harapan lama sekolah di suatu daerah dengan standar maksimum pendidikan formal yang umumnya ditetapkan sebesar 18 tahun. Ini mengukur jumlah tahun pendidikan yang diharapkan bisa dijalani oleh anak-anak yang sedang dalam usia sekolah.

Selanjutnya, IRLS dihitung dengan membandingkan rata-rata lama sekolah yang telah diterima oleh populasi usia 25 tahun ke atas dengan standar yang sama, yaitu 18 tahun. Ini merefleksikan durasi pendidikan yang secara rata-rata telah diterima oleh warga dewasa. Dengan menggabungkan kedua indeks ini, didapatkan gambaran komprehensif mengenai status pendidikan di suatu wilayah, yang tidak hanya melihat ke depan ke harapan masa depan tetapi juga menilai kondisi saat ini berdasarkan pengalaman pendidikan masa lalu.

Indeks Pendidikan secara keseluruhan kemudian dihitung dengan mengambil rata-rata geometris dari IHLS dan IRLS. Ini dilakukan dengan mengalikan kedua nilai indeks dan mengambil akar kuadrat dari hasil perkalian tersebut. Dengan cara ini, Indeks Pendidikan memberikan nilai yang mencerminkan kombinasi dari aspirasi pendidikan masa depan dan realitas pendidikan masa lalu, memberikan pandangan yang seimbang dan mendalam tentang kualitas dan akses pendidikan dalam suatu populasi.

Tabel 2.31. Indeks Pendidikan Kota Tual Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah	13,90	13,97	13,98	13,99	14,01
Rata-rata Lama Sekolah	10,26	10,52	10,53	10,70	10,66
Indeks Pendidikan	0,727	0,738	0,738	0,745	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Tren positif dalam Indeks Pendidikan tersebut menandakan adanya komitmen dan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah kota dan pemangku kepentingan pendidikan untuk meningkatkan standar pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Ini adalah indikator penting yang menggambarkan upaya Kota Tual dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata, yang berpotensi membawa dampak jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan ekonomi daerah.

2.3.2.2 Angka Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasar data Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022, IPLM Kota Tual mencatatkan skor diangka 74,32 dengan faktor penentu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.32. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023

No	Unsur (UPLM)	Skor
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,5084
2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan (IPLM2)	0,02017
3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,4831
4	Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)	0,0918
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	0,7362
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	1,0000
7	Jumlah Pemustaka (UPLM7)	1,0000

No	Unsur (UPLM)	Skor
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,45 (Rendah)

Sumber: Laporan Akhir Kajian Indeks Literasi Masyarakat Perpusnas RI, 2023.

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator kunci dalam menganalisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan suatu wilayah atau negara. Indikator ini mengukur sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk pekerjaan formal, pekerjaan informal, atau mencari pekerjaan baru.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Kota Tual terus naik tiap tahunnya.

Pada tahun 2022, terdapat 33.002 orang dalam angkatan kerja dengan jumlah usia kerja yang lebih tinggi, yakni 55.740 orang. Dari angkatan kerja tersebut, 30.009 orang telah mendapatkan pekerjaan sementara 2.993 orang belum bekerja, menghasilkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 59,21%. Di tahun 2023, jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 38.464 orang dan jumlah usia kerja juga naik menjadi 69.333 orang. Jumlah yang bekerja bertambah menjadi 35.010 orang, sementara yang menganggur menjadi 3.454 orang, sehingga TPAK menurun menjadi 55,48%.

Tabel 2.33 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tual

Tahun	Angkatan Kerja	Usia Kerja	Bekerja	Menganggur	TPAK
2018	30.356	50.741	27.165	3.191	59,83%
2019	30.011	51.976	27.345	2.666	57,74%
2020	33.034	53.247	30.160	2.874	62,04%
2021	33.024	54.482	30.148	2.876	60,61%
2022	33.002	55.740	30.009	2.993	59,21%
2023	38.464	69.333	35.010	3.454	55,48%

Sumber: BPS-Kota Tual Dalam Angka, 2019-2024.

2.3.2.4 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah sebuah parameter demografis yang memperbandingkan proporsi penduduk yang tidak produktif (yang mencakup individu berusia 0-14 tahun dan yang berusia lebih dari 65 tahun) dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia yang produktif (usia 15-64 tahun). Penghitungan rasio ketergantungan melibatkan pengambilan jumlah total penduduk yang tidak produktif, dibagi dengan jumlah penduduk yang produktif, dan kemudian dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase.

Tabel 2.34 Rasio Ketergantungan Kota Tual 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan
Penduduk berusia < 15 tahun	18.148	22.082	22.084	21.921	22.418	0,054
Penduduk berusia > 64 tahun	1.510	2.279	2.902	5.325	4.967	0,014
Penduduk 15-64 tahun	61.328	62.215	62.025	62.705	64.187	0,011
Rasio Ketergantungan	0.32	0.39	0.40	0,43	0,43	0,074

Sumber: BPS-Inkesra, 2024.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1 Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur merupakan salah satu indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Kota atau *City Development Index* (CDI) yang digunakan untuk mengukur kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas dasar. Fasilitas dasar yang menyusun Indeks Infrastruktur adalah akses air bersih, akses sanitasi, akses listrik, dan akses telepon. Indeks infrastruktur yang semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat pembangunan disuatu kota semakin baik.

Kota Tual memiliki panjang jalan 272,258 km, dengan kondisi baik sepanjang 174,03 Km atau 63,92% dari panjang jalan. Prioritas pembangunan infrastruktur didukung dengan kebijakan Walikota Tual untuk pembangunan Infrastuktur dan penataan wajah kota. Per bulan Juli 2023 kendaraan bermotor berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Tual tercatat 3.576 kendaraan atau 0,23% rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Tual.

Infrastruktur lainnya berupa peningkatan akses air bersih, pada tahun 2023 persentase rumah tangga berakses air minum layak sebesar 8.928 rumah tangga atau 49,60%. Sementara penggunaan tenaga listrik tahun 2023 berjumlah 51.930 rumah tangga atau 93,6% dari 57.941 rumah tangga se Kota Tual Secara lebih lengkap data Indeks Infrastruktur untuk Kota Tual belum tersedia.

Pengelolaan sampah di Kota Tual masih merupakan tantangan tersendiri dalam mengatasi permasalahan sampah, dimana produksi sampah 45 ton/hari atau 16.425 ton/tahun. Kontribusi terbesar produksi sampah di Kota Tual adalah rumah tangga (38,4%) diikuti oleh pasar tradisional (27,7%) dan perniagaan (14,4%). Fasilitas yang dimiliki Kota Tual dalam pengelolaan sampah 15 unit armada pengangkut sampah, namun yang berfungsi hanya 60% (9 unit), 44 TPS yang tersebar, 3 TPS3R dan 1 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dengan karakteristik unik sebagai kota yang memiliki wilayah kepulauan, penanganan sampah di Kota Tual memiliki tantangan tersendiri.

Tabel 2.35 Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah

No.	SARANA/PRASARANA	JUMLAH (unit)	KETERANGAN
1	Armada Pengangkut Sampah		
	a. Arm Roll	2	Baik/beroperasi
	b. Dump Truck	10	6 unit baik, 4 unit rusak berat
	c. Kendaraan Roda 3	3	1 Baik, 2 Rusak
2	Alat Berat		
	a. Eskavator	1	Rusak
	b. Buldoser	1	Baik/beroperasi
3	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	44	Baik dan sementara digunakan
4	Tempat Pengelolaan Sampah (Reuse, Reduce, Recycle) TPS3R	3	1 unit telah beroperasi, 2 unit belum beroperasi
5	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)	1	Sementara difungsikan dengan sistem open dumping

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tual, 2024.

2.3.3.2 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Indeks ini

disusun berdasarkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur yang memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, iklim investasi memegang peranan penting dalam menarik dan mempertahankan investasi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Kota Tual, dalam menatap arah pertumbuhan ekonominya yang dinamis, telah mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa iklim investasi yang ada tidak hanya kondusif tetapi juga kompetitif di tingkat regional maupun nasional. Berikut ini akan diuraikan mengenai berbagai aspek yang menjadi indikator penting dalam penilaian dan peningkatan iklim investasi di Kota Tual.

2.3.4.1 Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi, sebagai salah satu indikator, mencerminkan kondisi politik dan kebebasan yang ada di suatu daerah. Provinsi Maluku, termasuk Kota Tual, menunjukkan peningkatan signifikan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2022, dengan menempati skor 75,26 secara nasional, mengalami peningkatan tahun 2021 sebesar 66,76. Ini menandakan adanya lingkungan demokratis yang kondusif, yang merupakan faktor penting dalam menarik investasi. Lingkungan politik yang stabil dan demokratis mendorong transparansi dan kepastian hukum, dua faktor kunci yang sering dicari oleh investor.

Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia saat ini baru dilakukan pada level nasional dan provinsi, belum sampai level kabupaten/kota. Walaupun belum sampai level kabupaten/kota, nilai indeks di wilayah provinsi bisa digunakan untuk menggambarkan situasi di daerah yang lebih rendah.

2.3.4.2 Indeks Keamanan dan Ketertiban

Indeks ketentraman dan keamanan memainkan peran strategis dalam menentukan daya saing iklim investasi sebuah kota atau daerah. Ketentraman dan keamanan yang tinggi sering kali diindikasikan oleh rendahnya tingkat kriminalitas, stabilitas sosial-politik, dan efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor ini secara langsung mempengaruhi persepsi dan keputusan investor untuk menanamkan modalnya.

Kota atau daerah yang mampu menunjukkan tingkat ketentraman dan keamanan yang tinggi cenderung lebih menarik bagi investor, sebab risiko terkait gangguan operasional bisnis, kerugian akibat kriminalitas, dan ketidakpastian hukum bisa diminimalisir. Dengan demikian, investasi yang dilakukan lebih terlindungi dan prospek keuntungannya lebih terjamin. Dalam lingkungan yang aman dan tertib, transaksi ekonomi dapat berjalan lancar, tenaga kerja menjadi lebih produktif, dan biaya-biaya tidak terduga terkait dengan keamanan dapat ditekan.

Sebaliknya, daerah dengan indeks ketentraman dan keamanan yang rendah mungkin akan berjuang lebih keras untuk menarik investasi asing dan domestik. Investor akan lebih cenderung menghindari wilayah dengan risiko tinggi terhadap aset dan sumber daya manusianya, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap potensi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Berdasarkan data indikator kinerja program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Kota Tual tahun 2022 mencapai 70% dan meningkat menjadi 75% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan capaian yang signifikan dari kondisi keamanan di Kota Tual.

2.3.4.3 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama memiliki relevansi substansial dalam menjaga daya saing iklim investasi. Tingkat kerukunan yang tinggi mengindikasikan adanya toleransi dan harmoni sosial, yang merupakan fondasi bagi stabilitas yang diinginkan oleh investor. Hal ini memungkinkan lingkungan bisnis yang dapat diprediksi, menurunkan risiko konflik yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Selain itu, reputasi positif yang ditimbulkan oleh kerukunan beragama berkontribusi pada citra daerah yang terbuka dan inklusif, menarik minat investasi.

Kerukunan beragama juga berperan dalam menciptakan tenaga kerja yang harmonis, memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang beragam. Ini memfasilitasi pemasaran produk yang efektif dan inklusif serta memperkuat kerja sama dan kemitraan antarperusahaan dengan latar belakang yang berbeda, mendorong inovasi. Dari perspektif pengembangan sumber daya manusia, daerah yang rukun antarumat beragama menjadi tujuan yang menarik bagi institusi pendidikan dan pelatihan, yang mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja.

Investor yang mempertimbangkan komitmen jangka panjang akan menghargai kepastian yang ditawarkan oleh kerukunan beragama, yang menjanjikan stabilitas masa depan. Risiko hukum yang lebih rendah terkait isu diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia juga menjadi pertimbangan penting bagi investor yang sadar risiko. Pada tingkat global, persepsi positif tentang daerah yang memiliki kerukunan beragama yang tinggi dapat meningkatkan citra internasional dan menarik investasi asing langsung yang lebih besar.

Dengan demikian, indeks ini tidak hanya vital untuk kohesi sosial tetapi juga sebagai elemen penting yang menunjang iklim investasi dan daya saing ekonomi suatu daerah. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Povinsi Maluku termasuk Kota Tual tahun 2023 memiliki skor sebesar 77,46 menurut <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/halaman/dashboard-indeks-kub>, dan masuk dalam kategori tinggi.

2.3.4.4 Indeks Daya Saing Daerah

Pengukuran indeks daya saing daerah dituangkan dalam empat komponen dasar daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Keempat komponen ini terdiri 12 pilar daya saing. Setiap capaian untuk setiap pilar sangat mempengaruhi hasil akhir untuk setiap komponen dan mempengaruhi hasil akhir Indeks Daya Saing Daerah.

Tabel 2.36 Indeks Daya Saing Daerah Kota Tual 2022 - 2023

KOMPONEN	PILAR	2022	2023
Lingkungan Pendukung	Institusi	-	-
	Infrastruktur	3,13	1,83
	Adopsi TIK	2,46	3,85
	Stabilitas Ekonomi Makro	1,68	2,85
Sumber Daya Manusia	Kesehatan	3,54	3,55
	Tenaga Kerja	3,55	3,44
Pasar	Pasar Produk	3,37	2,70
	Pasar Tenaga Kerja	3,49	3,62
	Sistem Keuangan	0,54	-
	Ukuran Pasar	0,1	3,30
Ekosistem Inovasi	Dinamika Bisnis	5,0	2,66
	Kapabilitas Inovasi	0,76	0,91
SKOR IDSD		-	-

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2022-2023.

Perkembangan Indeks Daya Saing Kota Tual tahun 2022 - 2023 tidak dapat menunjukkan hasil, karena ada beberapa pilar yang tidak ada nilainya sehingga mempengaruhi hasil akhir. Pilar institusi untuk komponen lingkungan pendukung 2 tahun berturut-turut tidak memiliki nilai, begitu juga untuk pilar sistem keuangan pada komponen pasar di tahun 2023. Indeks Daya Saing Daerah Kota Tual di tahun 2023 menunjukkan capaian yang rendah dibandingkan IDSD nasional maupun provinsi jika dilihat berdasarkan capaian setiap pilar.

Tabel 2.37 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2023

	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NASIONAL	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,23	3,03	3,44
MALUKU	4,13	2,53	2,87	3,12	3,46	4,06	5,00	4,11	2,19	3,81	2,77	2,67	3,39
Kepulauan Tanimbar	-	1,81	2,81	3,41	3,36	3,44	1,30	3,46	1,40	3,35	1,56	2,23	-
Maluku Tenggara	4,07	1,22	3,45	3,24	3,49	3,42	3,03	3,53	1,57	3,42	2,58	2,71	2,98
Maluku Tengah	3,98	2,32	3,16	2,81	3,59	3,60	1,70	3,74	0,95	3,90	2,22	1,34	2,78
Buru	-	1,97	3,10	3,44	3,59	3,58	2,43	4,43	0,40	3,31	2,27	1,68	-
Kepulauan Aru	3,60	1,85	2,53	3,39	3,32	3,21	1,52	3,68	0,20	3,48	2,03	0,66	2,46
Seram Bagian Barat	-	2,14	2,69	3,42	3,24	3,40	3,24	3,84	0,28	3,42	1,90	1,94	-
Seram Bagian Timur	-	1,70	2,49	3,41	3,07	3,05	2,41	3,33	0,29	3,40	2,66	0,61	-
Maluku Barat Daya	-	1,72	2,66	3,96	3,30	2,97	2,57	3,13	-	3,14	2,09	1,45	-
Buru Selatan	-	1,97	2,36	3,82	3,59	3,41	3,41	3,43	0,22	3,07	1,85	1,11	-
Ambon	3,82	2,43	4,96	2,50	3,92	4,28	5,00	4,07	2,05	4,15	2,05	3,33	3,55
Tual	-	1,83	3,85	2,85	3,55	3,44	2,70	3,62	-	3,30	2,66	0,91	-

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023, BRIN 2024

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan salah satu aspek kritis dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, menentukan kualitas interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tual, aspek pelayanan umum mendapatkan perhatian khusus sebagai indikator kemajuan tata kelola dan administrasi pemerintahan.

2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Tual. Data IRB, yang disediakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), memainkan peran kunci dalam pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Namun, untuk tahun 2022, terdapat sebuah kekosongan data terkait IRB di Kota Tual. Ketiadaan data ini bukan hanya menimbulkan

tantangan dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kota Tual, tetapi juga membuka peluang untuk introspeksi dan perbaikan sistematis dalam tata kelola pemerintahan kota.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/400/RB.06/2024 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Indeks RB Pemerintah Kota Tual tahun 2023 adalah 39,28 dengan kategori "C" dengan rincian hasil sebagai berikut:

Tabel 2.38 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tual 2023

Penilaian		Bobot	Nilai
A	RB General	100	37,83
B	RB Tematik	20	1,45
C	Indeks RB	120	39,28
			C

Sumber: KemenPANRB, 2024.

2.4.2. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan sebuah alat ukur atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks ini mengukur seberapa efektif dan efisien layanan publik diselenggarakan, serta seberapa baik kepuasan masyarakat terhadap layanan tersebut. IPP juga bertujuan untuk memberikan gambaran seberapa baik pelayanan publik diberikan kepada masyarakat dalam hal efisiensi, transparansi, responsivitas, dan kualitas layanan yang diterima oleh pengguna layanan. Tahun 2023, Kota Tual mendapat nilai 67,26 dan termasuk dalam Zona Kuning dengan kategori "C" yang berarti termasuk kualitas sedang.

Tabel 2.39 Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Tual 2023

No	Kota	Nilai	Zona	Kategori	Opini
1	TUAL	67,26	Kuning	C	Kualitas Sedang

Sumber: Indeks Pelayanan Publik Ombudsman RI, 2023.

2.4.3 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan alat ukur penting yang merefleksikan tingkat kemajuan dan kreativitas dalam pengembangan serta implementasi inovasi di tingkat daerah. Bagi Kota Tual, Indeks Inovasi Daerah bukan hanya menjadi tolak ukur kemajuan teknologi dan inovasi, tapi juga mencerminkan bagaimana inovasi tersebut diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik untuk memperbaiki kualitas hidup warga.

Indeks Inovasi Kota Tual yang tercatat sebesar 27,92 menunjukkan posisi Kota Tual dalam konteks inovasi nasional.

Menurut Kepmendagri No 400.10.11-6301 A Tahun 2022, Kota Tual berada di peringkat ke-88 dari total 93 kota yang dievaluasi di Indonesia. Skor tersebut mencerminkan sejauh mana inovasi telah diadopsi dan diintegrasikan dalam berbagai aspek pembangunan di Tual, termasuk dalam pemerintahan, industri, pendidikan, dan masyarakat.

Angka tersebut memberikan gambaran tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kota Tual dalam meningkatkan kapasitas inovatifnya. Skor Indeks Inovasi yang berada di bawah rata-rata nasional menandakan bahwa terdapat ruang yang signifikan bagi peningkatan dan pembaharuan di berbagai sektor. Hal ini menjadi sinyal bagi pemangku kepentingan kota untuk merancang dan menerapkan strategi yang dapat memacu pertumbuhan inovatif, memanfaatkan teknologi terkini, serta mengadopsi praktik terbaik untuk pembangunan berkelanjutan.

2.4.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan. Indeks ini penting untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Kota Tual berhasil mendapatkan skor Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Indeks 2,13 yang masuk kategori Cukup.

Tabel 2.40 Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Tual

Baseline	Indeks	Predikat	Keterangan
Tahun 2020	-	-	Evaluasi instrumen baru berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mengoptimalkan penilaian SPBE bagi seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
Tahun 2021	-	-	Kota Tual Tidak Melakukan Evaluasi
Tahun 2022	2,05	Cukup	Keputusan Menteri PANRB Nomor 108 Tahun 2023
Tahun 2023	2,13	Cukup	Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024

Sumber: KepmenPANRB, 2024.

Keberhasilan ini mencerminkan upaya signifikan dalam meningkatkan tata kelola dan manajemen SPBE, termasuk pengelolaan risiko, keamanan informasi, manajemen data, dan audit teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam mengadopsi praktik pemerintahan yang efisien, efektif, dan berkesinambungan berbasis teknologi informasi.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tual Tahun 2005 - 2025 memiliki visi " Mewujudkan Kota Tual Sebagai Kota Kepulauan yang Aman, Berbudaya, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan". Menjadikan Kota Tual sebagai kota kepulauan tidak terlepas dari keunikan Kota Tual yang bercirikan kepulauan dengan potensi sumberdaya pesisir dan kelautan.

Visi ini juga menjadi dasar pelaksanaan pembangunan selama 20 tahun Kota Tual, yang dituangkan dalam tahapan pembangunan jangka menengah. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 misi pembangunan yaitu:

- Membangun sistem pengamanan yang mandiri pada masyarakat
- Membangun masyarakat kewargaan (*civil society*)
- Penciptaan nilai tambah potensi daerah
- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
- Pembangunan yang berorientasi menjaga keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam serta lingkungan dan mengembangkan budaya pelestarian lingkungan hidup.

Perumusan 5 misi pembangunan tersebut telah memberikan perubahan ke arah yang lebih baik selama 20 tahun ini yakni terwujudnya Kota Tual yang aman, masyarakatnya berbudaya, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Walaupun terdapat beberapa catatan perbaikan pembangunan, namun dengan capaian yang diperoleh, pemerintah Kota Tual telah memberikan banyak perubahan pembangunan dan terus membuka ruang untuk setiap perbaikan serta keberlanjutan pembangunan.

2.5.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan

Mengetahui capaian indikator makro pembangunan sangat penting untuk memahami sejauh mana tujuan pembangunan suatu wilayah telah tercapai, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM), dan rasio gini memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Informasi ini menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah, perencanaan kebijakan yang lebih terarah, serta alokasi sumber daya yang efektif. Selain itu, pemantauan capaian indikator makro juga membantu mengidentifikasi tantangan atau kesenjangan yang

memerlukan intervensi prioritas, sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hasil evaluasi RPJPD Kota Tual 2005-2025 menunjukkan capaian pada beberapa indikator makro pembangunan. Keberhasilan pembangunan ini tidak terlepas dari arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kota Tual Tahun 2005-2025 yang berhasil diterjemahkan ke dalam pembangunan 5 (lima) tahunan dalam dokumen RPJMD dan dioperasionalkan dalam pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD.

Tabel 2.41 _Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan (2005 - 2023)

Indikator Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan Periode RPJMD 2019-2023				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia	75,9	67,74	67,96	68,16	68,6	68,89
Tingkat Kemiskinan	30,42	22,68	22,52	23,56	20,56	20,68
Tingkat Pengangguran Terbuka	15,41	9,3	9,29	8,7	9,07	8,98
Pertumbuhan Ekonomi	4,7	5,87	-0,18	3,46	5,68	5,81
Ketimpangan Pendapatan	0,3	0,27	0,26	0,23	0,26	0,31
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan	2.417,00	20.338,42	17.114,62	17.393,83	18.134,37	18.944,28
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	4.081,00	33.296,08	28.458,16	29.400,78	32.177,62	34.971,50

Sumber: Kota Tual dalam angka, 2020, s.d. 2024.

Capaian kinerja makro pembangunan dari tahun awal periode perencanaan (2005) menunjukkan tren yang positif. Angka kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan, dari 30,42% di tahun 2005 menjadi 20,68% di tahun 2023. Begitu halnya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami penurunan dari 15,41% pada tahun awal perencanaan menjadi 8,98% tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi walaupun mengalami fluktuasi, namun secara umum menunjukkan tren peningkatan dari 4,70% di tahun 2005 menjadi 5,81% (2023). Tren positif ditunjukkan juga untuk indikator ketimpangan

pendapatan maupun PDRB Perkapita. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan satu-satunya indikator yang menunjukkan tren negatif, karena dari pencapaian 75,90 poin di tahun 2005 menjadi 68,89 poin pada pencapaian di tahun 2023.



Gambar 2.10
Pencapaian Pembangunan Kota Tual Tahun 2005 - 2023

2.5.2 Evaluasi Misi RPJPD Kota Tual 2005–2025

2.5.2.1 Misi Membangun Sistem Pengamanan yang Mandiri Pada Masyarakat

Misi pertama dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang Kota Tual adalah **membangun sistem pengamanan yang mandiri pada masyarakat** dan untuk mendukung misi pembangunan tersebut adalah meningkatnya kesadaran dan kohesifitas sosial (solidaritas) sebagai sasaran. Berdasarkan capaian kinerja RPJPD 2005-2025 pada indikator maka tergambar capaian sebagai berikut: menurunnya jumlah angka kriminalitas dengan rata-rata 592 kasus, meningkatnya Angka Melek Huruf rata-rata presentase 99,8 %,

dan jumlah rata-rata lama sekolah dengan rata-rata kenaikan setiap tahunnya sebesar 10.5%.

2.5.2.2 Misi Membangun Masyarakat Kewargaan (*Civil Society*)

Membangun Masyarakat Kewarganegaraan (*Civil Society*) merupakan misi ke-2 RPJPD Kota Tual 2005-2025. Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa dijadikan sebagai sasaran, dimana mempertahankan dan mengembangkan adat istiadat menjadikan bagian yang tak terpisahkan dari misi ini. Berdasarkan capaian kinerja RPJPD 2005-2025, tergambar beberapa capaian sebagai berikut: Bertambahnya jumlah rumah ibadah yang dibangun dengan rata-rata 96 rumah ibadah, tidak tergambar jumlah aparaturnya (ASN) yang mengikuti diklat, menurunnya presentase fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya dengan presentase akhir 4,99%.

2.5.2.3 Misi Penciptaan Nilai Tambah Potensi Daerah

Misi kelima dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang Kota Tual adalah ***Penciptaan Nilai Tambah Potensi Daerah***. Sedangkan sasaran untuk mendukung misi pembangunan ini, yaitu berkembangnya konsep kompetensi inti industri serta meningkatnya kualitas sumberdaya manusia Kota Tual. Berdasarkan pencapaian rata-rata indikator pada sasaran di misi pembangunan pertama ini dapat disimpulkan terjadi peningkatan capaian pembangunan pada indikator, jumlah obyek wisata yang ditambah, presentase laju pertumbuhan investasi yang ditingkatkan, jumlah sistem pemasaran UMKM-koperasi yang dikuatkan, presentase jumlah industri. Hal yang sama ditunjukkan pada indikator jumlah komoditas unggulan yang ditingkatkan, produktifitas perikanan tangkap, dan jumlah kunjungan wisata.

2.5.2.4 Misi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Misi ke-4 dari RPJPD 2005 - 2025 adalah ***Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat***, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Capaian dari misi ini ditunjukkan dengan dengan rata-rata presentase 1,28%, jumlah angka kematian bayi yang menurun dengan rata-rata 21,5 kasus, jumlah angka kematian ibu yang melahirkan dengan rata-rata 8,5 jiwa, nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dengan skor CC, indeks kepuasan masyarakat yang meningkat dengan skor 91,4, persentase pendidikan tenaga kependidikan yang

memiliki kualifikasi (S1/DIV) dengan presentase 87,44%, jumlah petani yang ditingkatkan kesejahteraannya dengan jumlah rata-rata 399 petani, jumlah penduduk miskin yang menurun, dan penurunan tingkat pengangguran.

2.5.2.5 Misi Pembangunan yang berorientasi menjaga keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam serta lingkungan dan mengembangkan budaya pelestarian lingkungan hidup

Meningkatnya keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan hidup merupakan sasaran untuk mendukung pencapaian misi ke-5 ini. Beberapa capaian indikator menunjukkan keberhasilan misi ini, diantaranya;

- Bertambahnya jumlah jalan yang layak pakai/baik
- Bertambahnya jumlah Terminal, Dermaga dan Pelabuhan
- Jumlah Sarana Penghubung
- Bertambahnya jumlah Masyarakat dalam penggunaan Listrik
- Persentase jaringan air bersih/aman
- Bertambahnya Jumlah Jaringan Telekomunikasi

Proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kota Tual dalam periode 20 tahun terakhir sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan mengacu pada visi, misi dan sasaran yang dicantumkan dalam RPJPD Kota Tual Tahun 2005-2025. Skor capaian dari berbagai indikator yang digunakan juga menunjukkan secara rata-rata hasil capaian RPJMD 4 periode dengan predikat tinggi dengan capaian target pembangunan RPJPD sebesar 94,49%.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Prasarana Pelayanan Publik

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tual 2025-2045, bagian ini menganalisis demografi dan pengaruhnya terhadap pengembangan infrastruktur pelayanan publik. Pendekatan ini menyoroti kebutuhan infrastruktur sosial dan ekonomi, merespons dinamika populasi dengan perencanaan perkotaan berkelanjutan, dan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ditekankan juga adaptasi terhadap perubahan demografis dalam penyediaan layanan kesehatan dan sosial, serta pembentukan kebijakan tata ruang dan transportasi yang inklusif. Hasil analisa menyajikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti empiris untuk mendukung pembangunan

infrastruktur pelayanan publik yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk Kota Tual.

2.6.1 Proyeksi Penduduk

Analisis proyeksi kependudukan adalah inti dari penyusunan RPJPD Kota Tual 2025-2045, berperan krusial dalam menentukan kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi, sosial, serta lingkungan. Proyeksi ini membantu dalam perencanaan infrastruktur seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang sesuai dengan potensi angkatan kerja, merencanakan program sosial untuk meningkatkan kualitas hidup, dan mengelola lingkungan dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan keberlanjutan sumber daya alam.

2.6.1.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Memahami kondisi demografis suatu daerah merupakan aspek krusial dalam perencanaan pembangunan yang efektif. Data jumlah penduduk Kota Tual memberikan wawasan penting untuk analisis perkembangan pembangunan daerah. Informasi ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar untuk pengolahan dan analisis data perkembangan, tetapi juga sebagai referensi vital dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Informasi demografis ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan nyata penduduk, memastikan alokasi sumber daya yang efisien, dan membantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2.42_Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tual 2025-2045 (jiwa)

Kecamatan	T A H U N				
	2025	2030	2035	2040	2045
Pulau Dullah Utara	25.145	26.561	27.791	29.074	30.578
Pulau Dullah Selatan	53.884	56.920	59.554	62.303	65.526
Tayando Tam	8.002	8.453	8.844	9.252	9.731

Pulau-Pulau Kur	2.957	3.123	3.268	3.419	3.596
Kur Selatan	3.903	4.123	4.313	4.513	4.746
Kota Tual	93.890	99.180	103.770	108.561	114.176

Sumber: Bappeda Kota Tual (Data Diolah), 2024.

Proyeksi jumlah penduduk Kota Tual yang terus meningkat dari 90.007 jiwa pada tahun 2023 menjadi 93.890 jiwa pada tahun 2025, dan pada tahun 2045 di proyeksikan menjadi 114.176 jiwa. Ini mengindikasikan adanya pertumbuhan penduduk yang stabil dan berkelanjutan. Pertumbuhan ini mencerminkan kebutuhan perencanaan yang matang dari pemerintah setempat untuk memastikan infrastruktur dan layanan publik dapat memenuhi permintaan yang bertambah, termasuk perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sementara ini menjadi peluang bagi perekonomian kota untuk berkembang dengan penambahan tenaga kerja, di sisi lain, tantangan terhadap sumber daya dan keberlanjutan lingkungan juga akan meningkat, memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam pengelolaan dan pengembangan kota yang inklusif serta berkelanjutan.

Analisis mengenai jumlah dan kepadatan penduduk merupakan faktor-faktor demografis yang saling berinteraksi dan seringkali dikaji secara bersamaan untuk mendalami pemahaman akan dinamika populasi di Kota Tual. Penjumlahan penduduk memberikan ukuran absolut dari jumlah individu yang mendiami wilayah tersebut, sementara kepadatan penduduk menawarkan perspektif tentang tingkat penyebaran penduduk per unit wilayah, yang sering dinyatakan sebagai jumlah individu per kilometer persegi.

Tabel 2.43 _Kepadatan Penduduk Kota Tual 2025-2045 (jiwa/km²)

Kecamatan	Kepadatan (jiwa/km ²)				
	2025	2030	2035	2040	2045
Pulau Dullah Utara	275	290	303	318	334
Pulau Dullah Selatan	1.322	1.397	1.461	1.529	1.608
Tayando Tam	109	115	120	125	132
Pulau-Pulau Kur	151	159	167	174	183

Kur Selatan	136	144	150	157	165
Kota Tual	369	390	408	427	449

Bappeda Kota Tual (Data Diolah), 2024.

Kepadatan penduduk di Kota Tual dari tahun 2025 hingga 2045 menunjukkan tren peningkatan kepadatan secara konsisten. Dimulai dari 369 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2025, kepadatan tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 449 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2045. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa Kota Tual akan mengalami pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan, yang akan mempengaruhi kebutuhan ruang dan infrastruktur.

2.6.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tual, data demografis yang akurat berdasarkan jenis kelamin esensial untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kebutuhan sosial dan ekonomi yang beragam serta mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Memahami distribusi gender sangat penting untuk merancang program pembangunan yang adil dan menyeluruh, memastikan pemanfaatan potensi setiap individu demi kesejahteraan dan kemajuan Kota Tual. Analisis distribusi penduduk menurut jenis kelamin memberikan landasan untuk mengatasi disparitas dan mengembangkan strategi yang akan memperkuat kontribusi warga dalam pembangunan kota.

Data proyeksi penduduk Kota Tual menunjukkan peningkatan berkelanjutan baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan dari tahun 2025 hingga 2045, dengan jumlah penduduk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki di setiap titik waktu. Tren ini menandakan pertumbuhan penduduk yang seimbang antara kedua jenis kelamin dan mengimplikasikan bahwa perencanaan kebijakan dan pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik kedua demografis tersebut. Perbedaan yang konsisten dalam jumlah penduduk perempuan yang relatif lebih banyak dapat mempengaruhi aspek-aspek tertentu dari perencanaan sosial dan infrastruktur, termasuk kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesempatan kerja, yang harus diakomodasi untuk

mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.44 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tual Menurut Jenis Kelamin

TAHUN	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)		Total
	Laki - Laki	Perempuan	
2025	46.840	47.050	93.890
2030	49.440	49.760	99.200
2035	51.650	52.120	103.770
2040	54.015	54.546	108.561
2045	56.796	57.380	114.176

Sumber: Bappeda Kota Tual (Data Diolah), 2024.

2.6.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Analisis demografis menurut kelompok umur di Kota Tual adalah langkah penting untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan komposisi umur penduduknya. Struktur umur penduduk memberikan wawasan tentang potensi pertumbuhan ekonomi dan tantangan yang mungkin timbul dari penuaan populasi serta rasio ketergantungan yang terkait. Dengan memetakan piramida umur, Kota Tual dapat menyiapkan strategi intervensi yang fokus pada kelompok umur spesifik dan mengevaluasi keseimbangan antara penduduk usia produktif dan non-produktif. Hal ini penting untuk mengarahkan perencanaan layanan sosial, kebijakan pendidikan, dan pengembangan tenaga kerja, memastikan bahwa setiap segmen usia menerima dukungan yang sesuai untuk kontribusi optimal mereka terhadap kesejahteraan dan kemajuan sosio-ekonomi kota.

Tabel 2.45 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tual Berdasarkan Umur

Kelompok Umur	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
0 - 4	9.170	8.770	8.260	7.978	7.705
5 - 9	7.210	9.100	8.710	9.295	9.919
10 - 14	6.520	7.170	9.050	10.114	11.304
15 - 19	8.130	6.480	7.130	6.842	6.566
20 - 24	8.410	7.990	6.370	5.814	5.307

Kelompok Umur	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
25 - 29	7.930	8.250	7.850	7.826	7.803
30 - 34	8.710	7.830	8.130	7.950	7.775
35 - 39	8.360	8.560	7.700	7.495	7.295
40 - 44	7.060	8.240	8.450	8.977	9.537
45 - 49	5.730	6.940	8.090	9.082	10.197
50 - 54	4.670	5.560	6.730	7.609	8.603
55 - 59	3.760	4.460	5.330	5.992	6.735
60 - 64	2.950	3.510	4.190	4.713	5.302
65 - 69	2.120	2.640	3.170	3.628	4.153
70 - 74	1.390	1.770	2.240	2.630	3.088
+75	1.770	1.930	2.370	2.615	2.886
Total	93.890	99.200	103.770	108.561	114.176

Sumber: 1). Proyeksi Penduduk Indonesia (PPI) 2015-2045 BPS, 2024. 2). Bappeda Kota Tual (Data Diolah), 2024.

Proyeksi kelompok umur di Kota Tual menunjukkan stabilitas dalam jumlah anak-anak (usia 0-14) dengan sedikit peningkatan dari tahun 2025 hingga 2045, sementara jumlah penduduk usia produktif (15-64) secara bertahap mengalami kenaikan selama periode yang sama. Di sisi lain, terdapat peningkatan signifikan pada kelompok usia 65 tahun ke atas, yang menggambarkan proses penuaan penduduk yang akan mempengaruhi rasio ketergantungan di masa depan. Kestabilan dalam kelompok usia muda menunjukkan laju kelahiran yang relatif konstan, sementara penurunan dalam kelompok usia kerja dan peningkatan di kelompok usia lanjut menuntut perencanaan yang matang untuk sistem kesejahteraan dan kesehatan, serta penyesuaian dalam pasar tenaga kerja dan kebijakan sosial untuk mendukung populasi yang menua.

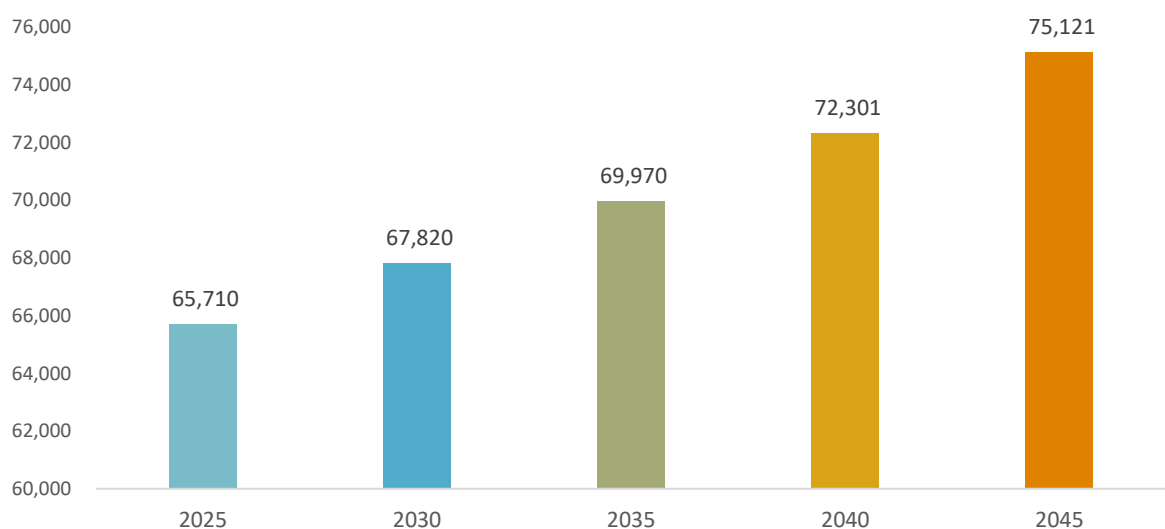
Di Kota Tual, kelompok umur 15 hingga 64 tahun yang dikenal sebagai usia produktif memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial kota. Memahami struktur dan jumlah penduduk usia produktif ini penting untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan kelompok ini, termasuk kapasitas tenaga kerja, kontribusi dalam ekonomi, serta berbagai tantangan dan kesempatan yang ada dalam pembangunan lokal.

Analisis proyeksi kelompok umur 15-64 tahun di Kota Tual dari tahun 2025 hingga 2045 menunjukkan adanya kenaikan secara bertahap dalam jumlah penduduk usia produktif. Jika pada tahun 2025 penduduk usia produktif berjumlah 65.710 jiwa pada tahun 2025,

diperkirakan akan naik menjadi 75.121 jiwa pada tahun 2045. Kenaikan jumlah penduduk usia produktif ini mungkin akan mempengaruhi pasokan tenaga kerja dan potensi pertumbuhan ekonomi di Kota Tual, dan diperlukan kebijakan adaptif untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan sosial kota, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan penyesuaian dalam pasar tenaga kerja.

Analisis data demografis Kota Tual menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah penduduk lanjut usia, fenomena yang menjadi bagian penting dari dinamika penduduk kota tersebut. Perubahan ini mengindikasikan transisi ke struktur umur yang lebih tua, yang dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti peningkatan harapan hidup dan penurunan tingkat kelahiran. Fenomena ini mencerminkan pergeseran dalam komposisi demografis Kota Tual, menandai perubahan penting dalam kebutuhan dan tantangan yang akan dihadapi dalam perencanaan dan pengembangan sosial dan ekonomi.

Data proyeksi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) di Kota Tual dari tahun 2025 hingga



Gambar 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umum 15 - 64 Tahun
Tahun 2025 - 2045

2045 menunjukkan peningkatan, dari 4.941 jiwa pada tahun 2025 menjadi 5.731 jiwa pada tahun 2045. Pertumbuhan populasi lanjut usia ini memiliki implikasi penting untuk perencanaan kota, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan layanan kesehatan, dan infrastruktur sosial. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya mengembangkan strategi yang berfokus pada kesejahteraan dan keterlibatan aktif penduduk usia lanjut, serta

menyesuaikan kebijakan tenaga kerja dan sosial untuk mengakomodasi perubahan dalam struktur demografis kota.

Tabel 2.46 Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kota Tual

Penduduk Usia Lanjut	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Usia 65+	5.280	6.340	7.780	8.874	10.127

Sumber: 1). *Proyeksi Penduduk Indonesia (PPI) 2015-2045 BPS, 2024*. 2). *Bappeda Kota Tual (Data Diolah), 2024*.

2.6.1.4. Bonus Demografi

Bonus Demografi merupakan kondisi ketika penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif dengan proporsi lebih dari 70,09 persen dari total jumlah penduduk. Berdasarkan hasil analisis proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur dan angka ketergantungan menunjukkan bahwa Kota Tual pada tahun 2045 akan mendapatkan Bonus demografi (*The Window of Opportunity*). Hal ini ditunjukkan dari besarnya angka ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kota Tual pada tahun 2045 adalah sebesar 42,66 persen (catatan: bonus demografi terjadi apabila besarnya persentase angka ketergantungan di bawah 50 persen). Bahkan bonus demografi tersebut sudah didapatkan dari tahun 2021 ini. Kondisi ini tentu memberi dampak yang sangat besar bagi Kota Tual apabila mampu memanfaatkan momentum ini dengan baik.

Agar manfaat Bonus Demografi ini bisa dinikmati dan berdampak secara positif, maka harus memperhatikan 4 pilar, yaitu Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya pengendalian penduduk, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Meskipun ada banyak populasi usia produktif, namun kesenjangan dalam pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan bisa menjadi masalah. Jika Pilar ini tidak diprioritaskan, maka bonus demografi tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan lapangan kerja dan kewirausahaan: Jumlah populasi usia produktif yang tinggi memerlukan lapangan kerja yang cukup untuk mengakomodasi mereka. Jika lapangan kerja atau kesempatan wirausaha tidak cukup tersedia, bisa terjadi pengangguran atau peningkatan tingkat pengangguran.

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana

Dalam konteks Kota Tual, perencanaan infrastruktur perkotaan menuntut pendekatan sistematis dan komprehensif, berdasarkan analisis dinamika pertumbuhan populasi dan kebutuhan infrastruktur. Pentingnya mengikuti standar nasional dalam perencanaan ini termasuk adaptasi terhadap fluktuasi populasi, dengan pertimbangan kapasitas dan jenis infrastruktur yang dibutuhkan. Perencanaan infrastruktur di Kota Tual harus menyertakan kebutuhan perumahan, kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, serta infrastruktur utilitas lainnya, dengan prinsip keberlanjutan dan pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan.

Proyeksi kebutuhan infrastruktur yang berdaya guna menuntut analisis yang mendalam mengenai dinamika pertumbuhan populasi dan implikasinya terhadap kebutuhan infrastruktur perkotaan. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 mengenai Tatacara Perencanaan Perumahan Perkotaan, perencanaan ini wajib mengakomodasi pertumbuhan populasi yang fluktuatif, dengan mempertimbangkan kecukupan ruang dan fasilitas.

2.6.2.1 Proyeksi Tempat Tinggal

Kebutuhan perumahan merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan kota yang berkelanjutan, terutama di Kota Tual yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk dari tahun 2025 hingga 2045 mencerminkan peningkatan yang signifikan, yang berimplikasi langsung terhadap permintaan atas unit rumah.

Analisis data jumlah penduduk, jumlah rumah, dan luas lahan yang dibutuhkan untuk perumahan di Kota Tual dari tahun 2025 hingga 2045 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten di ketiga aspek tersebut. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan tumbuh dari 93.890 jiwa pada tahun 2025 menjadi 114.176 jiwa pada tahun 2045, jumlah unit rumah yang dibutuhkan juga meningkat, dari 23.473 unit menjadi 28.544 unit. Secara paralel, luas lahan yang diperuntukkan untuk perumahan mengalami kenaikan signifikan, dari sekitar 845.010 meter persegi pada tahun 2025 menjadi 1.027.586 meter persegi pada

tahun 2045. Peningkatan ini menandakan kebutuhan yang berkembang untuk pembangunan perumahan dan infrastruktur terkait, sejalan dengan pertumbuhan populasi.

Tabel 2.47 Proyeksi Kebutuhan Tempat Tinggal Kota Tual 2025-2045

	Jumlah	T a h u n				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk		93.890	99.200	103.770	108.561	114.176
Jumlah rumah (unit)*	4	23.473	24.800	25.943	27.140	28.544
Luas lahan untuk rumah (m ²)**	36	845.010	892.800	933.930	977.048	1.027.586

Sumber: BKKBN (1 KK ideal adalah 4 orang)* dan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan**

2.6.2.2 Air Bersih

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kota Tual, analisis kebutuhan infrastruktur dasar seperti pasokan air bersih menjadi sangat penting, terutama dengan pertumbuhan kota yang terus berlangsung. Mengacu pada proyeksi pertumbuhan penduduk di Kota Tual dari tahun 2025 hingga 2045, terdapat perkiraan peningkatan signifikan dalam permintaan air bersih yang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Ini menekankan perlunya perencanaan yang cermat dan strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang cukup dan berkelanjutan bagi penduduk yang berkembang.

Analisis kebutuhan air bersih di Kota Tual dari tahun 2025 hingga 2045 menunjukkan peningkatan yang terus menerus sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan meningkat dari 93.890 jiwa pada tahun 2025 menjadi 105.654 jiwa pada tahun 2045, kebutuhan total air bersih di kota ini juga akan naik secara signifikan, dari sekitar 9.389.000 liter per hari menjadi 11.417.623 liter per hari. Selain itu, berdasarkan rasio satu kran umum per 250 jiwa, jumlah kran umum yang dibutuhkan juga akan bertambah, dari 376 unit pada tahun 2025 menjadi 457 unit pada tahun 2045. Peningkatan ini mencerminkan kebutuhan yang berkembang untuk infrastruktur penyediaan air bersih yang efektif di Kota Tual, menekankan pentingnya perencanaan dan

investasi yang proaktif dalam sistem penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah.

Tabel 2.48 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

	Standar SNI	T a h u n				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk		93.890	99.200	103.770	108.561	114.176
Kebutuhan air bersih-Kota kecil*	100 liter/kap/hari	9.389.000	9.920.000	10.377.000	10.856.094	11.417.623
Kebutuhan kran umum air bersih**	1 buah/250 jiwa	376	397	415	434	457

Sumber: Ditjen SDA Departemen Kimpraswil (2003)* dan SNI 03-2399-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum**

2.6.2.3 Energi/Listrik

Dalam konteks Kota Tual, analisis kebutuhan listrik untuk rumah tangga dan lingkungan diperlukan untuk mendukung proyeksi pertumbuhan penduduk yang diharapkan terjadi dari tahun 2025 hingga 2045. Pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan akan meningkatkan permintaan terhadap energi listrik, baik untuk keperluan domestik maupun aktivitas komersial dan industri. Hal ini menuntut pemerintah Kota Tual untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur listrik yang mampu memenuhi kebutuhan yang meningkat ini, termasuk peningkatan kapasitas produksi listrik, pengembangan jaringan distribusi yang lebih luas, dan penerapan teknologi efisiensi energi.

Penyediaan listrik yang andal dan berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kualitas hidup penduduk, serta memastikan pengembangan kota yang berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya perubahan kebutuhan energi, Kota Tual juga memiliki peluang untuk berinvestasi dalam sumber energi terbarukan dan inisiatif hemat energi, sebagai langkah adaptif terhadap tantangan masa depan dan komitmen terhadap lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Tabel 2.49 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik

	Standar SNI	T a h u n				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk		93.890	99.200	103.770	108.561	114.176
Listrik rumah tangga (VA)	450 VA per jiwa	42.250.500	44.640.000	46.696.500	48.852.421	51.379.304
Listrik lingkungan	40% listrik rumah tangga	16.900.200	17.856.000	18.678.600	19.540.968	20.551.722
Total (VA)		59.150.700	62.496.000	65.375.100	68.393.389	71.931.026

Sumber : SNI 04-8287.603-2002 tentang Istilah kelistrikan

Analisis kebutuhan listrik di Kota Tual dari tahun 2025 hingga 2045 menunjukkan peningkatan yang signifikan sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Dengan proyeksi jumlah penduduk bertambah dari 93.890 jiwa pada tahun 2025 menjadi 114.176 pada tahun 2045, kebutuhan listrik rumah tangga, yang dihitung dengan asumsi 450 VA per jiwa, juga meningkat dari 42.250.500 VA menjadi 51.379.304 VA. Paralel dengan itu, kebutuhan listrik untuk lingkungan, yang diperkirakan 40% dari kebutuhan listrik rumah tangga, juga meningkat, dari 16.900.200 VA pada tahun 2025 menjadi 20.551.722 VA pada tahun 2045.

Total kebutuhan listrik di Kota Tual, yang mencakup kebutuhan rumah tangga dan lingkungan, diharapkan meningkat dari 59.150.700 VA pada tahun 2025 menjadi 71.931.026 VA pada tahun 2045. Peningkatan ini menggarisbawahi kebutuhan untuk perencanaan infrastruktur listrik yang cermat dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas pembangkit, perluasan jaringan distribusi, dan mungkin juga penerapan sumber energi alternatif untuk mendukung kebutuhan penduduk yang berkembang ini.

2.6.2.4 Proyeksi Persampahan

Analisis kebutuhan pengelolaan sampah yang berlandaskan pada proyeksi pertumbuhan penduduk dari tahun 2025 hingga 2045 menjadi sangat penting untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan dalam pengelolaan limbah perkotaan. Seiring dengan peningkatan

jumlah penduduk yang diperkirakan dari 91.101 jiwa pada tahun 2025 menjadi 105.654 jiwa pada tahun 2045, volume sampah yang dihasilkan di kota ini juga akan meningkat secara signifikan. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang dan strategi pengelolaan sampah yang efektif, mencakup peningkatan kapasitas pengumpulan, pemrosesan, daur ulang, dan pembuangan akhir.

Tabel 2.50 Proyeksi Sampah Kota Tual 2025-2045

	Standar SNI	Jumlah Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk		93.890	99.200	103.770	108.561	114.176
Timbulan sampah (kg)*	0,5 kg/org/hari	46.945	49.600	51.885	54.280	57.088
Tong sampah rumah**	5	18.778	19.840	20.754	21.712	22.835
TPS lingkungan**	2.500	38	40	42	43	46
TPS kawasan**	30.000	3	3	3	4	4
TPA lokal**	120.000	1	1	1	1	1
TPA wilayah**	480.000	0	0	0	0	0

Sumber: SNI 3242 : 2008 tentang Pengelolaan sampah di permukiman * dan SNI 19-2454-2002 mengenai Tata cara teknik operasional pengolahan sampah perkotaan**

Kota Tual perlu mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih canggih dan berkelanjutan, termasuk fasilitas daur ulang yang memadai dan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pengurangan dan pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi penting untuk mengurangi beban pada sistem pengelolaan sampah. Strategi ini tidak hanya akan mengatasi tantangan lingkungan akibat peningkatan volume sampah, tetapi juga akan mendukung ambisi Kota Tual untuk menjadi kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Data jumlah penduduk Kota Tual dan timbulan sampah yang dihasilkan dari tahun 2025 hingga 2045 menunjukkan korelasi langsung antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan volume sampah. Timbulan sampah harian diperkirakan meningkat dari 46.945 kg (46,9 ton) tahun 2025 menjadi 57.088 kg (57,1 ton) tahun 2045, dengan asumsi setiap orang menghasilkan rata-rata 0,5 kg sampah per hari. Penambahan ini mengimplikasikan

kebutuhan yang meningkat untuk fasilitas pengelolaan sampah, seperti tong sampah rumah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) lingkungan dan kawasan, serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lokal. Jumlah TPS lingkungan dan kawasan juga perlu ditingkatkan sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Sementara itu, jumlah TPA lokal tetap konstan, menunjukkan bahwa kapasitasnya mungkin cukup untuk menangani volume sampah saat ini, tetapi mungkin perlu direvaluasi untuk masa mendatang.

2.6.2.5 Fasilitas Kesehatan

Analisis kebutuhan fasilitas kesehatan berlandaskan proyeksi jumlah penduduk dari tahun 2025 hingga 2045 menjadi sangat krusial. Dengan pertumbuhan penduduk yang diperkirakan terus, kebutuhan terhadap layanan kesehatan juga akan mengalami peningkatan. Hal ini menuntut perencanaan yang matang dan strategis oleh pemerintah kota untuk memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, dan fasilitas penunjang lainnya.

Tidak hanya jumlah fasilitas yang perlu ditingkatkan, tetapi juga kualitas layanan, aksesibilitas, dan distribusi fasilitas tersebut di seluruh wilayah kota untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari penduduknya. Diperlukan juga peningkatan kapasitas tenaga medis, termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, serta pengadaan peralatan dan teknologi medis terkini untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang tinggi.

Tabel 2.51 Proyeksi Sarana Kesehatan Kota Tual 2025-2045

	Standar SNI	T a h u n				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk		93.890	99.200	103.770	108.561	114.176
Posyandu	1.250	75	79	83	87	91
Balai Pengobatan warga	2.500	38	40	42	43	46
BKIA/Klinik bersalin	30.000	3	3	3	4	4
Puskemas pembantu	30.000	3	3	3	4	4
Puskemas	120.000	1	1	1	1	1
Tempat praktik dokter	5.000	19	20	21	22	23
Apotik	30.000	3	3	3	4	4

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di Kota Tual berdasarkan proyeksi penduduk dari tahun 2025 hingga 2045 menunjukkan tren peningkatan kebutuhan layanan kesehatan sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah Posyandu, Balai Pengobatan Warga, BKIA/Klinik Bersalin, Puskesmas Pembantu, Tempat Praktik Dokter, dan Apotik. Jumlah Posyandu diperkirakan akan bertambah dari 75 unit di tahun 2025 menjadi 91 unit di tahun 2045, dan tempat praktik dokter dari 19 menjadi 23 unit. Meskipun jumlah Puskesmas relatif konstan selama periode ini, peningkatan pada fasilitas kesehatan lainnya menunjukkan upaya Kota Tual untuk mengakomodasi kebutuhan kesehatan penduduknya yang berkembang.

Berdasarkan kondisi geografis Kota Tual yang didominasi oleh pulau-pulau, proyeksi fasilitas kesehatan, meskipun telah sesuai dengan standar SNI, akan dilengkapi dengan strategi yang adaptif dan holistik. Alih-alih hanya berfokus pada jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas, prioritas dialihkan pada penempatan strategis dan optimalisasi layanan. Pustu yang diproyeksikan harus ditempatkan di pulau-pulau terpencil dengan kepadatan penduduk tertinggi untuk memastikan aksesibilitas yang merata. Selain itu, model Puskesmas Keliling (Pusling) dengan kapal atau perahu harus dipertimbangkan sebagai solusi efektif untuk menjangkau pulau-pulau tanpa Pustu, sehingga layanan kesehatan dasar dan program pencegahan dapat dijangkau secara berkala. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi standar kuantitatif, tetapi juga mengatasi tantangan geografis, memastikan setiap warga di wilayah kepulauan memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini mencerminkan pentingnya perencanaan yang proaktif dan berkelanjutan dalam sistem kesehatan kota untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi semua warga, sesuai dengan pertumbuhan penduduk.

2.6.2.6 Fasilitas Pendidikan

Kebutuhan fasilitas pendidikan yang mengacu pada proyeksi jumlah penduduk dari tahun 2025 hingga 2045, memberikan gambaran penting tentang bagaimana kebutuhan akan pendidikan dasar dan menengah akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Kebutuhan fasilitas pendidikan yang memadai dan mencukupi, termasuk sekolah dasar dan menengah, ruang kelas, guru, serta perlengkapan dan materi pendidikan menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Tual perlu melakukan

perencanaan dan investasi yang matang dalam sektor pendidikan untuk menanggapi peningkatan jumlah siswa.

Analisis kebutuhan fasilitas pendidikan di Kota Tual, yang meliputi TK, SD, SMP, dan SMA/K, dari tahun 2025 hingga 2045, menunjukkan peningkatan jumlah fasilitas yang dibutuhkan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Kebutuhan untuk TK diperkirakan akan bertambah dari 75 unit menjadi 91 unit, SD dari 59 unit menjadi 71 unit, SMP dari 20 unit menjadi 24 unit, dan SMA/K juga dari 20 unit menjadi 24 unit. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kota Tual perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas dan jumlah fasilitas pendidikan untuk menampung jumlah siswa yang bertambah.

Hal ini mencakup tidak hanya pembangunan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia seperti guru dan staf pendidikan. Pertumbuhan ini juga menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dalam perencanaan pendidikan yang tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan program dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan masa kini dan masa depan.

Tabel 2.52 Proyeksi Sarana Pendidikan Kota Tual 2025-2045

	Standar SNI	T a h u n				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk		93.890	99.200	103.770	108.561	114.176
Kebutuhan TK	1.250	75	79	83	87	91
Kebutuhan SD	1.600	59	62	65	68	71
Kebutuhan SMP	4.800	20	21	22	23	24
Kebutuhan SMA/K	4.800	20	21	22	23	24

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual 2012-2032, potensi pengembangan wilayah di Kota Tual dapat digambarkan sebagai berikut:

2.7.1 Pengembangan Struktur Ruang Kota

2.7.1.1. Sistem Pusat Pelayanan Kota

- Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang terdiri dari pusat pelayanan Kota dengan fungsi pelayanan pemerintahan di kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan dan pusat pelayanan Kota dengan fungsi Perdagangan & jasa di Kelurahan Masrum dan Kelurahan Ketsoblak
- Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) yang terdiri dari:
 - Sub PPK dengan fungsi pelayanan pemerintahan, pertanian & pariwisata di desa Tubyal Kecamatan Pulau- pulau Kur dan Desa Warkar Kecamatan Kur Selatan.
 - Sub PPK dengan fungsi Pelayanan Pemerintahan serta perdagangan & jasa di desa Dullah Kecamatan Pulau Dullah Utara dan Desa Yamtel Kecamatan Tayando Tam.
- Pusat Lingkungan (PL) yang meliputi fungsi pelayanan Pemerintahan serta perdagangan dan jasa di di Desa Tayando Ohoiel dan Desa Tam Ngurhir Kecamatan Tayando Tam, Desa Niela Kecamatan Kur Selatan, Desa Kaimear Kecamatan Pulau- pulau Kur, desa Dullah Laut dan Desa Tamedan Kecamatan Pulau Dullah Utara.

2.7.1.2. Sistik Prasarana Wilayah Kota

- Sistik Jaringan Transportasi Darat
yaitu sistim jaringan jalan dan jaringan angkutan sungai, laut, dan penyeberangan yang meliputi:
 - Pengembangan rencana jaringan kolektor sekunder Ruas Lingkar Pulau Kur, Ruas Langgiar-Yamru-Ohoiel, ruas Tam Ngurhir – Tam Ohoitom, ruas lingkar Fiditan, ruas Tual – Tamedan, & ruas Tual-Ohoitel-Ohoitahit;
 - Jaringan jalan lokal yaitu ruas Labetawi – Difur – Ohoitahit; ruas lingkar Pulau Fair; ruas Ohoitahit – Nam dan Ruas Watraan – Luv

- Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi terminal tipe B di Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan; Terminal Penumpang Tipe C di desa Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara; Halte-halte di Kecamatan Pulau Dullah Selatan dan Kecamatan Pulau Dullah Utara;
- Rencana unit pengujian kendaraan bermotor di kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan.
- Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas & angkutan yaitu pengembangan trayek angkutan umum perkotaan yang melayani perjalanan dalam kota & antar kota meliputi Tual – Ohoitahit, Tual – Fiditan, Tual – Dullah, Tual – Taar, Tual – Langgur, rencana jalur Ohoitahit – Labetawi – Tamedan – Labetawi – Dullah – Ngadi – Ohoitel dan rencana jalur Ohoitel – Watraan – Luv – Watraan – Ohoitel.
- Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan meliputi dermaga penyeberangan di Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau dullah Selatan, Desa Tayando Yamtel di Kecamatan Tayando Tam dan desa Tubyal kecamatan Pulau-pulau Kur dengan alur penyeberangan meliputi Tual-Tayando Yamtel-Tubyal.
- Sistim Jaringan Transportasi Laut Meliputi:
 - Pengembangan pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Tual di Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan yang melayani alur pelayaran pengumpul untuk penumpang pulang pergi dari Kota Tual menuju pelabuhan lain di Provinsi Maluku, Provinsi Papua, Pulau Jawa, Sulawesi dan daerah lain di Indonesia; pelayaran pengumpul barang dengan alur pelayaran meliputi Tual – Ambon – Surabaya;
 - Pengembangan Pelabuhan pengumpan di desa Yamtel Kecamatan Tayando Tam dengan alur pelayanan Tual – Tayando – Lokwirin – Geser (kabupaten Seram BAgian Timur) – Ambon;
 - Pelabuhan khusus meliputi pelabuhan bahan bakar minyak di Kelurahan Masrun & Desa NGadi, Pelabuhan Angkutan Laut di Kelurahan Masrum Pelabuhan Perikanan di Desa Ngadi, Pelabuhan Perikanan Nusantara di Desa Tual, Rencana Pelabuhan Pendaratan ikan Kelvik di desa Taar, Rencana Pelabuhan Penampungan curah cair tidak terbatas di terbatas di desa Ngadi, Rencana Pelabuhan Penampungan gas tidak

terbatas di terbatas di desa Ngadi.

- Sistim Prasarana Lainnya

Sistem prasarana lainnya meliputi sistim jaringan energi/kelistrikan; sistim jaringan telekomunikasi, sistim jaringan sumber daya air kota dan infrastruktur kota lainnya.

2.7.2 Pengembangan Kawasan

2.7.2.1 Kawasan Budidaya

- Kawasan perumahan;
- Kawasan perdagangan dan jasa yaitu pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan pertokoan modern Kecamatan Pulau Dullah Utara & Selatan;
- Kawasan perkantoran baik perkantoran pemerintah maupun perkantoran swasta di Kecamatan Pulau Dullah Utara & Selatan;
- Kawasan industri untuk industri besar di Desa Ngadi Kecamatan Pulau Dullah Utara & industri rumah tangga/kecil & ringan di seluruh kecamatan Kota Tual;
- Kawasan pariwisata yaitu wisata buatan & wisata alam di seluruh kecamatan Kota Tual;
- Ruang terbuka non hijau yaitu lahan perkerasan dan badan air (Danau Ngadi & Danau Fanil);
- Ruang evakuasi bencana dengan pembagian sebagai berikut - Pulau Dullah berpusat di Bukit Iban desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara; - Pulau Tayando berpusat pada bukit Tu Ilun Ratan di Desa Ohoiel dan Bukit Rubai Un Fit di desa Yamtel; - Pulau-pulau Kur berpusat di Gunung Namsar Desa Kanara/Yapas Kecamatan Kur Selatan dan gunung Burun di Desa Kaimear kecamatan Puau-pulau Kur;
- Ruang kegiatan sektor informal berupa kawasan warung dan pedagang kaki lima di Kecamatan Pulau Dulau Utara & Pulau Dullah Selatan, terutama di arahkan di Kelurahan Masrum & Desa Fiditan ;
- kawasan peruntukkan lainnya yaitu kawasan peruntukan perikanan, hutan produksi, pertanian, pelayanan umum (pendidikan/kesehatan) dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

2.7.2.2 Kawasan lindung yang meliputi:

- Hutan lindung tersebar di kecamatan Pulau Dullah Utara & Tayando Tam;

- Kawasan resapan air tersebar di Kecamatan Pulau Dullah Utara dan Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
- Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan pantai dan kawasan sekitar danau;
- Ruang terbuka hijau yang terdiri dari taman kota, lapangan olahraga, hutan mangrove, jalur hijau dan sebagainya;
- Suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
- Kawasan rawan bencana alam terhadap gempa bumi, tsunami, dan banjir akibat gelombang pasang
- Kawasan lindung lainnya berupa pantai berterumbu karang di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 22.949 ha.

Selain pengembangan-pengembangan yang ada, juga ditetapkan kawasan-kawasan strategis yang meliputi kawasan agropolitan di Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Kur Selatan; kawasan minapolitan di semua kecamatan, dan kawasan konservasi penyu di Pulau Woning Kecamatan Kur Selatan.

2.7.2.3 Kawasan Kepelabuhanan

Sebagai bagian dari upaya penataan wilayah dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, kawasan kepelabuhanan memegang peranan strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi, transportasi, serta pengembangan sektor perikanan dan perdagangan di Kota Tual. Infrastruktur pelabuhan yang terintegrasi dengan potensi kelautan dan perikanan menjadi kunci utama untuk mendorong pertumbuhan wilayah pesisir, memperlancar mobilitas barang serta penumpang, dan memperkuat konektivitas antar pulau maupun ke luar negeri. Berbagai fasilitas pelabuhan yang telah disiapkan diharapkan mampu menunjang tidak hanya kebutuhan logistik dan aktivitas ekspor-impor, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan sektor unggulan daerah.

- Pelabuhan laut nasional atau pelabuhan umum terletak di Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan, sekaligus merupakan pelabuhan Kontainer. Sesuai dengan rencana pengembangannya akan dijadikan sebagai pintu gerbang bagi kegiatan ekspor ke luar negeri. Selain sebagai tempat bongkar muat barang dan penumpang, pelabuhan ini banyak disinggahi oleh kapal-kapal dari dalam negeri (Kapal

PELNI) dan Kapal-kapal kontainer dari pulau Jawa serta berfungsi juga untuk melayani pelayaran rakyat (kapal perintis/Tol Laut) dengan rute antar pulau dalam wilayah Provinsi Maluku.

- Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual telah dicanangkan sebagai Kawasan atau Zona Inti pengembangan perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Kawasan PPN Tual berlokasi di Dusun Dumar Kec. P. Dullah Selatan Kota Tual.
- Pelabuhan Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera, memiliki infrastruktur yang cukup memadai untuk pengembangan investasi di Sektor perikanan karena tersedia fasilitas pokok dan juga fasilitas pendukung.
- Pelabuhan penyeberangan dilayani oleh kapal Ferry dengan rute Tual-Dobo, dengan siklus sebulan sekali. Pelabuhan ini terdapat di Tual dengan kapasitas: 600 GT, dan panjang dermaga 58 meter. Pelabuhan Kur yang berskala Lokal terdapat di Pulau Kur tepatnya di Desa Lokwirin yang dipergunakan untuk kegiatan bongkar-muat penumpang dan barang.



3

PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS

Pembahasan tentang permasalahan dan isu strategis daerah sangat penting karena menentukan arah pembangunan daerah. Memahami dan mengidentifikasi permasalahan daerah memungkinkan pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif dan tepat sasaran. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang permasalahan, upaya pembangunan dapat menjadi tidak efektif, bahkan kontraproduktif, karena tidak mengatasi akar masalah yang ada.

Sementara itu isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan. Pembahasan yang komprehensif mengenai isu strategis daerah membantu menciptakan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, sangat penting untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar perencanaan kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun komitmen bersama dalam menghadapi dan mengatasi tantangan pembangunan daerah.

3.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan di Kota Tual merupakan gambaran kondisi permasalahan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah Kota Tual yang mencakup aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi kinerja RPJPD 2005- 2025. Permasalahan Pembangunan daerah Kota Tual yang masih relevan dalam dua puluh tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Aspek Geografi

Permasalahan pembangunan daerah pada aspek geografi yaitu menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan atas perubahan iklim.

3.1.1.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung lingkungan hidup di Kota Tual menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Standar yang digunakan untuk menghitung kebutuhan pangan masyarakat adalah standar Angka Kecukupan Energi (AKE) yaitu 2.150/hari/kapita sedangkan untuk kebutuhan air menggunakan standar 800 m³/tahun/kapita dikalikan dengan faktor koreksi. Pada analisis status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Tual yang dapat dihitung dan menjadi isu penting di Kota Tual adalah status daya dukung penyediaan air.

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan berdasarkan Dokumen Laporan KLHS RPJPD Kota Tual 2025-2045, beberapa wilayah di Kota Tual yang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampuan alam menyediakan pelayanan dalam hal penyediaan air terhadap kebutuhan yang digambarkan dari besarnya konsumsi air yang dibutuhkan masyarakat dan lahan untuk pertanian, sawah dan perikanan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan wilayah yang terlampaui di Kota Tual sebesar 46,25% dari total wilayah Kota Tual. Meskipun masih ada setengah wilayah yang belum terlampaui akan tetapi nilai perbandingan ketersediaan air dan kebutuhan air di Kota Tual bahkan secara rinci diuraikan pada setiap pulau perlu diperhatikan. Karena jika dibandingkan antara ketersediaan yang hanya sebesar 156.437.780,12 m³/tahun dibandingkan kebutuhan yang

sebesar 210.707.579,74 m³/tahun, memberikan gambaran bahwa daya dukung air di Kota Tual telah melampaui ambang batasnya.

Permasalahan kebutuhan air bersih yang melebihi ketersediaan berkorelasi dengan banyak hal salah satunya kondisi pangan. Indeks Ketahanan Pangan Nasional 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional, skor Indeks Ketahanan Pangan Kota Tual sebesar 45,18 dan masuk kedalam 4 kota yang memiliki skor IKP rendah. Dari sisi kualitas lingkungan hidup, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Tual mencapai skor 70,89. Sedangkan, hasil penilaian dan pemetaan indeks ketahanan daerah Provinsi Maluku, Kota Tual memperoleh skor IKD sebesar 0,2 yang masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya, dalam dokumen RPD 2023-2026, disajikan data skor IKD tahun 2022 sebesar 0,3 dan tahun 2023 sebesar 0,4. Skor ini mencerminkan evaluasi kuantitatif atas kondisi lingkungan saat ini di Kota Tual, dan berfungsi sebagai barometer penting dalam pengambilan keputusan serta penentuan arah kebijakan lingkungan kedepannya.

3.1.1.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Lemahnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota

Kondisi dan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik yang tersedia 2.808 ha tahun 2018 menjadi 2.789 ha tahun 2023 dengan presentasi pertumbuhan -0,17 %, namun, penyediaan RTH masih di luar target yang diinginkan yaitu 20 % karena perubahan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya, oleh karena itu diharapkan adanya peningkatan RTH publik di Kota Tual. Peningkatan bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) masih kecil dari 31 unit di menjadi 25 unit yang ber IMB dari total 13.886 unit, pada tahun 2023 rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan adalah 0,21 menjadi 0,18, secara umum perencanaan dan pemanfaatan tata ruang Kota Tual masih terkendala dengan perijinan ketaatan pada Rencana Tata Ruang Kota.

Sesuai dengan data yang termuat dalam dokumen KLHS RPJPD Kota Tual tahun 2025-2045, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Tual ditargetkan skor 75,03 namun capaian telah melampaui target yaitu mencapai skor 70,89 pada tahun 2023. Pencapaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Kota Tual. Meski masih terdapat selisih dari target yang telah ditetapkan, tren peningkatan ini menjadi indikator positif atas berbagai kebijakan dan

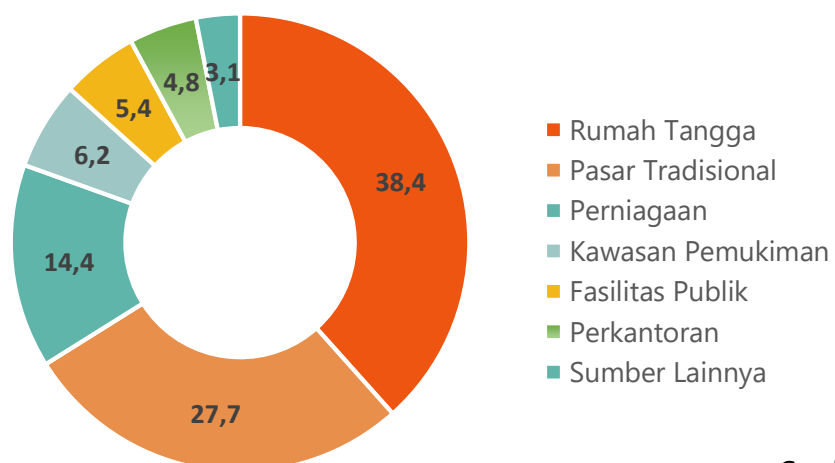
program yang telah diimplementasikan pemerintah daerah. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya terus didorong guna menjaga keseimbangan lingkungan hidup demi keberlanjutan pembangunan Kota Tual ke depan.

b. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan air baku, air limbah dan sanitasi lingkungan

Akses pemenuhan air baku di Kota Tual secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun 2013 yaitu dengan presentasi 21,84% menjadi 42,1% pada tahun 2023 dari total populasi sebanyak 86.531 jiwa, peningkatan pemenuhan akses air baku bagi warga harus di tingkatkan agar ketersediaan air bersih dapat mencangkup seluruh warga Kota Tual terutama pada wilayah hinterland (kepulauan); Pada periode tahun 2018-2023 pada presentasi rumah tinggal bersanitasi mengalami penurunan dengan nilai presentase 67.82% pada tahun 2013 menjadi 40.23% pada tahun 2017. Penyediaan akses pemenuhan air bersih dan sanitasi lingkungan yang baik diharapkan dapat terus di tingkatkan dalam pemenuhan kualitas hidup masyarakat di Kota Tual.

c. Pengelolaan Sampah

Persampahan pemenuhan infrastruktur untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup disebabkan belum tersedia fasilitas pengurangan sampah berupa 3R pada sumber sampah, cakupan penerapan sistem penanganan sampah diperkotaan masih di ruas-ruas jalan utama belum mencakup jalan-jalan lingkungan dan belum adanya tempat pembuangan akhir karena permasalahan pembebasan lahan serta akses informasi lingkungan hidup kepada masyarakat juga masih kurang.



Gambar 3.1
Persentase Sumber Sampah di Kota Tual
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tual, 2024.

Kurangnya pemenuhan infrastruktur limbah secara terpadu pada wilayah pesisir, pelayanan sampah pada pemukiman padat pesisir terkendala dengan akses jalan lingkungan yang sulit di lewati oleh truck sampah, dan tingkat kesadaran akan dampak pencemaran oleh sampah rumah tangga masih kecil, merupakan permasalahan yang di hadapi oleh Kota Tual saat ini. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya hayati makin menurun. Pemenuhan infrastruktur untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup disebabkan belum tersedia fasilitas pengurangan sampah dan presentasi cakupan pelayanan area persampahan yang masih kurang yaitu 10,20% pada tahun 2017 dari 8,24% pada tahun 2023.

d. Masih kurang perencanaan pembangunan berbasis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Mitigasi dan adaptasi bencana masih kurangnya program perencanaan daerah yang berhubungan dengan mitigasi bencana terutama pada wilayah pesisir dengan kerentanan lebih tinggi, selain itu kurangnya informasi tentang bencana dan dampak bagi masyarakat serta mitigasi dan adaptasi.

3.1.2 Aspek Daya Saing

Faktor daya saing daerah merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Daya saing ekonomi mencakup kemampuan daerah untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Rendahnya daya saing ekonomi sering kali disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai, akses terbatas terhadap teknologi, serta kualitas sumber daya manusia yang belum optimal. Kondisi ini mengakibatkan daerah kesulitan untuk berkembang secara ekonomi, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi kemampuan daerah untuk berkontribusi pada perekonomian nasional.

3.1.2.1 Masih Rendahnya Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya Saing Ekonomi Daerah yang menjadi permasalahan utama Kota Tual adalah perkembangan ekonomi lokal yang belum optimal. Ekonomi lokal merupakan proses pembangunan ekonomi yang menitik beratkan pada kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Sehingga hubungan yang terbentuk antara pihak-pihak tersebut akan sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan dari pengembangan ekonomi

lokal. Pengembangan ekonomi lokal di Kota Tual belum berjalan secara optimal hal ini terlihat dari persoalan kantibmas yang masih sering tidak kondusif, pengelolaan potensi secara tradisional, belum ada hilirisasi, minim teknologi, manajemen usaha yang tidak tertata baik serta persoalan legalitas dan tata guna lahan.

Persoalan tata guna lahan terlihat pada kondisi kontribusi kontribusi sektor pertanian pada PDRB mengalami peningkatan dari 23,74 % di tahun 2019 menjadi 39,57 % di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan peningkatan produktifitas pertanian sementara produksi perikanan dan pengelolaan pariwisata belum optimal; pada nilai produksi perikanan di Kota Tual menurun dari 33.192,28 ton pada tahun 2018 menjadi 30.124,93 ton pada tahun 2023, atau setara dengan penurunan sekitar 9,24%. Dengan berkurangnya ketersediaan ikan dan hasil laut sebanyak hampir 10%.

Ketimpangan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan juga mengakibatkan rendahnya daya saing ekonomi yang diakibatkan faktor seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan di desa, fasilitas infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan akses ke pembiayaan, keterbatasan teknologi dan inovasi dan adanya migrasi penduduk ke perkotaan.

3.1.2.2 Daya Saing Sumberdaya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia di Kota Tual diperhadapkan dengan rendahnya aksesdan kualitas pelayanan. Permasalahan akses sangat berhubungan dengan ketersediaan sarana prasarana, aspek keterjangkauan, serta aspek partisipasi yang sangat berkaitan dengan kondisi perekonomian keluarga dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan.

Daya saing sumber daya manusia Kota Tual juga sangat berkaitan dengan penyiapan tenaga kerja terampil dan berkompetan yang dapat dietrima pasar kerja. Rendahnya lapangan kerja dan tenaga kerja yang tersedia tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Hal ini terlihat pada tingkat pengangguran terbuka yang pada 3 tahun terakhir 2020-2023 yang masih menunjukan angka pengangguran yang tetap serta mencapai 3.709 pada tahun 2023.

Upaya peningkatan daya saing sumber daya manusia selain ditopang dengan ketrampilan kerja perlu didorong juga dengan layanan akses kesehatan yang berkualitas. Keterbatasan terhadap akses layanan kesehatan yang memadai khususnya pada pedesaan di Kota Tual

yang kesulitan karena factor geografis wilayah dan terbatasnya infrastruktur merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berdaya saing.

3.1.2.3 Daya Saing Iklim Investasi

Kota Tual mengarahkan pertumbuhan ekonominya yang dinamis, telah mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa iklim investasi yang ada tidak hanya kondusif tetapi juga kompetitif di tingkat regional maupun nasional. Upaya mewujudkan iklim investasi yang baik kedepan diperhadapkan dengan kondisi rendahnya pendapatan masyarakat, tingginya angka pengangguran, pengelolaan potensim sumberdaya alam tidak optimal serta pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat serta, permasalahan stabilitas kemananan dan ketertiban masyarakat masih sering terjadi di Kota Tual.

3.1.2.4 Daya Saing Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur menjadi indicator penting dalam pertumbuhan ekonomi. Kota Tual dengan ciri kepulauan permasalahan konektivitas dan aksesibilitas merupakan permasalahan mendasar. Konektivitas infrastruktur dalam satu daratan/pulau, maupun anatar pulau menjadi persoalan yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pemerataan.

Masih minimnya kinerja transportasi, terutama transportasi laut antar pulau; Jumlah pelabuhan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tual yang melayani wilayah kepulauan kini di tahun 2023 menjadi 5 dari 3 dermaga pada tahun 2013 dengan jumlah dermaga sebanyak 1, pemenuhan fasilitas dalam penunjang kinerja transportasi laut masih kurang dibandingkan dengan jumlah penumpang yang semakin meningkat, selain faktor cuaca yang secara langsung mempengaruhi akses dan kinerja pelayaran.

3.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

3.1.3.1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Angka kemiskinan masih tinggi

Kemiskinan secara umum merupakan indikasi lemahnya perekonomian dari suatu wilayah. Oleh karena itu, kemajuan pembangunan ekonomi di antaranya akan tercermin dari keberhasilan program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kota Tual dalam 5 tahun terakhir (2019–2023) mengalami fluktuasi dan

mencapai angka tertinggi pada tahun 2021 yakni sebesar 23,56 %. Kenaikan ini salah satunya diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan tercapai, dimana pada tahun 2022 berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 3 % (20,56 %). Namun, pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan menjadi 20,86 % atau 61.400 jiwa dan berada pada urutan ke-7 tertinggi di Provinsi Maluku. Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang perlu ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah Kota Tual maupun semua elemen masyarakat yang ada di Kota Tual.

Isu kemiskinan juga terkait dengan ketenagakerjaan dimana permasalahan ketenagakerjaan di Kota Tual berkaitan dengan Tingkat pengangguran masih tinggi; kurangnya database ketenagakerjaan daerah; masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang dilatih melalui pelatihan berbasis kompetensi; penyerapan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun informal masih rendah; belum adanya gedung dan sarana prasarana BLK sebagai tempat untuk peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat; dan ketersediaan lapangan kerja yang belum memadai untuk menunjang jumlah angkatan kerja yang tinggi.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan pembangunan manusia di Kota Tual yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2020. Jika di tahun 2020 angka IPM Kota Tual sebesar 70,24, di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 71,67. Namun, angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Tual masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata IPM Provinsi Maluku (72,75) maupun Nasional (74,39).

c. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka adalah masalah signifikan bagi Kota Tual, karena mencerminkan jumlah angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum terakomodir. Hal ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti peningkatan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidakstabilan ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka Kota Tual walaupun menunjukkan tren positif dari 10,91% di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 8,98% atau 8.217 jiwa di tahun 2023, masih relatif tinggi dibandingkan dengan angka TPT Provinsi Maluku (6,31%) dan Nasional ((5,32%).

Masih tingginya angka pengangguran di Kota Tual, hal ini disebabkan karena salah satu faktor yaitu penciptaan lapangan kerja baru. Jumlah pencari kerja tiap tahun meningkat, sedangkan ketersediaan lapangan kerja di Kota Tual masih kurang. Daerah dengan tingkat pengangguran tinggi sering kali mengalami penurunan produktivitas, pengurangan pendapatan pajak, dan peningkatan biaya kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penanganan pengangguran terbuka menjadi prioritas penting dalam kebijakan pembangunan daerah.

3.1.3.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Faktor kesejahteraan sosial budaya merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan daerah yang seringkali menghadirkan tantangan signifikan. Kesejahteraan sosial mencakup akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan keamanan sosial. Kurangnya akses terhadap layanan ini dapat menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memperlambat proses pembangunan daerah. Selain itu, ketimpangan sosial yang tinggi dapat memicu konflik sosial dan menurunkan kohesi sosial, yang pada akhirnya menghambat stabilitas dan kemajuan daerah.

Menjadikan Kota Tual sebagai kota yang maju dan berkembang yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas masih diperhadapkan dengan berbagai permasalahan dari pemenuhan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta ketersediaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran yang masih tinggi.

Sementara itu, faktor budaya juga memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Nilai-nilai, tradisi, dan norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi penerimaan dan efektivitas program pembangunan. Jika program pembangunan tidak selaras dengan budaya lokal atau mengabaikan kearifan lokal, program tersebut cenderung kurang efektif dan berpotensi menimbulkan resistensi dari masyarakat. Oleh karena itu, memahami dan menghormati nilai-nilai budaya lokal serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Permasalahan pelestarian budaya yang sering terjadi yaitu:

1. Menurunnya kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya melalui pendidikan di sekolah dan komunitas. Masyarakat yang lebih muda cenderung lebih tertarik pada gaya hidup modern, sementara adat istiadat dan seni tradisional mulai dilupakan atau dianggap kuno dan tidak relevan.
2. Isolasi fisik suatu wilayah kepulauan seringkali membuat akses ke budaya lokal menjadi terbatas untuk mengembangkan kegiatan budaya secara rutin atau bahkan mendokumentasikan budaya tersebut serta keterbatasan infrastruktur komunikasi dan teknologi.
3. Lemahnya perlindungan hukum terhadap warisan budaya.

3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Penataan kelembagaan pemerintah belum mencapai hasil yang maksimal. Kelembagaan pemerintah daerah telah dibentuk berdasarkan arahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 namun hal pengisian jabatan-jabatan struktural organisasi perangkat daerah masih belum efektif terisi oleh tenaga-tenaga yang kompeten sesuai dengan pengalaman dan keahlian yang dituntut oleh jabatan-jabatan tersebut, sehingga integritas dan kinerja beberapa OPD belum dapat dimaksimalkan; Tata kelola pemerintahan masih lemah, hal ini terlihat dengan adanya beberapa indikator yang masih belum tercapai dengan baik diantaranya partisipasi/keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan masih rendah. Selain itu masih terdapatnya penyimpangan penggunaan anggaran yang kurang tepat, kebijakan publik yang belum efektif, kepastian hukum serta rendahnya koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan yang mana mekanisme koordinasi yang baik tentunya tidak menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

3.1.4.1. Kualitas pelayanan publik

Kualitas pelayanan publik yang belum berjalan baik terlihat pada belum optimalnya pelayanan perangkat daerah di dari tata kelola pemerintahan Kota Tual. Belum optimalnya pelayanan perangkat daerah di berbagai urusan (kesehatan, kecamatan/kelurahan, ketentraman, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perpustakaan, perhubungan, perdagangan). Beberapa perangkat daerah belum mendasarkan pelayanannya pada standar operasional prosedur serta mengakomodir perubahan peraturan pelayanan-pelayanan masyarakat terbaru.

3.1.4.2 Pemanfaatan sistem berbasis digital

Pemanfaatan sistem berbasis digital dalam pemerintahan, yang dikenal sebagai *e-government* atau pemerintahan elektronik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi dalam layanan pemerintah. Pemerintah dapat memanfaatkan sistem berbasis digital untuk Layanan *Online*, Portal Pemerintah, Sistem Manajemen Kepegawaian, *e-Procurement*, Partisipasi publik, keamanan data, dan *smart city*.

Dalam rangka memperkuat Sistem Inovasi nasional (SINas) maka diperlukan dukungan dari tingkat lebih bawah atau daerah. Dukungan tersebut dapat diimplementasikan dengan sistem inovasi daerah (SIDa) yang merupakan bagian integral dari penguatan sistem inovasi nasional. Terdapat beberapa implementasi SIDa di Kota Tual yang belum optimal seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Informasi Manajemen Pertanahan, Sistem Informasi Puskesmas, SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), SINAS, Informasi Kependudukan, dan lain-lain.

3.1.4.3 Koordinasi antar lembaga

Permasalahan tata kelola yang sering terjadi yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga, permasalahan ini menjadi ermasalahn umum yang sering terjadi di tiap daerah. Sperti halnya pada Kota Tual, hal ini merujuk pada kurangnya komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga atau departemen yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kebijakan atau tugas dalam sebuah entitas. Dampak dari kurangnya koordinasi antar lembaga dapat berdampak negatif pada efisiensi, efektivitas, dan pengambilan keputusan.

Kurangnya koordinasi antar Lembaga di Kota Tual disebabkan karena belum optimalnya fungsi beberapa perangkat daerah sebagai koordinator/fasilitator antar perangkat, belum tersedianya sistem logistik (penyediaan dan distribusi) pangan serta koordinasi dan sinkronisasi pengelolaannya, rendahnya koordinasi ketahanan pangan, minimnya pengawasan keamanan pangan, minimnya pengawasan penanaman modal, serta berbagai fungsi koordinasi yang terhambat. Koordinasi dan sinkronisasi antar urusan layanan publik merupakan suatu keharusan dalam memecahkan masalah multisektor. Apabila hal ini tidak diselesaikan, maka akan ada banyak program pembangunan yang tumpang tindih dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah. Selain itu, pencapaian target kinerja daerah juga tidak akan tercapai jika terdapat kekosongan koordinasi.

3.2. Isu Strategis

3.2.1. Isu Strategis Internasional

Perencanaan pembangunan daerah menuntut berbagai macam intervensi dan penanganan yang termanifestasi dalam program dan penganggaran. Intervensi dan penanganan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tersebut dan isu-isu strategis di daerah. Berbeda dengan permasalahan, isu strategis mencakup potensi dampak yang dapat ditimbulkan serta signifikansi dari dampak tersebut terhadap pembangunan dan operasional daerah tersebut. Signifikansi dampak atau potensinya dinilai berdasarkan urgensi, luasan, intensitas, dan jumlah masyarakat atau penduduk yang dapat terdampak dari isu tersebut. Selain itu, isu strategis juga memiliki cakupan yang lebih umum dan dapat terkait antara satu isu dengan isu yang lain baik secara longitudinal (horizontal) maupun hirarkikal (vertical).

Karena dampaknya, isu strategis juga terkait dengan proyeksi dan tujuan serta mitigasi suatu daerah di masa mendatang. Oleh sebab itu, perumusan isu strategis menjadi sangat krusial dalam suatu perencanaan daerah sebagai landasan dalam memperkirakan tren dan tantangan atau permasalahan yang dapat muncul di masa atau tahun-tahun berikutnya.

3.2.1.1 Kemiskinan Global

Kemiskinan global adalah masalah kompleks dan mendalam yang mempengaruhi miliaran orang di seluruh dunia. Kemiskinan global merupakan kondisi ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, seperti makanan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dalam konteks pendapatan, kemiskinan ditunjukkan dengan keluarga hidup dengan pendapatan yang jauh di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi internasional.

Kemiskinan seringkali terkait dengan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya di seluruh dunia. Beberapa negara atau wilayah memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, dan ada kesenjangan yang tajam antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat. Ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan global, termasuk konflik bersenjata, perubahan iklim, ketidakstabilan politik, kurangnya akses ke pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, dan layanan kesehatan yang memadai.

Ketidaksetaraan gender juga berperan dalam memperburuk kemiskinan bagi perempuan di banyak bagian dunia. Kemiskinan memiliki dampak yang merusak baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Dampaknya meliputi kelaparan, penyakit, ketidaksetaraan pendidikan, dan kurangnya akses ke layanan dasar. Ini juga dapat memicu konflik sosial, migrasi paksa, dan berbagai masalah sosial lainnya.

Banyak organisasi internasional, pemerintah, dan LSM telah berusaha mengatasi kemiskinan global melalui program-program bantuan, pembangunan ekonomi, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan upaya-upaya lainnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB mencakup penurunan kemiskinan global sebagai salah satu target utama. Kemiskinan global masih menjadi tantangan besar di masa depan, terutama mengingat berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan iklim, krisis kesehatan global, dan perubahan teknologi juga akan memengaruhi dinamika kemiskinan global.

3.2.1.2 Perubahan Iklim

Perubahan iklim global semakin menjadi salah satu isu terbesar dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Integrasi perubahan iklim dalam perencanaan sangat penting untuk memastikan ketahanan dan keberlanjutan sistem sosial-ekonomi dan lingkungan. Sektor energi dan pangan sebagai sektor yang terdampak langsung. Energi menjadi sorotan mengingat sektor ini menyumbang gas rumah kaca (GRK) yang turut berkontribusi pada pemanasan global. Gangguan terhadap cuaca dan semakin tidak terprediksi juga mengganggu panen dan produksi bahan pangan dan hasil perikanan.

Melalui *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* atau Persetujuan Paris atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim bahwa negara G20 disarankan untuk menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca sebagai bentuk untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, peran daerah Kota Tual penting dalam berkontribusi melaksanakan kegiatan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca di berbagai sektor.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis yang tertuang dalam perencanaan jangka panjang Nasional lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti

perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subjek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Adapun isu-isu strategis RPJP Nasional Tahun 2025–2045 antara lain:

Tabel 3.1 Isu strategis Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025–2045

KATEGORI ISU	ISU DAN TANTANGAN
Ekonomi	1. Produktivitas rendah 2. Kemiskinan 3. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian relatif rendah 4. Ketimpangan wilayah masih cukup tinggi 5. Penerapan ekonomi hijau yang masih terhambat
Sosial Budaya	1. Angka ketergantungan meningkat 2. Pembangunan kesehatan yang belum optimal 3. Kualitas pendidikan yang masih rendah dan belum merata karena disparitas pendidikan 4. Masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya RDTR kabupaten/kota yang tersedia
Tata Kelola	1. Tata kelola pemerintah yang kurang efektif dan akuntabel 2. Belum meratanya kualitas pelayanan publik 3. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan berbagai tantangan mendasar 4. Lemahnya tata kelola dan koordinasi antarlembaga
Infrastruktur	1. Pembangunan infrastruktur yang masih rendah 2. Kesenjangan pembangunan sarana prasarana dasar antara jawa dan luar jawa 3. Belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau
Lingkungan	1. Sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. 2. Terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, 3. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan 4. Tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan.

KATEGORI ISU	ISU DAN TANTANGAN
	5. Masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS).

3.2.3 Isu Strategis Maluku

Menghadapi dinamika pembangunan tahun 2025–2045, Provinsi Maluku perlu mengatasipermasalahan yang ada dengan strategi dan kebijakan yang tepat, isu – isu strategis harus menjadi fokus dalam upaya memanfaatkan potensi yang dimiliki dan menghadapi tantangan yang munculsehingga Provinsi Maluku dapat mencapai perkembangan dan kemajuan yang berkelanjutan.

3.2.3.1 Tingkat Perekonomian Daerah Rendah.

Perekonomian Maluku yang cenderung bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan menjadi tantangan dalam peningkatan ekonomi daerah dimana masyarakat hanya dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan ekonomi. Upaya pemerintah untuk mengatasi ketergantungan tersebut adalah melalui hilirisasi dan diversifikasi ekonomi, hal ini diperlukan untuk menciptakan nilai tambah dan ketahanan ekonomi.

3.2.3.2 Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Terbatas.

Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui transformasi pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang kompetitif. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan melalui pengembangan pengelolaan sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

3.2.3.3 Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah.

Kondisi daerah Maluku yang berciri kepulauan merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur layanan dasar selama

kurun waktu 10 tahun terakhir hanya berfokus pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan minimnya pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar yang bersumber dari APBD maupun APBN. Kurangnya pendanaan dalam pembangunan juga berdampak pada kebijakan pembangunan infrastruktur digital khususnya di wilayah 3T di Provinsi Maluku.

Untuk itu dalam tahapan pembangunan jangka panjang pemerataan pembangunan infrastruktur layanan dasar termasuk pembangunan infrastruktur ketahanan bencana dan pengembangan literasi digital melalui perluasan akses telekomunikasi menjadi bagian dari tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku.

3.2.3.4 Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Instabilitas Sosial.

Pendidikan dan kesadaran budaya menjadi bagian dalam pembangunan kebudayaan yang kuat dan berkelanjutan di Provinsi Maluku. penguatan kebudayaan dapat mencakup pengembangan kurikulum pendidikan yang memasukkan aspek budaya, pelatihan guru, dan program kesadaran budaya yang melibatkan masyarakat dan generasi muda. Permasalahan pembangunan budaya di Provinsi Maluku yang dihadapkan dengan masih diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam rangka mengembangkan nilai – nilai budaya lokal serta memperkuat modal sosial untuk meningkatkan stabilitas kemandirian merupakan tantangan kedepan untuk dapat diwujudkan dalam kebijakan pembangunan daerah yang adaptif dan berkelanjutan.

3.2.3.5 Kesenjangan Antar Wilayah.

Bersamaan dengan percepatan pembangunan di Provinsi Maluku, perlu dilakukan pemerataan pembangunan karena masih terdapat ketimpangan antar wilayah tercermin dari perbedaan PDRB per kapita antar kabupaten/kota. Disparitas ekonomi antar kabupaten/kota, antara perkotaan dan perdesaan turut menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap layanan dasar, peluang kerja dan kesejahteraan sosial. Pemerataan factor-faktor produksi seperti sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi perlu dilakukan. Percepatan pembangunan pada wilayah-wilayah yang relatif tertinggal diharapkan dapat mendorong konvergensi pembangunan antar wilayah.

3.2.3.6 IPTEKIN dan Riset Lemah.

Produktivitas pemanfaatan sumber daya alam unggulan masih relatif rendah karena belum didukung teknologi, inovasi dan riset yang memadai serta sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas. Ekosistem riset, IPTEK dan inovasi yang lemah berakibat pada kurangnya hasil-hasil riset berkualitas dan aplikatif.

3.2.3.7 Kemitraan Dalam Pembangunan Belum Optimal.

Kemitraan memungkinkan kesempatan baru untuk melakukan pembangunan dengan cara lebih baik dengan mengidentifikasi kualitas dan kompetensi masing-masing sektor dan menemukan mekanisme baru untuk kebaikan bersama. Dengan kemitraan dalam pembangunan melalui kerjasama kolaboratif dan inovatif dapat menghasilkan metode/inovasi dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan termasuk akses kepada sumber daya (teknis, manusia, pengetahuan, maupun anggaran).

Terbangunnya jejaring kemitraan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, donor, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat binaan), akan menciptakan mekanisme yang lebih kaya akan kapasitas spesifik yang dapat disumbangkan atau diperankan oleh pihak-pihak yang terlibat.

3.2.3.8 Risiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah.

Integrasi adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana merupakan tantangan yang perlu disinergikan dalam sistem pembangunan. Kebijakan adaptasi perubahan iklim dengan turut mempertimbangkan risiko bencana diperlukan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mengurangi kerentanan (mitigasi) dan meningkatkan kapasitas (kesiapsiagaan).

3.2.4 Isu Regional Kota Tual

3.2.4.1 Telaah KLHS Kota Tual

Kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan RPJPD Kota Tual digunakan untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJPD Kota Tual Tahun 2025 – 2045, serta untuk menjaga keberlangsungan

sumber daya dan menjamin kemampuan, keselamatan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang melalui RPJPD. Implementasinya adalah bahwa hasil KLHS RPJPD dapat menjadi bahan pertimbangan dalam dokumen RPJPD maupun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Tual. Berikut muatan yang perlu disinergikan dengan RPJPD Kota Tual:

1. Isu Pencegahan degradasi kualitas dan kuantitas lingkungan; Penyediaan dan peningkatan layanan infrastruktur wilayah *diperlukan*: pembangunan wilayah yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.
2. Isu Penanggulangan Bencana; Ketahanan Pangan Masyarakat *diperlukan*: Pembangunan Kota Tual yang tanggap dan tahan terhadap risiko bencana serta tahan terkait pemenuhan pangan.
3. Isu Penguatan sosial budaya dan gender; Peningkatan layanan pendidikan dan kualitas SDM *diperlukan*: Pengembangan Kota Tual harus berorientasi pengembangan Sumberdaya Manusia yang mampu bersaing dan menciptakan peluang baik skala regional, nasional hingga global.
4. Isu Peningkatan layanan dan aksesibilitas kesehatan; Penanganan Kemiskinan, Pengembangan ekonomi local *diperlukan*: Konsep kesejahteraan yang menunjukkan bahwa pembangunan tersebut berfokus pada meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduknya.
5. Isu Optimalisasi Tata Kelola Hukum dan Pemerintahan Daerah *diperlukan*: Pengembangan wilayah harus dirasakan oleh semua pihak dan bermuara pada penurunan kesenjangan di masyarakat.

3.2.4.2 Telaah RTRW Kota Tual

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tual 2012-2032, rencana peruntukan penggunaan lahan di Kota Tual terdiri dari kawasan Lindung dengan luas kurang lebih 11.755 ha dan kawasan Budidaya dengan luas kurang lebih 11.853 ha. Kawasan Lindung terdiri dari hutan lindung seluas 8.295 ha, kawasan resapan air seluas 1.419 ha, kawasan perlindungan setempat, kawasan ruang terbuka hijau seluas 2.815 ha, kawasan suaka alam-pelestarian alam & cagar budaya seluas 181 ha, kawasan rawan bencana alam serta kawasan lindung lainnya seluas 22.949 ha. Kawasan budidaya meliputi kawasan perumahan seluas

1.903 ha, peruntukan perdagangan dan jasa seluas 13 ha, kawasan perkantoran seluas 76 ha, peruntukan industri seluas 95 ha, peruntukkan pariwisata seluas 87 ha, ruang terbuka non hijau seluas 154 ha, ruang evakuasi bencana yaitu berupa perbukitan di pulau Dullah, Tayando & pulau pulau Kur, peruntukan kegiatan sektor informal seluas 5 ha dan kawasan peruntukan lainnya seluas 212.832 ha.

Tabel 3.2 Keselarasan Isu Strategis RPJPD Kota Tual dengan KLHS RPJPD

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan pada KLHS RPJPD	Isu Strategis Daerah (RPJPD)
1. Pencemaran dan degradasi Lingkungan	1. Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia, Kualitas Kependudukan, dan Penguatan Budaya
2. Tingginya tingkat kerentanan bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim	2. Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Berintegritas, Profesional, dan Melayani
3. Alih fungsi lahan dan ancaman penurunan keanekaragaman hayati	3. Infrastruktur Publik yang belum Memadai
4. Kemiskinan dan Pengangguran masih tinggi	4. Rendahnya Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
5. Penurunan kuantitas dan kualitas air bersih	5. Belum Optimalnya Hukum yang Berkeadilan, Keamanan Sosial, dan Regulasi yang Adaptif
6. Tata kelola pemerintahan dan kearifan dan budaya kearifan lokal yang belum optimal	6. Rendahnya Pembangunan Daya Saing Usaha Daerah
7. Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan terbatasnya infrastruktur wilayah	7. Kerusakan Ekosistem Berkelanjutan

Perencanaan pembangunan daerah Kota Tual juga memperhatikan isu strategis Global, Nasional, dan regional Maluku.

Tabel 3.3 Isu Strategis Global, Nasional, Maluku dan Kota Tual

Isu Strategis Global (TPB/SDGs)	Isu Strategis Nasional RPJPN	Isu Strategis Provinsi Maluku (RPJPD Maluku)	Isu Strategis Daerah (RPJPD)
1. Tanpa Kemiskinan	1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas,	1. Tingkat Perekonomian Rendah	1. Masih Rendahnya Sumber Daya

2. Tanpa Kelaparan (Pangan dan Gizi) 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4. Pendidikan Berkualitas 5. Kesetaraan Gender 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak 7. Energi Bersih dan Terjangkau 8. Pertumbuhan ekonomi dan Kesempatan Kerja 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur 10. Berkurangnya Kesenjangan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 13. Perubahan Iklim 14. Ekosistem Lautan 15. Ekosistem Daratan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh 17. Kemitraan global	produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial 3. Isu tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas 4. Isu supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh 5. Isu ketahanan sosial budaya dan ekologi 6. Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi 7. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan, penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas	2. SDM Berdaya Saing Terbatas 3. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah 4. Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Instabilitas Sosial 5. Kesenjangan antar Wilayah 6. IPTEKIN dan Riset Lemah 7. Kemitraan Dalam Pembangunan Belum Optimal 8. Risiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah	Manusia, Kualitas Kependudukan, dan Penguatan Budaya 2. Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Berintegritas, Profesional, dan Melayani 3. Infrastruktur Publik yang belum memadai 4. Rendahnya Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 5. Belum Optimalnya Hukum yang Berkeadilan, Keamanan Sosial, dan Regulasi yang Adaptif 6. Rendahnya Pembangunan Daya Saing Usaha Daerah 7. Kerusakan Ekosistem Berkelanjutan
--	--	---	---

3.2.4.3 Isu Strategis Kota Tual

1. Sumber Daya Manusia, Kualitas Kependudukan, dan Penguatan Budaya

Isu peningkatan sumberdaya manusia, kualitas kependudukan dan penguatan budaya sangat penting dalam konteks pembangunan suatu daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Masing-masing isu ini memiliki keterkaitan erat dan saling mempengaruhi dalam membentuk daya saing dan kesejahteraan. Strategi yang integratif dan berkelanjutan akan mendukung terciptanya pembangunan yang lebih maju, sejahtera, dan berbudaya. Implementasi kebijakan yang proaktif, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat menjadi kunci dalam memajukan ketiga aspek tersebut secara bersamaan.

Meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkat (dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi) menjadi kunci. Pendidikan yang tidak merata antar wilayah dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah kepulauan. Oleh karena itu, perlu ada upaya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitasnya.

Aspek kesehatan juga sangat penting untuk mendukung produktivitas sumberdaya manusia, terutama untuk ibu dan anak. Program-program kesehatan yang menysasar gizi anak, pencegahan penyakit, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan dapat memastikan SDM yang sehat dan produktif serta mencegah stunting. Bonus demografi menjadi isu, di mana proporsi penduduk usia produktif cukup tinggi. Namun, ini hanya akan menjadi keuntungan jika didukung dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Ketika tidak ada persiapan yang cukup, tantangan bisa muncul dalam bentuk pengangguran dan ketimpangan sosial.

Seiring dengan modernisasi dan globalisasi, ada potensi hilangnya nilai-nilai budaya lokal, sehingga penting untuk memperkuat kebijakan yang mendukung pelestarian budaya lokal, adat istiadat, dan bahasa daerah sebagai warisan yang harus dijaga seperti bagaimana menjaga jati diri budaya lokal *Budaya Maren*.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Berintegritas, Profesional, dan Melayani

Isu tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, profesional dan melayani merupakan landasan penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi elemen krusial dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup

rakyat. Meningkatkan mekanisme pengawasan internal di setiap instansi pemerintah, serta memastikan laporan keuangan dan kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penguatan manajemen sumber daya manusia bagi aparatur, serta penerapan standar kerja yang jelas dan adil untuk memastikan pelayanan publik yang optimal.

Akses Informasi Publik secara digital untuk menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi terkait kebijakan publik, anggaran, dan penggunaan sumber daya negara. Peningkatan sistem *e-Government* dan platform digital untuk mempermudah akses sangat penting. Selain itu, mempercepat implementasi *e-Government* untuk menyediakan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, seperti layanan pembuatan dokumen administrasi, perizinan, atau layanan kesehatan.

3. Infrastruktur Publik yang Memadai

Penyediaan sarana dan prasarana wilayah termasuk infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan guna memperkuat aksesibilitas dan konektivitas termasuk meningkatkan perluasan dan pemerataan cakupan layanan akses infrastruktur dasar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sanitasi, air bersih jaringan energi (listrik), drainase, sistem transportasi terintegrasi, Aglomerasi (pengelompokan aktifitas ekonomi dalam kawasan tertentu) dan perbaikan jalan serta sarana prasarana jalan merupakan target yang selalu diupayakan untuk pemenuhan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat.

4. Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sektor unggulan perikanan, pertanian dan pariwisata yang masih menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat Kota Tual, perlu didorong melalui modernisasi, peningkatan produktivitas, dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, untuk peningkatan perekonomian daerah. Hilirisasi dan pengolahan pasca panen dengan pengembangan industri termasuk industri kreatif berikut aspek pemasaran yang didukung pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan riset.

5. Hukum yang Berkeadilan, Keamanan Sosial, dan Regulasi yang Adaptif

Hukum yang berkeadilan adalah landasan utama bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial. Dengan mendorong kerukunan antar kelompok sosial, etnis, dan agama. Ini bisa dicapai dengan memperkuat pendidikan karakter dan kebhinnekaan, serta menanggulangi intoleransi dan ekstremisme di Kota Tual.

Kemampuan sistem hukum dan kebijakan publik dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, pemerintah perlu merancang kebijakan yang tidak hanya responsif tetapi juga proaktif terhadap perubahan zaman. Pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil hanya bisa terwujud jika ketiga aspek ini—hukum yang adil, keamanan sosial, dan regulasi yang adaptif—dikelola dengan baik dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan masa depan.

6. Pembangunan Daya Saing Usaha Daerah

Mendorong daerah untuk terus berinovasi, baik dalam hal produk, proses, maupun model bisnis. Riset dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan produk-produk yang lebih unggul dan memenuhi kebutuhan pasar local maupun keluar Kota Tual. Dengan memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir untuk menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi. Hal ini mencakup peningkatan kualitas bahan baku, efisiensi produksi, dan pemasaran yang efektif dengan memperhatikan ciri khas dan keunikan (seperti produk kerajinan tangan, produk pertanian organik, atau kuliner lokal) sehingga dapat bersaing di pasar global. Yang tidak kalah penting yaitu peningkatan akses dan kualitas jaringan internet di seluruh daerah, terutama di wilayah terpencil, agar pelaku usaha dapat memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan penjualan dan efisiensi usaha.

7. Ekosistem Berkelanjutan

Kerusakan ekosistem berpotensi meningkatkan kerawanan sosial dan ketimpangan ekonomi, terutama bagi masyarakat Kota Tual yang masih sangat bergantung langsung pada sumber daya alam, seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat. Sebagai daerah kepulauan, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan suhu global, peningkatan intensitas bencana alam (badai, banjir, kekeringan), dan peningkatan permukaan laut yang mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Perubahan iklim memengaruhi pola cuaca yang berdampak pada ketahanan pangan dan ketersediaan air. Perubahan suhu dan curah hujan dapat mengurangi hasil pertanian dan merusak ekosistem alami yang mendukung kehidupan, seperti lahan gambut, padang

rumput, dan ekosistem pesisir. Perlu kebijakan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, peningkatan kesadaran lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan bertanggung jawab serta, meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim secara berkelanjutan.



4

VISI & MISI

Visi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) adalah pandangan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu daerah dalam jangka waktu yang panjang atau 20 tahun. Visi ini menjadi panduan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Visi Indonesia Emas Tahun 2045 adalah sebuah target ambisius yang diusung oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai status negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan tepat pada perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Visi ini berfokus pada beberapa pilar utama, seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, pemerataan pembangunan, dan penguatan ketahanan nasional. Implementasi visi ini sangat penting bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perumusan visi Kota Tual berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Maluku dengan memperhatikan kondisi global, nasional dan regional, permasalahan dan isu serta potensi Kota Tual.

Dengan mempedomani RPJP nasional dan provinsi serta pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti disebutkan diatas, Kota Tual dapat menyeleraskan tujuan dan strategi pembangunan sehingga ada kesinambungan antara kebijakan pusat dan daerah, dan memastikan seluruh Indonesia bergerak menuju tujuan yang sama, meminimalkan tumpang tindih kebijakan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam konteks

RPJPD Kota Tual, landasan dan pertimbangan tersebut akan membantu Kota Tual dalam memprioritaskan pembangunan yang sesuai dengan target provinsi dan nasional. Dengan arahan dari visi nasional, provinsi dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, Kota Tual dapat lebih fokus dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1 Visi Kota Tual Tahun 2025-2045

Selain pertimbangan dan landasan yang dipedomani dalam perumusan visi pembangunan Kota Tual, hasil pembahasan KLHS berupa rekomendasi juga menjadi rujukan yang diintegrasikan dalam perencanaan strategis. Visi pembangunan ini dirancang untuk mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan, menekankan pada aspek ketahanan, daya saing, kesejahteraan, dan keadilan. Rekomendasi Visi ini, yang bersinergi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*), mengarahkan Kota Tual untuk mencapai pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan memfokuskan pada pembangunan yang tanggap terhadap risiko bencana, pengembangan sumber daya manusia yang mampu bersaing, serta peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan, Kota Tual berkomitmen untuk menciptakan sebuah pembangunan berkelanjutan, yang mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal serta memenuhi standar global dalam pembangunan berkelanjutan.

Visi Pembangunan Kota Tual dirumuskan dengan mempertimbangkan rekomendasi KLHS RPJPD Kota Tual, yang tentunya berdasarkan permasalahan dan isu strategis global, nasional dan regional yang dihadapi. Visi pembangunan Kota Tual juga telah diselaraskan dengan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Maluku dan visi jangka panjang nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan Kota Tual selaras dengan arah dan tujuan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, Visi Pembangunan Kota Tual tidak hanya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan spesifik lokal tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, menciptakan keseimbangan antara pembangunan daerah dan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dengan mempedomani Visi Indonesia Emas 2045 yaitu **Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan** dan Visi Maluku Emas 2045 **Maluku**

Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan, maka visi jangka panjang Kota Tual untuk 20 tahun ke depan harus merupakan penyelarasan dari kedua visi diatas.

Visi Kota Tual 2045

“KOTA MARITIM YANG MAJU, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN”

4.1.1 Pengertian Visi

MARITIM, menggambarkan kondisi dimana sumberdaya pesisir dan laut menjadi pilar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas masyarakat dengan tetap mengembangkan sumber daya alam darat yang tersebar pada gugusan pulau-pulau kecil. Hal ini mencakup pengembangan industri maritim seperti pelayaran, perikanan, dan wisata bahari, penerapan praktik lingkungan berkelanjutan, memajukan inovasi dan teknologi, dan memperkuat konektivitas. Dengan pengembangan budaya maritim, membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, memastikan tata kelola yang efektif bertujuan untuk mengubah kota ini menjadi pusat yang dinamis, tangguh, dan sejahtera yang memanfaatkan warisan dan sumber daya maritimnya untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan.

MAJU, merupakan pencerminan dari kondisi dimana inovasi, pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi sebagai wujud Kota Tual. Hal ini didasarkan pada prinsip **Adil, Sejahtera** dan **Berbudaya**. **Adil** mencerminkan keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Mewujudkan inklusif yang memastikan semua orang merasa dihargai, diterima, dan memiliki akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya. **Sejahtera**, menggambarkan kondisi dimana masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata. Dengan kesejahteraan yang diperoleh maka meningkatnya ketahanan budaya dan sosial masyarakat berdasarkan nilai luhur dari budaya lokal, meningkatnya kehidupan masyarakat menjadi tertib, taat hukum, aman, dan harmonis. **Berbudaya**,

mencerminkan masyarakat berbudaya kuat dengan prinsip jati diri budaya yang kokoh. Budaya Maren menjadi nilai utama masyarakat Kota Tual. Dengan budaya yang kuat dan dipegang sebagai pondasi pembangunan, maka Kota Tual akan mampu untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan.

BERDAYA SAING, merupakan pencerminan dari kota yang memiliki kapasitas inovasi, daya tarik bagi dunia usaha dan investasi dan kinerja perekonomian yang baik. 3 prinsip yang mendasari visi ini adalah **kolaboratif, inovatif dan produktif**. **Kolaboratif**, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka menata, mengembangkan, mempercepat, dan mewujudkan pembangunan Kota Tual, dan mampu menjalin komunikasi yang luas dengan berbagai pihak dalam menjalin kerjasama pembangunan yang inklusif; **inovatif**, memiliki sumber daya manusia yang berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global; **produktif**, peka dan cepat beradaptasi dengan kemajuan zaman yakni teknologi. Dengan teknologi akan menghasilkan infrastruktur yang mantap dan merata, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang melayani secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mampu memiliki daya saing daerah dari potensi kemajuan yang dimiliki baik dari sektor alam, manusia, maupun budaya sehingga dapat bersaing pada dalam dan luar negeri.

BERKELANJUTAN, merupakan gambaran tentang keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan dan kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan sosial untuk menjamin kualitas hidup yang tinggi. Kondisi ini juga mencerminkan Kota Tual memiliki kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, daya saing yang tinggi di kancah dalam dan luar negeri, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan situasi kondisi, serta memiliki sistem keadilan sosial yang kuat. Visi ini juga menekankan penerapan teknologi ramah lingkungan, sumber energi terbarukan, dan praktik perencanaan kota berkelanjutan untuk mengurangi jejak karbon kota dan melestarikan sumber daya alam, yang juga merupakan gambaran tentang kesiapan Kota Tual dan wilayahnya yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau kecil meningkatkan ketahanan kota dan wilayah dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

4.1.2 Sasaran Visi

Dalam merealisasikan visi Kota Tual tersebut di atas, maka diperlukan sasaran visi daerah yang dirumuskan menjadi 5 (lima) yang telah disesuaikan dengan sasaran pada visi RPJPN 2025-2045 dan disesuaikan dengan karakteristik daerah. Adapun sasaran pada visi RPJPD Kota Tual, sebagai berikut:

- **Pendapatan Per Kapita**

Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang tingkat kemakmuran ekonomi masyarakat suatu daerah atau negara. Sebagai salah satu indikator penting, dalam RPJPN 2025-2045 ditargetkan pendapatan per kapita Indonesia setara dengan negara maju. Begitu halnya dengan RPJPD Provinsi Maluku 2025-2045 dengan 3 (tiga) indikator yakni PDRB per Kapita, Indonesia Blue Economy Index dan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan.

Tabel 4.1. Sasaran Visi Pendapatan Per Kapita Meningkat

RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045				RPJPD Kota Tual Tahun 2025 – 2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Pendapatan Per Kapita Meningkat	PDRB per Kapita (Rp Juta)	33,11 – 33,26	146,98 – 219,94	Pendapatan Per Kapita Meningkat	PDRB per Kapita (Rp Juta)	36,84	74,05 – 114,48
	Indonesia Blue Economy Index (Indeks)	55,18	98,29		Indonesia Blue Economy Index (Indeks)	ditentukan kemudian	ditentukan kemudian
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	6,50 – 6,64	8,14 – 8,95		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	1,78	4,41 – 5,00

- **Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah**

Dalam RPJPD Provinsi Maluku, setelah dilakukan penyelarasan terdapat 3 (tiga) indikator yakni Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini dan Kontribusi PDRB untuk menjawab sasaran visi Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang. Hal ini menjadi pedoman bagi Kota Tual dalam menetapkan sasaran visi dan indikator.

Tabel 4.2. Sasaran Visi Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang

RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045				RPJPD Kota Tual Tahun 2025 – 2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	13,01 – 13,51	0,32 – 0,82	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	18,95	4,15 – 4,95
	Rasio Gini (Indeks)	0,282 – 0,287	0,220 – 0,243		Rasio Gini (Indeks)	0,302	0,244 – 0,267
	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,28	0,24		Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	5,40	6,00 – 8,00

- Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah menjadi salah satu sasaran visi RPJPD Kota Tual 2025-2045, dan setelah dilakukan penyelarasan dengan RPJPD Maluku, terdapat 2 (dua) indikator untuk mencapai sasaran tersebut, yakni Indeks Kepemimpinan Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah.

Tabel 4.3. Sasaran Visi Daya Saing Daerah

RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045				RPJPD Kota Tual Tahun 2025 – 2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Daya Saing Daerah di Tingkat Nasional Meningkat	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Kategori)	Sedang	Sangat Tinggi	Daya Saing Daerah di Tingkat Provinsi Meningkat	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Kategori)	Sedang	Tinggi
	Indeks Daya Saing Daerah	20 Besar (2023)	15 Besar		Indeks Daya Saing Daerah	5 Besar Provinsi	3 Besar

- Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Daya saing sumberdaya manusia merupakan salah satu sasaran visi yang cukup menentukan keberhasilan visi Kota Tual, dengan 2 (dua) indikator yakni Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Modal Manusia. Penentuan sasaran visi ini merupakan penyelarasan dari visi Provinsi Maluku.

Tabel 4.4. Sasaran Visi Daya Saing Sumberdaya Manusia

RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045				RPJPD Kota Tual Tahun 2025 – 2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	74,72	Di Atas 85,00	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	69,53	>75
	Indeks Modal Manusia	0,48	0,62		Indeks Modal Manusia	ditentukan kemudian	ditentukan kemudian

- **Intensitas Emisi GRK**

Net Zero Emission menjadi target pemerintah di Tahun 2045, dan target ini hanya dapat dicapai oleh kontribusi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Oleh karena itu, intensitas emisi GRK menjadi salah satu sasaran visi Kota Tual.

Tabel 4.5. Sasaran Visi Intensitas Emisi GRK

RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045				RPJPD Kota Tual Tahun 2025 – 2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Intensitas Emisi GRK Menurun menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	42,88	100	Intensitas Emisi GRK Menurun menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	ditentukan kemudian	ditentukan kemudian
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,43	88,72		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,60	79,09

4.2 Misi

Misi dirumuskan untuk mewujudkan visi Kota Tual 2045. Perumusan misi disusun dengan berpedoman pada misi nasional dan misi Provinsi Maluku yang tertuang dalam Delapan Misi (Agenda) Pembangunan Nasional dan Maluku 2045 dan dalam upaya mewujudkan **Kota Maritim yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan**, telah dirumuskan 5 (lima) misi Pembangunan sebagai berikut.

Misi Nasional	Maluku	Tual
TRANSFORMASI INDONESIA		
1 Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2 Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Adil dan Merata
3 Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum yang Cepat, Bersih, Efektif dan Adaptif
LANDASAN TRANSFORMASI		
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Daerah	
4 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi
IMPLEMENTASI TRANSFORMASI		
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Infrastruktur Publik, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
5 Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	

Gambar 4.1
Misi Kota Tual 2025-2045

4.2.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi ini merupakan perwujudan dari Agenda Pembangunan Transformasi Sosial, dengan gambaran sebagai berikut:

Aspek sumberdaya manusia (SDM) merupakan hal yang krusial karena manusia merupakan aktor dalam pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia Kota Tual yang sehat, cerdas, trampil dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar didukung dengan implementasi perlindungan sosial yang adaptif untuk menghadirkan keadilan bagi semua. Pangan yang diarahkan untuk pemenuhan pola pangan harapan, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang mudah, murah dan terjangkau serta sanitasi, air bersih dan listrik yang memadai merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi, termasuk upaya peningkatan pendapatan keluarga yang berpendapatan dibawah garis kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Indikator kualitas kesehatan Kota Tual ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya kemampuan manajemen tuberculosis, meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, meningkatnya angka penyandang disabilitas bekerja di sektor formal. Sedangkan pendidikan terkait dengan Pendidikan berkualitas yang merata dapat ditandai dengan meningkatnya literasi membaca, meningkatnya numerasi,

meningkatnya angka pendidikan khusus dan angka pendidikan murni, meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi;

- a. Kesehatan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya kemampuan manajemen tuberculosis, meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, meningkatnya angka penyandang disabilitas bekerja di sektor formal;
- b. Pendidikan berkualitas yang merata dapat ditandai dengan meningkatnya literasi membaca, meningkatnya numerasi, meningkatnya angka pendidikan khusus dan angka pendidikan murni, meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi.

4.2.2 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Adil dan Merata

Merupakan pendekatan yang bertujuan mewujudkan Agenda Pembangunan Transformasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata suatu daerah sangat berdampak pada berbagai aspek terutama terhadap peningkatan kesejahteraan. Perekonomian daerah yang maju ditandai dengan meningkatnya produktivitas daerah yang didukung oleh peningkatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, hilirisasi sektor unggulan, pengembangan industri berbasis sumberdaya lokal, pariwisata, usaha mikro dan koperasi serta pelibatan multipihak yang didukung ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan riset.

- a. Penguatan ekonomi Kota Tual melalui sektor unggulan (kelautan dan perkebunan), ditandai dengan meningkatnya hilirisasi produk atau dengan kata lain peningkatan rasio PDRB industri pengolahan, meningkatnya rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum, meningkatnya proporsi jumlah UMKM, meningkatnya pembentukan modal tetap bruto, meningkatnya jumlah ekspor barang dan jasa, dan meningkatnya ekspor barang dan jasa;
- b. Penguatan kelembagaan perekonomian, Inovasi, iptek, dan produktivitas perekonomian lainnya, digambarkan dengan meningkatnya jumlah tamu wisatawan mancanegara dan domestik, meningkatnya proporsi PDRB ekonomi kreatif,

- meningkatnya jumlah tingkat penguasaan iptek, meningkatnya indeks ekonomi hijau, meningkatnya tanaman pangan;
- c. Lapangan kerja yang luas ditandai dengan menurunnya jumlah pengangguran terbuka, meningkatnya jumlah partisipasi angkatan kerja masyarakat;
 - d. Hilirisasi produk ekonomi ditandai dengan bertambahnya jumlah rumah industri dan industri pengolahan terhadap produk kelautan dan perkebunan, kegiatan budi daya yang ada di Kota Tual.

4.2.3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum yang Cepat, Bersih, Efektif dan Adaptif

Merupakan pendekatan yang bertujuan mewujudkan Agenda Pembangunan Transformasi Tata Kelola dan Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia.

Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil, dan demokratis adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan melayani kepentingan seluruh masyarakat. Penerapan teknologi informasi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan publik. Supremasi hukum yang adaptif, cepat dan bersih mendukung serta mempercepat pembangunan daerah. Misi ini turun sebagai respon dari isu tata kelola di Kota Tual, seperti kualitas pelayanan publik yang belum optimal, data dan manajemen data yang kurang berkualitas, pemanfaatan sistem berbasis digital yang masih kurang, serta kurangnya koordinasi antara lembaga/instansi.

- a. Birokrasi yang bersih, cepat, dan kolaboratif dapat ditandai dengan meningkatnya indeks pelayanan publik, meningkatnya indeks reformasi birokrasi, meningkatnya indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), meningkatnya indeks SPBE dan atau terbangunnya interoperability antar aplikasi yang ada untuk memudahkan user dalam menggunakannya, meningkatnya persentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu dan tepat mutu kepada masyarakat, meningkatnya opini BPK, meningkatnya nilai SAKIP;
- b. Regulasi yang adaptif dan taat asas dapat ditandai dengan menguatnya regulasi dalam ketertiban dan keamanan dan regulasi lainnya guna mendukung serta mempercepat pembangunan daerah;
- c. Keamanan dan ketentraman dapat ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, meningkatnya indeks

demokrasi, meningkatnya persentase penurunan kasus masalah sosial masyarakat, meningkatnya persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

4.2.4 Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Merupakan pendekatan yang bertujuan mewujudkan Agenda Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Mewujudkan ketahanan social, Budaya dan Ekologi mengandung tiga dimensi penting yang berfokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, keberagaman budaya, serta pelestarian lingkungan hidup. Misi ini bertujuan untuk menciptakan suatu keseimbangan antara perkembangan sosial, pelestarian budaya, dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak.

Perwujudan ketahanan sosial dan budaya yang tangguh melalui pembentukan karakter masyarakat yang agamis dan berbudaya, menciptakan keluarga berkualitas, pemuda tangguh berprestasi dan kaum perempuan yang memiliki kesempatan yang setara dalam pembangunan serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai upaya dini menghadirkan generasi yang berkualitas.

- a. Penguatan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) dan keragaman ditandai dengan Meningkatnya kegiatan Kerukunan Umat Beragama
- b. Gotong royong menjadi nilai luhur dan program pembangunan yang mana nilai ini diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan saling membantu antar sesama. Gotong-royong sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembangunan desa.
- c. Lingkungan hidup yang sehat, ramah, dan berkualitas ditandai dengan meningkatnya indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah, meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup, meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman, meningkatnya jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, meningkatnya proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah, tersedianya air bersih dan sanitas layak.
- d. Konservasi alam/lingkungan yang ditandai dengan dibangunnya program edukasi lingkungan kepada masyarakat dari berbagai generasi, generasi *baby boomers*, generasi

- x, generasi y, dan generasi z, penanganan perubahan iklim, dan pelestarian serta pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan.
- e. Lestarinya *Budaya Maren*, ditandai dengan menguatkan nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Kota Tual sehingga memiliki fungsi sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam melakukan penataan pembangunan. Dengan budaya Maren yang memiliki prinsip dan nilai gotong royong, maka prinsip dan nilai tersebut akan diturunkan menjadi program yang bersifat makro dan progresif untuk mempercepat pembangunan di Kota Tual.
 - f. Lestarinya *Budaya Sasi Laut* sebagai simpul yang mengikat masyarakat dalam satu kebersamaan dan menjadi manifestasi dari Identitas masyarakat suku *Kei* sebagai penduduk asli Kota Tual. Sasi Laut adalah kunci utama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Konsep "tutup sasi" memberikan waktu bagi biota laut untuk berkembang biak dan memulihkan diri tanpa gangguan. Praktik ini memastikan bahwa sumber daya laut, seperti ikan, teripang, dan biota lainnya, tidak dieksploitasi secara berlebihan. Hasilnya adalah laut yang sehat, keanekaragaman hayati yang terjaga, dan hasil panen yang berlimpah saat "buka sasi." Ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya dapat hidup berdampingan dengan alam, tetapi juga menjadi pelindungnya. Sasi laut adalah bukti nyata bagaimana kearifan lokal dapat menjadi solusi efektif untuk tantangan lingkungan global, memastikan bahwa kekayaan ekologi Kota Tual akan terus dinikmati oleh generasi-generasi mendatang.

4.2.5 Mewujudkan Infrastruktur Publik, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

Merupakan pendekatan yang bertujuan mewujudkan Agenda Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana yang Berkualitas.

Mewujudkan infrastruktur, sarana prasarana publik dasar yang berkualitas, dan ramah lingkungan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Kota Tual dengan ciri kepulauan.

- a. Pemerataan pembangunan infrastruktur dapat ditandai dengan meningkatnya panjang jalan yang dalam kondisi baik, meningkatnya indeks infrastruktur wilayah mantap berwawasan lingkungan, meningkatnya jaringan air bersih/aman.

- b. Sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dapat ditandai dengan meningkatnya jumlah terminal, meningkatnya jumlah rumah layak huni, meningkatnya jumlah kawasan terbuka taman dan ruang hijau, meningkatnya interkoneksi angkutan umum antar simpul transportasi baik darat, laut, maupun udara, meningkatnya jumlah pasar, dan meningkatnya jumlah tempat ibadah yang dibangun.
- c. Infrastruktur dan sarana prasarana yang terintegrasi, dan modern berbasis teknologi dan digitalisasi.



5

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Dalam menyusun arah kebijakan pembangunan Kota Tual selama 20 (dua puluh) tahun kedepan, maka penting kiranya memahami terkait arah kebijakan pembangunan itu sendiri. Arah kebijakan pembangunan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode pembangunan. Arah kebijakan pembangunan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun sehingga total pembangunan jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun. Dengan disusunnya arah kebijakan pembangunan, maka diharapkan dapat terencana dengan baik dan memberikan hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasional pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

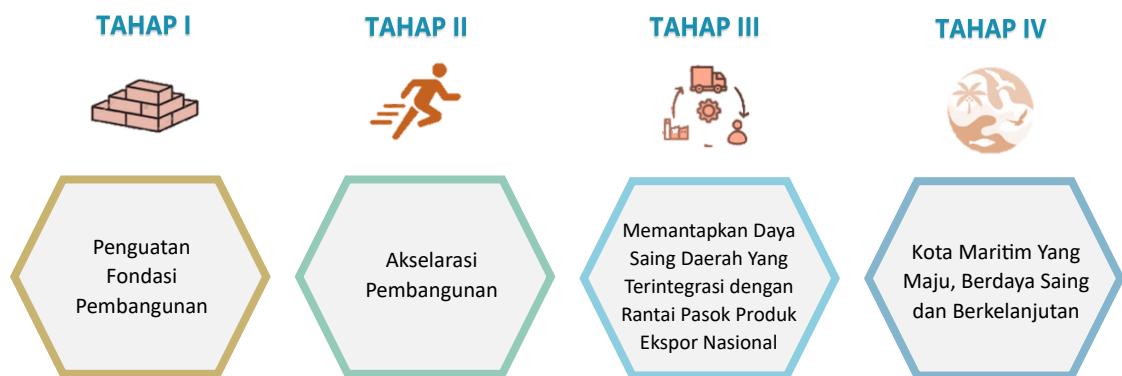
5.1 Arah Kebijakan Kota Tual

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke

dalam 4 (empat) tahapan, tiap tahapan dapat memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Pentahapan arah kebijakan diuraikan seperti berikut:

- Arah Kebijakan Periode 2025-2029
- Arah Kebijakan Periode 2030-2034
- Arah Kebijakan Periode 2035-2039
- Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Perumusan arah kebijakan memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas yang tertuang dalam Bab V RPJPN Tahun 2025-2045. Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok juga perlu memperhatikan agenda pembangunan nasional dan Maluku yang telah ditetapkan berupa 17 (tujuh belas) arah tujuan pembangunan.



Gambar 5.1
Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Tual Tahun 2025 - 2045

Pada tahap pertama pembangunan periode tahun 2025-2029 rumusan pembangunan yakni penguatan fondasi pembangunan, tahap kedua periode tahun 2030-2034 rumusan pembangunan yakni akselerasi pembangunan, tahap ketiga periode tahun 2035-2039 rumusan pembangunan yakni memantapkan daya saing daerah yang terintegrasi dengan rantai pasok produk ekspor nasional, dan tahap keempat periode 2040-2045 rumusan pembangunan Kota Tual menjadi Kota Maritim yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

5.1.1 Arah Kebijakan Kota Tual Tahap I (2025–2029)

Tahap I RPJPD Kota Tual merupakan fondasi penting dalam rencana pembangunan 20 tahun ke depan yang akan menopang dan mendasari tahapan-tahapan pembangunan selanjutnya. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, tahap ini bertujuan untuk meletakkan dasar yang kuat dalam berbagai aspek sehingga pembangunan berikutnya dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Pada tahap pembangunan ini arah kebijakan Kota Tual adalah;

- Penyediaan dan pemenuhan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang adil, merata dan tepat sasaran.
- Pengembangan hilirisasi sumber daya alam serta peningkatan inovasi, ekonomi kreatif dan produktivitas tenaga kerja.
- Peningkatan kualitas kelembagaan dan aparatur, digitalisasi layanan publik, serta regulasi yang efektif, efisien dan dinamis.
- Peningkatan konektivitas kawasan perkotaan dan kepulauan melalui pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, guna mendukung aksesibilitas layanan dasar.
- Meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai fondasi utama dan modal dasar pembangunan berkelanjutan.

5.1.2 Arah Kebijakan Kota Tual Tahap II (2030–2034)

Pembangunan pada periode Tahap II (2030–2034) difokuskan pada akselerasi transformasi dan merupakan tahap lanjutan setelah fondasi yang kuat berhasil dibangun. Tahap ini berfungsi untuk mempercepat proses perubahan dan mendorong capaian-capaian yang lebih maju dan inovatif dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, dan tata kelola. Tujuan utamanya adalah untuk membawa masyarakat Kota Tual ke tingkat yang lebih kompetitif dan berdaya saing. Arah kebijakan pada periode perencanaan ini adalah:

- Percepatan pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berkeadilan
- Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan digital, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di Kota Tual, disertai dengan penguatan rantai nilai pada sektor-sektor unggulan

- Penguatan kelembagaan dan aparatur yang profesional berbasis digital informasi, regulasi yang efektif, serta keterlibatan aktif masyarakat
- Memperkuat pengembangan infrastruktur perkotaan dan kepulauan serta pusat-pusat pertumbuhan baru, integrasi percepatan pelayanan dasar, pemanfaatan kapasitas EBT untuk mendukung transisi energi, serta meningkatkan jangkauan penggunaan jaringan internet dan komunikasi berkecepatan tinggi
- Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai penggerak utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

5.1.3 Arah Kebijakan Kota Tual Tahap III (2035–2039)

Tahap III (2035–2039) merupakan tahapan pembangunan yang bertujuan untuk memantapkan daya saing daerah dan mengintegrasikannya dengan rantai pasok produk ekspor nasional merupakan fase lanjutan yang sangat strategis dalam meningkatkan kontribusi Kota Tual terhadap perekonomian provinsi dan nasional. Pada tahap ini, daerah berfokus pada pengembangan kapasitas dan keunggulan komparatif yang memungkinkan mereka terhubung dan menjadi bagian integral dari rantai pasok global. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan nilai tambah pada produk-produk lokal, meningkatkan daya saing daerah, dan memperluas akses ke pasar internasional. Pada tahapan pembangunan ini arah kebijakannya adalah;

- Penguatan daya saing sumber daya manusia dan daerah untuk bersaing secara regional, nasional dan global;
- Mengoptimalkan daya saing ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi keunggulan daerah untuk membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan ekosistem rantai nilai regional, nasional dan global;
- Pemantapan kelembagaan pemerintah dan aparatur yang kolaboratif, regulasi yang adaptif serta masyarakat yang partisipatif;
- Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan baru yang didukung oleh infrastruktur perkotaan dan kepulauan yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan akses pelayanan dasar, dan penguatan teknologi digital dan inovasi;
- Memantapkan karakter dan ketahanan masyarakat yang tangguh serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

5.1.4 Arah Kebijakan Kota Tual Tahap IV (2040–2045)

Tahap IV (2040–2045) RPJPD Kota Tual merupakan tahapan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan Kota Tual sebagai Kota Maritim yang maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Tahap I, II dan III merupakan tahapan-tahapan pembangunan untuk mewujudkan tujuan tersebut, dimana pembangunan sumber daya manusia, daya saing ekonomi, pemanfaatan potensi sektor unggulan termasuk potensi maritim dan pelestarian lingkungan hidup merupakan fokus dari proses tersebut. Sehingga perwujudan Kota Tual sebagai Kota Maritim yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan merupakan suatu wujud pembangunan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang akan membantu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

Pada Tahap IV ini, arah kebijakan pembangunan adalah:

- Mewujudkan sumber daya manusia Kota Tual yang berdaya saing;
- Pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, adil dan merata serta berkelanjutan;
- Tata kelola pemerintahan Kota Tual yang kolaboratif, dinamis, inovatif dan adaptif;
- Infrastruktur publik dan sarana prasarana yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan;
- Mewujudkan Kota Maritim dengan masyarakat yang tangguh, lingkungan lestari, serta kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 5.1. Arah Kebijakan RPJPD Kota Tual 2025 - 2045

VISI		A R A H K E B I J A K A N			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Kota Maritim Yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	M i s i	Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselarasi Pembangunan	Memantapkan Daya Saing Daerah Yang Terintegrasi dengan Rantai Pasok Produk Ekspor Nasional	Kota Maritim Yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
BERDAYA SAING	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Penyediaan dan pemenuhan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang adil, merata dan tepat sasaran	Percepatan pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berkeadilan	Penguatan daya saing sumber daya manusia dan daerah untuk bersaing secara regional, nasional dan global	Sumber Daya Manusia Kota Tual yang Berdaya Saing
MAJU	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Adil dan Merata	Pengembangan hilirisasi sumber daya alam serta peningkatan inovasi, ekonomi kreatif dan produktivitas tenaga kerja	Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan digital, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di Kota Tual, disertai dengan penguatan rantai nilai pada sektor-sektor unggulan	Mengoptimalkan daya saing ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi keunggulan daerah untuk membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan ekosistem rantai nilai regional, nasional dan global	Pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, adil dan merata serta berkelanjutan

VISI		ARAH KEBIJAKAN			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Kota Maritim Yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	M i s i	Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Memantapkan Daya Saing Daerah Yang Terintegrasi dengan Rantai Pasok Produk Ekspor Nasional	Kota Maritim Yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum yang Cepat, Bersih, Efektif dan Adaptif	Peningkatan kualitas kelembagaan dan aparatur, digitalisasi layanan publik, serta regulasi yang efektif, efisien dan dinamis	Penguatan kelembagaan dan aparatur yang profesional berbasis digital informasi, regulasi yang efektif, serta keterlibatan aktif masyarakat	Pemantapan kelembagaan pemerintah dan aparatur yang kolaboratif, regulasi yang adaptif serta masyarakat yang partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Kota Tual yang Kolaboratif, Dinamis, Inovatif dan Adaptif
BERKELANJUTAN	Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai fondasi utama dan modal dasar pembangunan berkelanjutan	Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai penggerak utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Memantapkan karakter dan ketahanan masyarakat yang tangguh serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan dalam menghadapi dampak perubahan iklim	Mewujudkan Kota Maritim dengan masyarakat yang tangguh, lingkungan lestari, serta kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan

VISI		ARAH KEBIJAKAN			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Kota Maritim Yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	M i s i	Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Memantapkan Daya Saing Daerah Yang Terintegrasi dengan Rantai Pasok Produk Ekspor Nasional	Kota Maritim Yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
	Mewujudkan Infrastruktur Publik, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas	Peningkatan konektivitas kawasan perkotaan dan kepulauan melalui pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, guna mendukung aksesibilitas layanan dasar	Memperkuat pengembangan infrastruktur perkotaan dan kepulauan serta pusat-pusat pertumbuhan baru, integrasi percepatan pelayanan dasar, pemanfaatan kapasitas EBT untuk mendukung transisi energi, serta meningkatkan jangkauan penggunaan jaringan internet dan komunikasi berkecepatan tinggi	Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan baru yang didukung oleh infrastruktur perkotaan dan kepulauan yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan akses pelayanan dasar, dan penguatan teknologi digital dan inovasi	Infrastruktur publik dan sarana prasarana yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan

5.2. Sasaran Pokok RPJPD Kota Tual 2025 - 2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan melalui langkah-langkah transformasi di daerah yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045. Sasaran pokok RPJPD Kota Tual Tahun 2025-2045 dirumuskan dari Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) hasil penyelarasan RPJPD Kota Tual Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.

Tabel 5.2. Sasaran Pokok RPJPD Kota Tual 2025 - 2045

Misi		Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Kesehatan Untuk Semua	Terwujudnya kualitas Kesehatan Masyarakat secara Merata
	2	Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	SDM Kota Tual yang produktif, kompetitif dan inovatif
	3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Adil dan Inklusif
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Adil dan Merata	4	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Mewujudkan Struktur Ekonomi yang kuat melalui penerapan IPTEKIN
	5	Penerapan Ekonomi Hijau	Mewujudkan lingkungan lestari, ekonomi tumbuh tinggi, dan kesejahteraan sosial inklusif yang berkelanjutan
	6	Transformasi Digital	Mewujudkan Ekosistem digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
	7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Produktivitas ekonomi daerah meningkat melalui integrasi dalam rantai nilai nasional dan global
	8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Mewujudkan Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang saling mendukung dan berkelanjutan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum yang	9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang profesional, bersih dan kolaboratif

Misi	Arah Pembangunan		Sasaran Pokok
Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif	10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial	Mewujudkan hukum yang adil, keamanan daerah yang tangguh, dan demokrasi yang substansial
	11	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar	Diplomasi tangguh dan pertahanan yang memiliki daya gentar semakin kuat
	12	Stabilitas Ekonomi Daerah	Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Daerah kuat dan tangguh
Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Kerukunan antar etnis dan agama serta kemajuan budaya sebagai modal utama pembangunan
	14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
	15	Lingkungan Hidup berkualitas	Kota Tual dengan lingkungan hidup yang berkualitas dan pengelolaan sampah yang terpadu
	16	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya ketahanan air, pangan dan energi daerah
	17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya kualitas resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
Mewujudkan Infrastruktur Publik, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas		Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi	Mewujudkan pemerataan infrastruktur dasar dan ekonomi
		Implementasi Aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan

Tabel 5.3. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.	Kesehatan Untuk Semua	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	Terwujudnya kualitas Kesehatan Masyarakat secara Merata	1.	Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	72,06	73,57	75,51	77,49	79,95
			Peningkatan akses pelayanan kesehatan berbasis gugus pulau melalui sistem rujukan kepulauan (termasuk RS perairan), penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya, penguatan telemedicine serta sistem sister hospital dengan RS di wilayah lain.		2.	Kesehatan Ibu dan Anak:					
			Percepatan penurunan stunting terutama dengan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, serta percepatan eliminasi malaria.			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	113	90	68	45	22
			Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan			b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	19,1	13,5	11,38	9,25	7,13
					3	Penanganan Tuberkulosis:					

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
			yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses		a) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (%)		91	93,25	95,50	97,75	100
			Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis.		b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) (%)		91	93,25	95,50	97,75	100
			Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antarpulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan Kesehatan.		4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)		98,00	98,38	98,75	99,13	99,50
			Penguatan layanan kesehatan berciri kepulauan yang berkualitas, inklusif dan terjangkau.								
			Penyelenggaraan layanan kesehatan prima dan inklusif secara berkelanjutan								

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
							2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	2	Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Penyelenggaraan layanan kesehatan prima dan inklusif secara berkelanjutan	SDM Kota Tual yang produktif, kompetitif dan inovatif						
			Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)		5 Hasil Pembelajaran					
			Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil.		a) Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:					
			Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri, pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI.		i) Literasi Membaca	9,09-11,09	24,23-26,23	39,38-41,38	54,52-56,52	69,66-71,66
			Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas tenaga dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.		ii) Numerasi	0,00-2,00	15,38-17,38	30,75-32,75	46,13-48,13	61,50-63,50
			Peningkatan akses dan kualitas sekolah kejuruan/pendidikan vokasi yang berbasis sumber daya alam unggulan melalui kemitraan kolaboratif dengan perguruan tinggi		b) Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:					

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
			Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menjangkau seluruh pulau-pulau berpenduduk.		i) Literasi Membaca		16,30-18,30	27,26-29,26	38,23-40,23	49,19-51,19	60,15-62,15
			Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan dalam bidang perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata.		ii) Numerasi		10,56-12,56	22,06-24,06	33,55-35,55	45,05-47,05	56,54-58,54
			Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antarpulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan pendidikan.		c) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)		10,57	11,54-11,71	12,27-12,61	13,00-13,52	13,70 - 13,73
			Pengembangan Sekolah Kejuruan berbasis SDA unggulan Daerah		d) Harapan lama Sekolah		14,11	14,11 - 14,54	14,65 - 15,07	15,18 - 15,61	15,82-15,92
			Penguatan layanan Pendidikan kepulauan berkualitas dan berdaya saing yang adaptif dan terintegrasi		6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		14,94	15,19	15,44	15,69	14,94-16,94

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
			Penyelenggaraan Pendidikan kepulauan berkualitas, inklusif dan berkelanjutan yang menghasilkan SDM Maluku melek teknologi, kompetitif, inovatif dan produktif		7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	59,06	63,05	67,03	71,02	75,00
	3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif terintegrasi.	Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Adil dan Inklusif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	18,95	16,15 - 18,95	12,65 - 15,45	11,95 - 9,15	4,15 - 4,95
			Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran		9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	25,36	39,59	53,81	68,04	82,26
			Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas		10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	13	21	29	37	45
			Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.								

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
			Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.								
			Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.								
			Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.								

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Adil dan Merata	4	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan perikanan tangkap, perikanan budidaya (rumput laut), dan perkebunan (pala, cengkeh, dan kelapa) serta kawasan pariwisata berkelanjutan	Mewujudkan Struktur Ekonomi yang kuat melalui penerapan IPTEKIN	11.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	1,78	1,78 - 2,14	2,23 - 2,68	2,80 - 3,36	3,52 - 4,41
			Hilirisasi sumber daya alam unggulan melalui pengembangan sentra-sentra industri yang telah memiliki potensi berkembang (difokuskan pada sumber daya pertanian-kelapa, perikanan tangkap dan perikanan budidaya- rumput laut			a) Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%)	Ditentukan Kemudian				
			Mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru lainnya yang berbasis kemaritiman dengan dukungan atmosfer yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas riset dan inovasi, produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan digitalisasi.								
			Pengembangan konsep ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian antara lain pengembangan kawasan utama produsen perikanan secara berkelanjutan.								

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
			Peningkatan kontribusi dan daya saing sektor-sektor unggulan termasuk sektor- sektor berbasis kemaritiman dengan peningkatan kualitas produk dan rantai pasok serta komersialisasi produk di sektor-sektor baru								
			Pengembangan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal daerah								
			Penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal daerah yang terintegrasi dengan ekosistem syariah dan industri halal nasional								
			Percepatan pengembangan lumbung ikan nasional, termasuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur-infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan								
			Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan yang didukung penerapan blue dan green economy, digitalisasi dan kemajuan teknologi		12.	Pengembangan Pariwisata					
			Pengembangan potensi pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) melalui			a) Kontribusi PDRB Penyediaan Makan dan Minum (%)	0,95	1,15	1,46	1,86	2,48

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
			pengembangan kawasan pariwisata premium (premium tourism), pariwisata lokal melalui penguatan strategi pemasaran serta peningkatan kapasitas pengelola dan masyarakat pelaku usaha.			b) Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	Ditentukan Kemudian				
						c) Kontribusi PDRB Pariwisata Bahari (%)	Ditentukan Kemudian				
						d) Jumlah tamu wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	Ditentukan Kemudian				
					13.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	Ditentukan Kemudian				
			Peningkatan keterkaitan IKM dan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan pemasaran, serta penerapan teknologi dan kemitraan usaha		14.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
						a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten/Kota (%)	Ditentukan Kemudian				
						b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)	Ditentukan Kemudian				
						c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Ditentukan Kemudian				
			Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis			d) Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	Ditentukan Kemudian				

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
							2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
			dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.							
			Peningkatan produktivitas BUMD		e) Return on Asset (ROA) BUMD (%)	Ditentukan Kemudian				
			Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.		15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,34	6,35 - 5,55	5,49 - 5,22	5,16 - 4,89	4,83 - 4,5
			Penguatan SDM Maluku yang profesional dan adaptif sesuai permintaan pasar kerja nasional dan internasional		a) Persentase Tenaga Kerja sektor Kelautan dan Perikanan (%)	Ditentukan Kemudian				
					b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Ditentukan Kemudian				
					16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	51,68	52,20	52,86	53,53	54,34
			Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.		17. Tingkat Penguasaan IPTEK					
					a, Indeks Inovasi Daerah	35,00 Inovatif	36,50 - 40,54 Inovatif	41,50 - 45,30 Inovatif	46,73 – 64,26 Inovatif – Sangat Inovatif	> 65,00 Sangat Inovatif
					b. Indeks Inovasi dan Riset Maritim	Ditentukan Kemudian				

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	5	Penerapan Ekonomi Hijau	Pemantapan transformasi ekonomi menuju ekonomi maju dan berkelanjutan dengan menguatnya sektor-sektor unggulan yang terhubung dengan rantai nilai global (pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan hub maritim Asia Pasifik di Kawasan Timur Indonesia). Tumbuhnya industri makanan dan minuman.	Mewujudkan lingkungan lestari, ekonomi tumbuh tinggi, dan kesejahteraan sosial inklusif yang berkelanjutan	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
			Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru & energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga			a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Ditentukan Kemudian				
						b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Ditentukan Kemudian				

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
			listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan								
	6	Transformasi Digital	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	Mewujudkan Ekosistem digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	19.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ditentukan Kemudian				
	7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.	Produktivitas ekonomi daerah meningkat	20.	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Ditentukan Kemudian				

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
							2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
			Peningkatan akses pasar nasional dan global untuk meningkatkan segmentasi pasar komoditi unggulan daerah	melalui integrasi dalam rantai nilai nasional dan global	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30,10	31,93	33,76	35,59	37,42
					22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Ditentukan Kemudian				
			Penguatan kawasan-kawasan penyangga untuk mendukung Tual sebagai Hub Kemaritiman (Tuna Cakalang Tongkol)		Persentase ekspor produk kelautan dan perikanan terhadap total ekspor (%)	Ditentukan Kemudian				
	8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan eksisting melalui peningkatan investasi dan pengembangan kota-kota pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sebagai pusat pertumbuhan wilayah.	Mewujudkan Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang saling mendukung dan berkelanjutan	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan					
					a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kota terhadap Provinsi (%)	5,93	6,93	7,43	8,25	9,46
			Pengembangan perdesaan dengan mengoptimalkan potensi lokal (keanekaragaman hayati dan kearifan lokal serta norma adat yang potensial dalam pembangunan berkelanjutan)		b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	72	74	78	82	86
					c. Persentase Desa Mandiri (%)	47,09	57,69	70,94	84,19	100

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum yang Cepat, Bersih Efektif dan Adaptif	9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah	Kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang profesional, bersih dan kolaboratif	24	Indeks Reformasi Hukum	38,65	45,15	51,65	58,15	64,65
			Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.								
			Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.								
			Regulasi untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.								
			Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.		25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00	3,00 – 3,36	3,45 – 3,81	3,90 – 4,26	4,35 - 5,00
			Penyusunan kebijakan afirmatif mengedepankan kontekstual kewilayahan untuk mendorong pembangunan wilayah.								
			Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.								

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
			Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.		26	Indeks Pelayanan Publik	3,91	4,18	4,46	4,73	5,00
			Penguatan manajemen talenta (<i>talent pool</i>) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya.								
			Penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai <i>end user</i> .								
			Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.		27	Indeks Integritas Nasional	67,43	70,88	74,33	77,78	81,23
			Penguatan integritas partai politik.								
			Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan masyarakat, pembangunan komunikasi publik yang merata dan berkeadilan serta pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat								

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial	Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial	Mewujudkan hukum yang adil, keamanan daerah yang tangguh, dan demokrasi yang substansial	28	Indeks Pembangunan Hukum	38,65	45,15	51,65	58,15	64,65
					29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	64,93	69,28	73,62	77,97	82,31
					30	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	11	Stabilitas Ekonomi Daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan, dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Daerah kuat dan tangguh	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,4	1,55	1,70	1,85	2,0
					32	Tingkat Inflasi	2,5 – 3,9	2,1 – 3,7	1,7 – 3,5	1,2 – 3,3	0,8 – 3,1
					33	Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan					

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
					a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		28,31	38,58	48,86	59,13	69,4
					b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)		0,14	0,15	0,15	0,16	0,16
					c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan		263,36	530,52	797,65	1.064,77	1.331,90
					d) Total Kredit/PDRB (%)		29,3	39,05	48,80	58,55	68,3
					34 Inklusi Keuangan (%)		86,3	89,43	92,56	95,68	98,81
	12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar	Penguatan peran daerah dalam kerja sama antarnegara, terutama dengan negaranegara MSG (Melanesian Spearhead Group) dalam mendukung kedaulatan negara.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Meningkat	35 Persentase Kerja Sama Internasional yang Terimplementasi (%)	Ditentukan Kemudian					
			Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial		36 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (%)	Ditentukan Kemudian					
Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	Kerukunan antar etnis dan agama serta kemajuan budaya sebagai modal utama pembangunan	37 Indeks Pembangunan Kebudayaan		55,7	55,70 - 58,58	59,30 - 62,18	62,90 - 65,78	66,50 - 69,48
			Pelestarian dan penguatan tradisi budaya Maren serta norma hukum adat masyarakat melalui penguatan ikatan antarkelompok masyarakat, pelibatan tokoh adat/agama		38 Indeks Kerukunan Umat Beragama		76,08-76,17	77,42-78,43	78,77-79,99	80,01-83,45	83,45-84,41

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
			Pelestarian dan pengembangan jalur rempah sebagai peradaban budaya masyarakat								
			Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.								
			Penguatan kemitraan kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat Sipil dalam mendukung kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan								
			Memantapkan eksistensi Maluku sebagai provinsi damai dengan memperkuat peran modal sosial memperkuat peran modal sosial dalam mendukung pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan								
	14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	63,88-63,89	65,02-65,04	66,16-66,19	67,29-67,34	68,43-68,49
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan									

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
			resiliensi, dan tokoh adat dan agama.		40	Indeks Ketimpangan Gender	0,49	0,49 – 0,45	0,45 – 0,39	0,39 – 0,25	0,25 – 0,23
			Penjangkauan terhadap masyarakat di pulau terluar yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran								
			Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia terutama pada masyarakat adat melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan								
			Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan								
	15	Lingkungan Hidup berkualitas	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana.	Kota Tual dengan lingkungan hidup yang berkualitas dan pengelolaan sampah yang terpadu	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,542	0,59	0,64	0,68	0,73
			Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang.			Persentase Kawasan Konservasi Laut terhadap Wilayah Kelola Laut (%)	Ditentukan Kemudian				

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
			Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi.		42	Kualitas Lingkungan Hidup					
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		78,00	78,00 - 79,48	79,85 - 81,33	81,70 - 83,18	83,55 - 85,26		
			b) Rumah Tangga dengan Akses sanitasi Aman		6,00	14 – 17	25 – 28	36 – 39	50,00		
			c) Pengelolaan Sampah								
			- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		0,05	21,16	42,27	63,38	84,49		
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)		30,74	48,06	65,37	82,69	100		
16	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkapan air, riset dan inovasi sistem, dan teknologi pertanian rendah karbon, serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan.	Meningkatnya ketahanan air, pangan dan energi daerah	43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan						

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target				
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	
			Transmigrasi sebagai basis pertanian untuk kemandirian pangan lokal dengan pengembangan produk pangan (tanaman padi, sagu, dan hortikultura tanaman sayuran/olerikultura).			b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)						
			Mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu: (i) pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat. (ii) pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung kemandirian pangan lokal. (iii) normalisasi sungai yang melintas perkotaan; (iv) perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.			c) Ketahanan Air						
			- Kapasitas Air Baku (m3/detik)			0,1	0,73	1,37	2,00	2,63		
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)			40,39	55,29	70,20	85,10	100		
	17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Strategi khusus untuk adaptasi perubahan iklim (di antaranya <i>sea level rise</i> di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) salah satunya melalui penguatan sarana prasarana (green infrastructure dan nature-based solutions), dan tata kelola risiko.	Meningkatnya kualitas resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	44	Indeks Resiko Bencana	155,00	155,00 - 145,36	142,95 - 133,31	130,90 - 121,26	118,85 - 106,74	
					45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
						a) Kumulatif	97,39	98,04	98,70	99,35	100	
						b) Tahunan	85,82	89,37	92,91	96,46	100	
			Pengurangan risiko kebencanaan antara lain melalui sistem peringatan dini kebencanaan									

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Mewujudkan Infrastruktur Publik, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas		Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui penyediaan RDTR Kota Tual, dan Ibu Kota Kecamatan serta pengelolaan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana.	Terwujudnya pemerataan infrastruktur dasar dan ekonomi		Indeks Penataan dan Pemanfaatan Ruang (poin)					
			Pemantapan pemenuhan akses dan kualitas infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar secara merata dan berkelanjutan.			Indeks Infrastruktur Daerah (%) (poin)					
			Pengembangan jalan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan untuk mendorong peningkatan kualitas rantai produksi terutama untuk mendukung Maluku Lumbung Ikan Nasional (LIN)								
			Perluasan jaringan internet dan komunikasi berkecepatan tinggi yang menjangkau seluruh daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan inovasi dan teknologi digital dalam pengembangan sektor unggulan.								
			Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah kepulauan dan afirmasi								

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
			Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif, serta pengelolaan sampah yang terpadu sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.								
		Implementasi Aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi darat dan air kewenangan kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas mobilitas orang dan barang	Aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan		Pertumbuhan Lalulintas orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara (%)					
			Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan								

MISI	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
								2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
			keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).								
			Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.								



6

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tual Tahun 2025–2045 menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Tual selama 20 tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi landasan bagi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual dalam merumuskan visi, misi, serta program prioritas yang nantinya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual setiap lima tahun. Keberhasilan pembangunan jangka panjang di Kota Tual dalam upaya mewujudkan visi Kota Maritim yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan harus didukung oleh (1) komitmen kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan pembangunan kepada seluruh masyarakat; serta (4) partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Tual. Untuk memastikan RPJPD Kota Tual Tahun 2025–2045 dapat terlaksana sesuai harapan, diperlukan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan beserta ketentuan pendukung lainnya.

6.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Untuk mencegah kekosongan regulasi saat transisi dari berakhirnya RPJPD Kota Tual 2025–2045, perlu disusun Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan berikut:

6.1.1 Pedoman Transisi

Pedoman Transisi memberikan arahan terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan selama masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Untuk memastikan kelangsungan proses pembangunan dan mengatasi kekosongan setelah berakhirnya masa berlaku RPJPD Kota Tual Tahun 2025–2045, sejumlah ketentuan diatur sebagai berikut:

1. Permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan pada akhir periode RPJPD 2025–2045 akan dimasukkan sebagai isu dalam RPJPD periode selanjutnya agar tetap dapat ditangani melalui arah kebijakan dan sasaran pokok perencanaan jangka panjang berikutnya.
2. Indikator Sasaran Pokok RPJPD berfungsi sebagai alat ukur peningkatan kesejahteraan di berbagai aspek pembangunan. Jika terjadi perubahan pada indikator tersebut, penyesuaian bisa dilakukan sesuai dinamika yang ada, asalkan cakupan aspek pembangunannya terus dijaga.
3. Target indikator yang belum tercapai pada periode RPJPD 2025–2045 akan disesuaikan pada RPJPD periode selanjutnya.
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual pada masa transisi tahun 2045–2050, yang merupakan tahun pertama RPJPD periode 2045–2065, bertujuan menghubungkan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan agar berlangsung secara berkelanjutan.

6.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan merumuskan petunjuk koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar Perangkat Daerah agar kebijakan RPJPD terlaksana efektif dan efisien dengan pemanfaatan optimal sumber daya pembangunan. Berikut Kaidah Pelaksanaan RPJPD Kota Tual 2025–2045:

1. Perangkat Daerah pengampu urusan Penunjang Perencanaan Daerah berperan dalam mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tual. Koordinasi ini ditujukan agar setiap perangkat daerah memperhatikan Arah Kebijakan serta Sasaran Pokok Pembangunan lima tahunan sebagai landasan dalam penyusunan RPJMD pada periode yang bersangkutan, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah.

2. Penyusunan RPJPD Kota Tual Tahun 2025-2045 mengacu pada Perda nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tual tahun 2012-2032. Seiring diterbitkannya Perda baru tentang RTRW Kota Tual nantinya, maka akan dilakukan penyesuaian melalui dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD)
3. Prinsip pengarusutamaan *Gender, Disability and Social Inclusion* (GEDSI) diterapkan sebagai strategi dalam pembangunan berkelanjutan guna memastikan tercapainya kesetaraan serta hak akses yang setara terhadap sumber daya, peluang, dan layanan publik, sehingga mendukung terwujudnya inklusi sosial.
4. Target pembangunan yang tercantum dalam Target Indikator Sasaran Pokok RPJPD Kota Tual Tahun 2025-2045 digunakan sebagai referensi dalam menetapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada dokumen RPJMD di periode terkait.
5. Indikator target pada RPJPD Kota Tual Tahun 2025-2045 yang belum ditetapkan saat ini akan dirinci dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan pendek daerah.
6. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan diwajibkan melakukan pengendalian serta evaluasi sesuai regulasi untuk mengantisipasi perubahan lingkungan internal maupun eksternal guna pencapaian target RPJPD Kota Tual Tahun 2025-2045.
7. Jika terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tual, penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib menyesuaikan dengan Regulasi Daerah terkait Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru, serta memastikan seluruh urusan tertangani secara optimal.
8. Konsistensi antara perencanaan dan pendanaan sangat penting untuk menjamin perencanaan yang berkualitas, keselarasan antara pelaksanaan pembangunan dan dokumen perencanaan, serta ketersediaan pendanaan sehingga tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dapat tercapai.

6.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan dan partisipatif. Pemantauan dan evaluasi dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil, baik jangka menengah maupun tahunan, melalui kerangka kerja logis, penetapan ukuran keberhasilan, penganggaran, dan manajemen risiko. Semua aktivitas didasarkan pada

regulasi komprehensif yang bertujuan mencapai konsistensi pelaksanaan serta mendukung pencapaian kinerja pemerintah.

6.3 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan bersifat fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian jika terjadi perubahan signifikan seperti bencana alam atau perubahan kebijakan nasional. Pembaruan RPJPD dapat dilakukan melalui RPJMD berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan. Transformasi digital dan penggunaan sistem elektronik mendukung efisiensi dan kualitas kebijakan dalam semua tahapan pembangunan.

6.4 Pendanaan Pembangunan

Pendanaan dalam rangka mewujudkan visi ***Kota Maritim Yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan*** direncanakan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan yang meliputi APBN, APBD, BUMN, BUMD, sektor swasta, lembaga donor, serta sumber pendanaan lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya lain dilakukan dengan memperkuat manajemen investasi publik, yang mencakup peningkatan identifikasi peluang investasi, perbaikan evaluasi proyek, penyelarasan prioritas nasional dan daerah, modernisasi pemantauan, peningkatan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat, penyempurnaan regulasi dan kelembagaan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas.

RPJPD Kota Tual 2025–2045 mencerminkan komitmen daerah untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan dengan fokus pada pembangunan yang berbasis kearifan lokal, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Walikota Tual,



AKHMAD YANI RENUAT, S.Sos., M.Si., MH.